



LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP KABUPATEN TABALONG



TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan laporan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029, berisi pertanggungjawaban Kinerja tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong dimaksudkan sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kebersamaan dan dukungan dalam rangka selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong ini dapat menjadi sarana evaluasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Tanjung, 17 Maret 2026

BUPATI TABALONG

Ir. H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Tabalong	2
1.3 Kondisi Geografis	4
1.4 Kondisi Demografis	8
1.5 Organisasi Perangkat Daerah	9
1.6 Kondisi Aparatur Sipil Negara.....	11
1.7 Isu Strategis.....	12
1.8 Capaian Kinerja Makro Atas Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2025.....	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	29

2.2.	Visi.....	29
2.3.	Misi.....	31
2.4.	Tujuan dan Sasaran	35
2.5.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
2.6.	Program Prioritas Daerah	65
2.7.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	94
2.8.	Perjanjian Kinerja (PK).....	98
2.9.	Program Untuk Pencapaian Sasaran	101
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	103
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	105
3.2	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	110
3.3	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	274
3.4	Perbandingan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 dan 2025.....	285
BAB IV	PENUTUP	288
4.1	Kesimpulan.....	288
LAMPIRAN		290
	Perjanjian Kinerja Bupati Tabalong Tahun 2025.....	290
	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.....	301
	<i>Cascading</i> Tahun 2025-2029.....	319

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan laporan tahun ke-6 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029, berisi pertanggungjawaban Kinerja tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga mengacu pada Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/464/2025 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Laporan kinerja ini juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat memberikan dukungan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabalong pada tahun 2025. Capaian kinerja dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat diberikan ringkasan hasil sebagai berikut :

Tujuan 1 : “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat”

Dengan jumlah 5 (lima) sasaran dan 1 (satu) indikator tujuan dan 9 (Sembilan) indikator sasaran yaitu :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan capaian realisasi kinerja 101,13 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

- 1) Harapan Lama Sekolah, dengan capaian realisasi kinerja 99,17 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 2) Rata-Rata Lama Sekolah, dengan capaian realisasi kinerja 97,40 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 3) Umur Harapan Hidup, dengan capaian realisasi kinerja 98,14 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 4) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, dengan capaian realisasi kinerja 95,23 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 5) Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dengan capaian realisasi kinerja 99,09 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 6) Persentase penduduk miskin (%), dengan capaian realisasi kinerja 116,48 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 7) Indeks Gini (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 88,04 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Tinggi**.
- 8) Tingkat Pengangguran Terbuka (%), dengan capaian realisasi kinerja 91,95 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 9) Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun, dengan capaian realisasi kinerja 115,70 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tujuan 2 : **“Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Inklusif”**

Dengan jumlah 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran yaitu :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), dengan capaian realisasi kinerja 86,85 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Tinggi**.
- b. PDRB perkapita (Rp. Juta), dengan capaian realisasi kinerja 88,95 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Tinggi**.
- 1) Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%), dengan capaian realisasi kinerja 107,14 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 2) Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%), dengan capaian realisasi kinerja 108,86 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 3) Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%), dengan capaian realisasi kinerja 104,76 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 4) Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah), dengan capaian realisasi kinerja 257,32 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 5) Rasio Kewirausahaan Daerah (%), data dari BPS belum rilis.

Tujuan 3 : **“Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan”**

Dengan jumlah 3 sasaran dan 2 (dua) indikator tujuan dan 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

- a. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 99,41 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 106,9 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 1) Indeks Infrastruktur (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 99,05 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

- 2) Indeks Desa (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 102,81 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 3) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%), dengan capaian realisasi kinerja 108,47 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 4) Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 155,98 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tujuan 4 : **“Menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni”**

Dengan jumlah 3 sasaran dan 1 (satu) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

- a. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 109,70 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 1) Angka konflik bernuansa SARA, dengan capaian realisasi kinerja 100 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 99,42 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 3) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 97,38 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tujuan 5 : **“Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik”**

Dengan jumlah 2 sasaran dan 1 (satu) indikator tujuan dan 7 (tujuh) indikator sasaran yaitu :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 105,93 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 1) Indeks SPBE (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 92,5 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 2) Indeks Pemerintahan Digital (Indeks), tidak ada penilaian dari kemenpan RB.
- 3) Indeks Pelayanan Publik (Indeks), dengan capaian realisasi kinerja 98,89 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 4) Indeks Integritasi, dengan capaian realisasi kinerja 99,69 persen, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 5) Nilai SAKIP (kategori), dengan capaian realisasi kinerja B, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sedang**.
- 6) Opini BPK (opini), dengan capaian realisasi kinerja WTP, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.
- 7) Predikat Inovasi Daerah, dengan capaian realisasi kinerja sangat inovatif, dengan skala nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**.

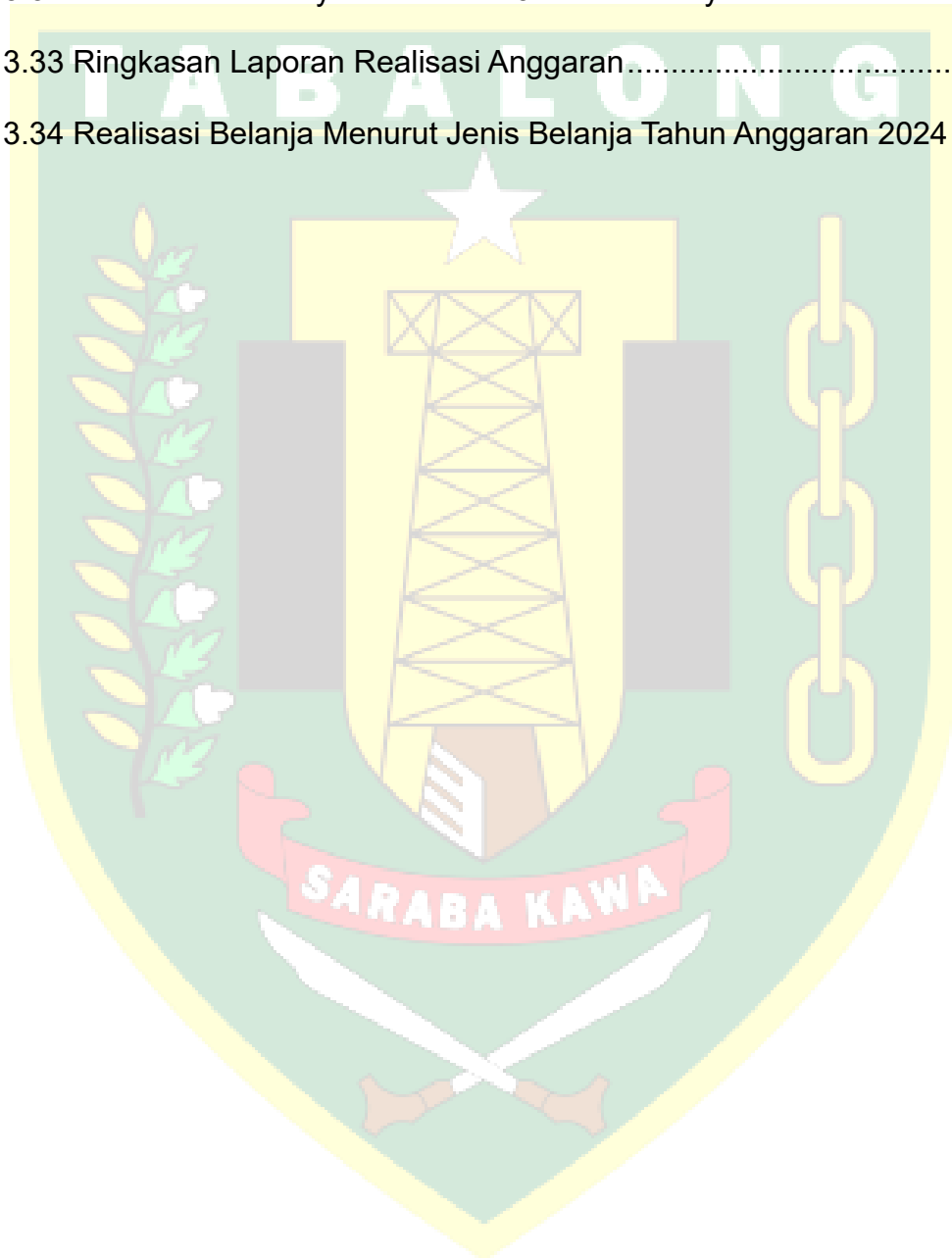
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35 indikator kinerja utama Bupati tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator tujuan dan 28 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 29 (Dua Puluh Sembilan) indikator kinerja yang ber kriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**, 3 (Tiga) indikator kinerja yang ber kriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Tinggi**, 1 (Satu) indikator kinerja yang ber kriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **sedang**, 0 indikator kinerja yang ber kriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Rendah**, 0 indikator kinerja yang ber kriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Rendah** dan 2 (Dua) indikator belum rilis, dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah per Kecamatan	5
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong	8
Tabel 1.3 Daftar Perangkat Daerah dan Unit Kerja	9
Tabel 1.4 Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong	12
Tabel 1.5 Capaian kinerja makro menggunakan indikator.....	28
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030.....	95
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong	98
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2025.....	101
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	104
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	105
Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Tujuan Dan Sasaran	110
Tabel 3.4 Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	111
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IPM Per Tahun Provinsi/Kabupaten	113
Tabel 3.6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	136
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan	138
Tabel 3.8 Menurunnya Tingkat Kemiskinan Dan Terkendalinya Ketimpangan	143
Tabel 3.9 Menurunnya tingkat pengangguran	154
Tabel 3.10 Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Produktif	159

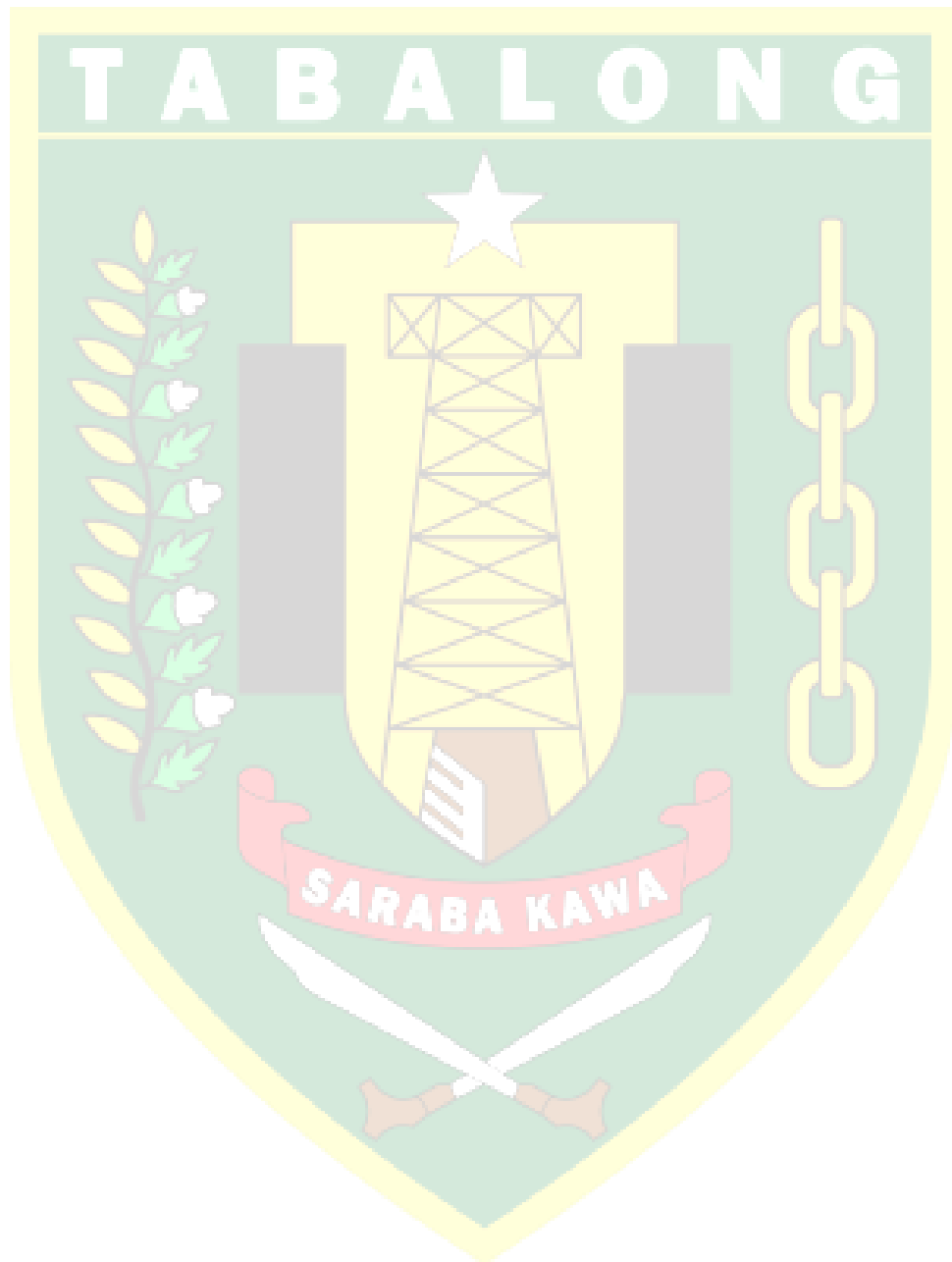
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun Per Tahun Provinsi/Kabupaten	161
Tabel 3.12 Berkembangnya Sektor Unggulan Daerah	165
Tabel 3.13 Meningkatnya Investasi Dan Kewirausahaan	188
Tabel 3.14 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah.....	193
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi/Kabupaten.....	195
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Per Tahun Provinsi/Kabupaten	200
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur	205
Tabel 3.18 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	207
Tabel 3.19 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim.....	211
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Penurunan Intensitas Emisi GRK.....	214
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB)	219
Tabel 3.22 Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama ..	223
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Angka konflik bernuansa SARA	230
Tabel 3.24 Meningkatnya Kemajuan Kebudayaan	232
Tabel 3.25 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	237
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG).....	239
Tabel 3.27 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	241
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	243

Tabel 3.29 Meningkatnya penerapan inovasi dalam Pembangunan	269
Tabel 3.30 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	275
Tabel 3.31 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025	277
Tabel 3.32 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan	280
Tabel 3.33 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	282
Tabel 3.34 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024	283



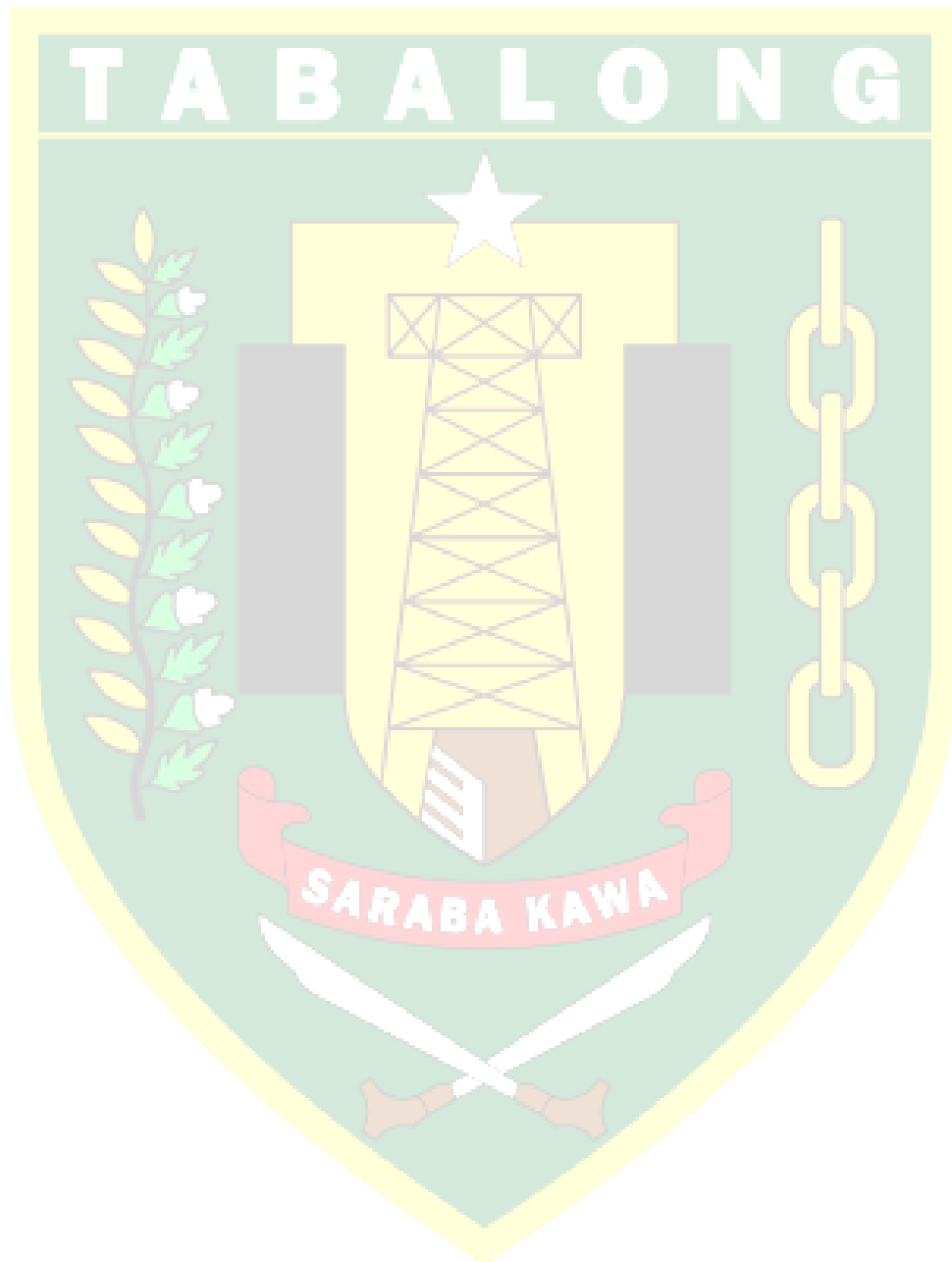
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Tabalong menurut..... 7



DAFTAR FOTO

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tabalong6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hadirnya dua regulasi ini akan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu / evaluasi kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Tabalong

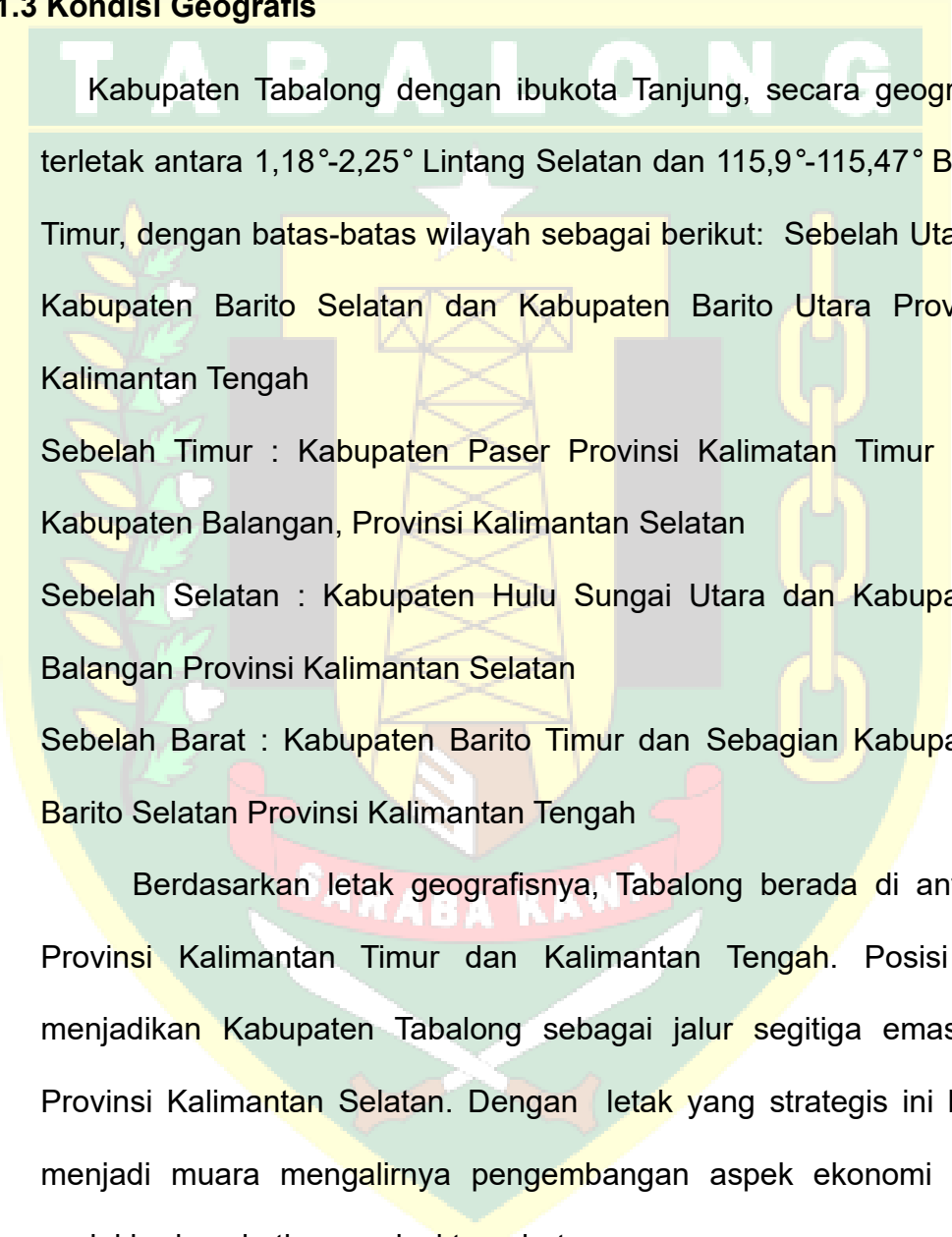
Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong adalah $\pm 3.946 \text{ Km}^2$ atau $\pm 394.600 \text{ Ha}$. Namun setelah dilakukan penataan batas dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan serta terakhir dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Batas Daerah dan Batas Indikatif Menurut Peta Rupa Bumi Indonesia antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, luas wilayah Kabupaten Tabalong berubah menjadi $\pm 3.553,421 \text{ Km}^2$ atau $\pm 355.342,1 \text{ Ha}$. Adapun luasan tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan

Selatan serta Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 1999. Kabupaten Tabalong terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa.

1.3 Kondisi Geografis



Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung, secara geografis terletak antara 1,18°-2,25° Lintang Selatan dan 115,9°-115,47° Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Barito Timur dan Sebagian Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan letak geografisnya, Tabalong berada di antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Posisi ini menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai jalur segitiga emas di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak yang strategis ini bisa menjadi muara mengalirnya pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga provinsi tersebut.

Tabalong terdiri dari 12 Kecamatan yaitu: Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro.

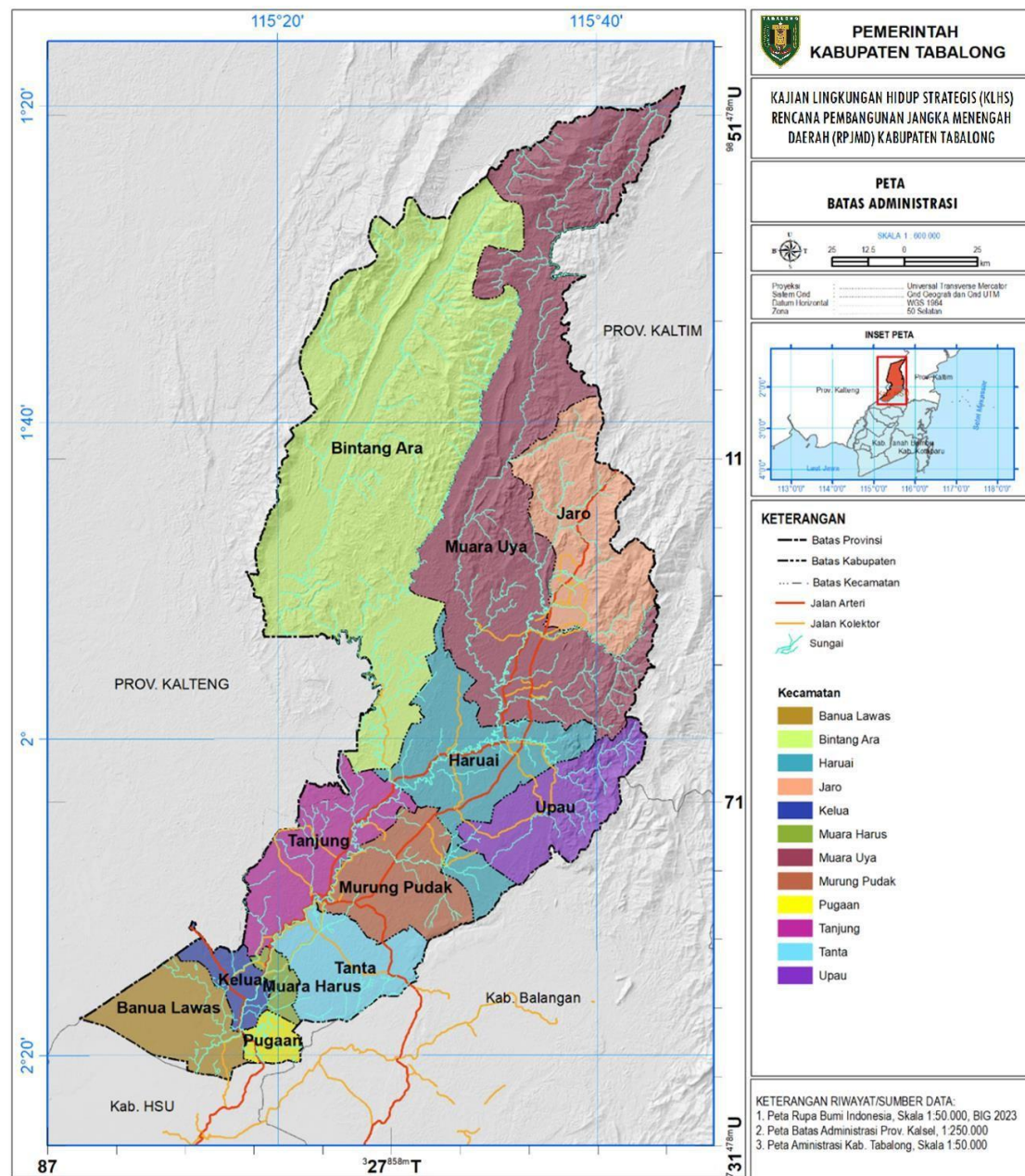
Tabel 1. 1 Luas Wilayah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1	Banua Lawas	150,86	4,25	0	15
2	Pugaan	31,87	0,90	0	7
3	Kelua	53,39	1,50	1	12
4	Muara Harus	26,78	0,75	0	7
5	Tanta	149,72	4,21	0	14
6	Tanjung	191,69	5,39	4	15
7	Murung Pudak	172,48	4,86	5	10
8	Haruai	271,97	7,65	0	13
9	Bintang Ara	1.170,19	32,93	0	9
10	Upau	183,01	5,15	0	6
11	Muara Uya	877,13	24,68	0	14
12	Jaro	274,26	7,72	0	9
	Jumlah	3.553,36	100	10	121

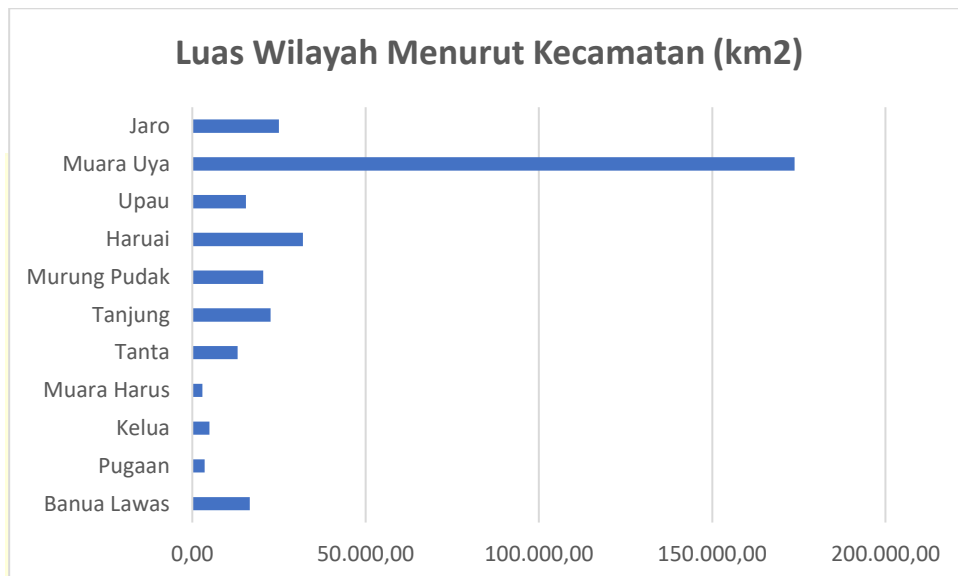
Sumber : Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2025



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tabalong



Grafik 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Tabalong menurut Kecamatan (km2)



Dalam proses pembangunan Kabupaten Tabalong, dikelompokkan dalam 3 wilayah, yaitu:

○ **Wilayah Utara**

Wilayah ini meliputi Kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro dengan pusat pengembangan di Kecamatan Muara Uya. Potensi wilayah ini adalah perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, daerah transmigrasi dan pariwisata.

○ **Wilayah Tengah**

Wilayah ini meliputi Kecamatan Tanta, Tanjung, Murung Pudak, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Tanjung, potensinya adalah perkebunan, pusat pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan & kebudayaan, pariwisata.

○ **Wilayah Selatan**

Wilayah ini meliputi kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Kelua. Potensi adalah: industri kerajinan rumah tangga purun dan pandai besi, pertanian tanaman pangan, peternakan unggas dan perikanan.

1.4 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebesar 271.216 jiwa dengan penyebaran penduduk Tabalong masih terkonsentrasi di Kecamatan Murung Pudak yakni sebesar 60.824 jiwa. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2021 s/d 2025

No.	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Banua Lawas	20.319	20.763	21.112	21.220	21.667
2.	Kelua	24.816	25.324	25.702	25.818	26.182
3.	Tanta	21.947	22.875	23.614	24.013	25.119
4.	Tanjung	36.472	37.059	37.367	37.577	38.146
5.	Haruai	23.829	24.366	24.486	24.567	24.889
6.	Murung Pudak	54.471	56.235	57.721	58.451	60.824
7.	Muara Uya	23.735	24.319	24.668	24.771	25.276

No.	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
8.	Muara Harus	7.007	7.138	7.188	7.209	7.343
9.	Pugaan	7.510	7.728	7.811	7.819	7.980
10.	Upau	7.400	7.664	7.752	7.776	7.960
11.	Jaro	15.228	15.676	15.731	15.835	16.071
12.	Bintang Ara	9.170	9.378	9.479	9.638	9.759
	Kab. Tabalong	251.904	258.525	262.631	264.694	271.216

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2025

1.5 Organisasi Perangkat Daerah

Tabel berikut menyajikan daftar perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di Kabupaten Tabalong beserta dasar hukum pembentukannya. Regulasi utama yang menjadi dasar penyusunan struktur ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tabel 1. 3 Daftar Perangkat Daerah dan Unit Kerja Kabupaten Tabalong Beserta Dasar Hukumnya

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja	Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2		3
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong		Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong		
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong		
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong		
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

No	Nama Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
	Kabupaten Tabalong	Perangkat Daerah
6.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
11.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
13.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	
15.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	
16.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	
20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	
22.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	
24.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	
26.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	
27.	RSUD H. Badaruddin Kasim	
28.	Kecamatan Tanjung	
29.	Kecamatan Murung Pudak	
30.	Kecamatan Kelua	
31.	Kecamatan Haruai	
32.	Kecamatan Banua Lawas	
33.	Kecamatan Muara Uya	
34.	Kecamatan Bintang Ara	
35.	Kecamatan Jaro	
36.	Kecamatan Upau	
37.	Kecamatan Tanta	

No	Nama Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
38.	Kecamatan Muara Harus	
39.	Kecamatan Pugaan	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, 2025

1.6 Kondisi Aparatur Sipil Negara

Data berikut menyajikan gambaran umum tentang jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan antara lain SD, SLTP, SLTA, D – I, D-II, D-III, D-IV, S1, S2, S3, Profesi dan Spesialis.

Secara keseluruhan, jumlah ASN di Kabupaten Tabalong mencapai 3.532 pegawai, yang terdiri dari 25 pegawai yang berlatar belakang pendidikan SD, 34 pegawai yang berlatar belakang pendidikan SLTP, 238 pegawai yang berlatar belakang pendidikan SLTA, 2 pegawai yang berlatar belakang pendidikan D-I, 36 pegawai yang berlatar belakang pendidikan D-II, 411 pegawai yang berlatar belakang pendidikan D-III, 84 pegawai yang berlatar belakang pendidikan D-IV, 2.237 pegawai yang berlatar belakang pendidikan S1, 336 pegawai yang berlatar belakang pendidikan S2, 6 pegawai yang berlatar belakang pendidikan S3, 103 pegawai yang berlatar belakang pendidikan Profesi dan 20 pegawai yang berlatar belakang pendidikan Spesialis. Dari data ini, terlihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan S-1 mendominasi jumlah ASN.

Tabel 1. 4 Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Pendidikan (2025)

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	25
2.	SLTP	34
3.	SLTA	238
4.	D-I	2
5.	D-II	36
6.	D-III	411
7.	D-IV	84
8.	S1	2.237
9.	S2	336
10.	S3	6
11.	PROFESI	103
12.	SPEKIALIS	20
TOTAL		3.532

Sumber : BKPSDM Kab.Tabalong, 2025 (diolah)

1.7 Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Tabalong dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Tabalong. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 - 2029 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal - hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Tabalong 2025-2029, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sebagai upaya menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, serta berkelanjutan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengakses layanan sosial yang berkualitas, serta mendapatkan peluang yang setara dalam dunia kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi masih terdapat tantangan yang menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Akses terhadap sumber daya ekonomi belum merata, menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kelompok masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup akibat minimnya akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pasar. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang tersedia menyebabkan program yang dijalankan belum mampu menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan.

Layanan kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Aksesibilitas terhadap layanan masih menjadi kendala, baik dari aspek cakupan maupun kualitas. Di beberapa wilayah, infrastruktur layanan sosial masih terbatas, sementara sinergi antarlembaga dalam penyediaan layanan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan perlindungan sosial, yang menyebabkan sebagian masyarakat belum mendapatkan manfaat secara maksimal.

Penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif menjadi faktor kunci dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ketersediaan lapangan kerja yang layak masih menjadi tantangan akibat terbatasnya investasi dan pengembangan sektor usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata juga berpengaruh pada daya serap tenaga kerja, terutama bagi kelompok usia produktif. Di sisi lain, dinamika pasar kerja yang terus berkembang menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih berdaya saing. Kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan daya serap di dunia industri, tetapi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan dunia usaha masih cukup tinggi.

Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penguatan ekosistem

ketenagakerjaan. Perluasan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek fundamental dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Penguatan sistem perlindungan sosial juga diperlukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat lebih terlindungi dan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup. Sinergi kebijakan antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan dalam memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab tantangan kesejahteraan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing untuk Mendukung Kemajuan Daerah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan daerah. Daya saing suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya dalam beradaptasi terhadap perubahan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kesehatan yang baik sebagai modal dasar produktivitas. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor bergantung pada kesiapan individu dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketersediaan akses pendidikan yang memadai menjadi faktor utama dalam membangun SDM berkualitas. Tingkat literasi yang

tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, kualitas layanan kesehatan yang optimal turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas individu. Upaya peningkatan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-haknya berkontribusi pada pembangunan generasi masa depan yang lebih berkualitas. Pemenuhan hak anak serta penguatan pola asuh berbasis keluarga menjadi aspek penting dalam membangun individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Pembangunan keluarga yang sejahtera juga menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur sosial yang mendukung kemajuan daerah. Pemberdayaan kepemudaan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kompetitif. Kesetaraan dan keadilan gender semakin relevan dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya penguatan kualitas SDM tidak terlepas dari kebutuhan akan sistem pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dunia kerja serta penguatan kebijakan yang mendorong penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan individu dan

komunitas. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Selain itu, pembangunan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan budaya local turut memperkuat identitas daerah dalam menghadapi tantangan global.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan mempercepat proses pembelajaran serta pengembangan keterampilan. Semua aspek ini menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang maju, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan serta peluang di masa depan dengan lebih baik.

3. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan yang Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Struktur ekonomi daerah mencerminkan dinamika berbagai sektor yang berkembang seiring dengan perubahan lingkungan global dan domestik. Keberlanjutan pertumbuhan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola potensi unggulan yang dimiliki serta memperkuat daya saing melalui

inovasi dan efisiensi. Setiap sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian perlu dikelola secara lebih optimal agar dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Daya tarik investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Kehadiran ekosistem usaha yang kondusif, kepastian regulasi, serta kesiapan infrastruktur ekonomi berperan dalam menciptakan lingkungan yang menarik bagi pelaku usaha dan investor. Sektor industri, baik skala besar maupun industri kecil dan menengah, membutuhkan penguatan dalam aspek produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi agar lebih kompetitif dan berkontribusi terhadap nilai tambah ekonomi daerah.

Keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dengan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Modernisasi sistem produksi, diversifikasi komoditas unggulan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Optimalisasi sumber daya lokal, peningkatan efisiensi usaha tani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan menjadi langkah strategis dalam menjadikan sektor ini lebih adaptif terhadap tantangan dan perubahan iklim.

Pariwisata sebagai sektor unggulan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara berkelanjutan dan inovatif. Pengembangan destinasi wisata yang lebih berdaya saing memerlukan sinergi antara infrastruktur pendukung, promosi yang efektif, serta penguatan daya tarik berbasis budaya dan kearifan lokal.

Sektor ini juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang mampu menciptakan nilai tambah serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal. Pengelolaan kawasan wisata yang berbasis keberlanjutan serta integrasi dengan ekosistem digital menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi sektor ini sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah. Sektor perdagangan memegang peran sentral dalam menghubungkan produksi dengan pasar yang lebih luas. Efisiensi distribusi, akses terhadap jaringan pemasaran, serta penguatan sistem logistik menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Digitalisasi dalam perdagangan semakin menjadi kebutuhan untuk meningkatkan jangkauan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan jejaring antar pelaku usaha menjadi langkah penting dalam mendorong daya saing sektor perdagangan daerah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang

mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap penguatan kapasitas UMKM, akses pembiayaan yang lebih inklusif, serta pendampingan dalam aspek manajerial dan pemasaran menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tahan sektor ini. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha, integrasi dengan ekosistem e-commerce, serta penguatan kolaborasi dengan sektor lain menjadi strategi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Penguatan ekonomi daerah juga memerlukan strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk unggulan melalui industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Optimalisasi pemanfaatan potensi industri kreatif, industri pengolahan, serta industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi langkah dalam meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara pusat riset dan inovasi, pelaku industri, serta pemerintah menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi yang berbasis pada keunggulan lokal.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga pada keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Prinsip ekonomi hijau, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan regulasi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam menjadi bagian dari strategi dalam memastikan

pembangunan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Transformasi ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan sektor unggulan memerlukan dukungan dari berbagai elemen, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penunjang, serta penerapan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Keberlanjutan pengembangan sektor-sektor unggulan tidak hanya menentukan daya saing daerah di tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang integrasi dengan pasar global yang lebih kompetitif.

4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan yang Berkeadilan

Pembangunan yang berkeadilan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh wilayah dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang lebih produktif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong konektivitas antarwilayah secara lebih optimal. Infrastruktur yang terbangun dengan baik berperan dalam membuka aksesibilitas, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor pembangunan.

Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sistem air bersih, memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Konektivitas yang baik mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat mobilitas penduduk, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Akses terhadap layanan dasar yang lebih baik juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga berkaitan erat dengan perumahan dan kawasan permukiman yang tertata dengan baik. Hunian yang layak dan berkualitas bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan permukiman, seperti akses jalan yang memadai, sistem drainase yang baik, serta fasilitas sanitasi yang memadai, menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Sistem pertanahan yang tertata dengan baik juga menjadi faktor strategis dalam pembangunan daerah. Kepastian dalam pengelolaan lahan berkontribusi terhadap stabilitas investasi, efisiensi tata ruang, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan. Penguatan kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan

menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penyelenggaraan sistem transportasi yang efisien mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik yang lebih lancar. Kualitas layanan transportasi publik yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan memperbaiki efisiensi transportasi. Integrasi antar moda, peningkatan infrastruktur perhubungan, serta penguatan sistem transportasi berbasis digital menjadi bagian dari strategi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih adaptif dan inklusif.

Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang memastikan ketersediaan sarana fisik, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penguatan infrastruktur berbasis keberlanjutan, inovasi dalam tata kelola pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Infrastruktur yang berkualitas dan merata tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari efektivitas tata kelola pemerintahan serta kualitas layanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan daerah. Kemampuan dalam mengelola administrasi kependudukan secara akurat, mengoptimalkan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik, serta mengembangkan sistem informasi yang terpadu menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola yang lebih modern dan inklusif.

Dalam konteks pembangunan daerah, peran desa sebagai entitas yang menopang perekonomian lokal semakin krusial. Penguatan daya saing desa tidak hanya bergantung pada peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan infrastruktur layanan dasar, sistem kelembagaan yang solid, serta akses terhadap inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola desa juga membuka peluang untuk mempercepat transformasi pelayanan, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal.

Perkembangan digitalisasi menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. Sistem pelayanan yang terintegrasi, kemudahan akses terhadap data yang valid, serta keamanan informasi yang terjamin menjadi faktor utama dalam menciptakan layanan publik yang lebih profesional dan efisien. Keandalan pengelolaan data dan informasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penguatan sistem informasi berbasis digital perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengamankan data secara profesional.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang efektif ditandai dengan sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan menjadi landasan dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tuntutan zaman. Peningkatan efektivitas regulasi, optimalisasi peran riset dalam perumusan kebijakan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola yang lebih inovatif.

Stabilitas dan keamanan wilayah juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pembangunan daerah. Lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi sangat bergantung pada efektivitas manajemen wilayah

serta ketahanan terhadap berbagai tantangan sosial. Penguatan kapasitas dalam menjaga stabilitas daerah, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas menjadi pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Optimalisasi sistem administrasi, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana untuk Menciptakan Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan

Keberlanjutan pembangunan daerah bergantung pada kualitas lingkungan hidup serta kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Lingkungan yang terjaga dengan baik menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat, produktif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi menjadi tantangan dalam mencegah degradasi lingkungan yang semakin meluas.

Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pencemaran menjadi

penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan. Degradasi ekosistem, menurunnya kualitas air dan udara, serta berkurangnya tutupan vegetasi berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana alam. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak serta penguatan regulasi lingkungan menjadi bagian dari strategi dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Ancaman bencana semakin meningkat akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan kondisi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kekeringan, serta bencana geologi lainnya memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana memerlukan sistem mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif agar risiko dapat diminimalkan. Penguatan infrastruktur berbasis ketahanan bencana serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen risiko menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh.

Keberlanjutan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menjaga keseimbangan ekologi serta ketangguhan dalam menghadapi bencana. Peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan, optimalisasi tata kelola sumber daya alam, serta penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana menjadi elemen utama dalam membangun wilayah yang lebih resilien dan berkelanjutan. Integrasi kebijakan lingkungan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan

menjadi langkah strategis dalam mewujudkan daerah yang lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan.

1.8 Capaian Kinerja Makro Atas Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Tahun 2025

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 1. 5 Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro

No	Indikator Kinerja Makro	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-5,49	Belum rilis
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,63-5,26	4,67%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,43-3,31	3,48%
4	Rasio Gini (Nilai)	0,270-0,280	Belum rilis
5	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	76,08-78,08	76,94
6	Inflasi (%)	74,00	79,88
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	74,00	79,88
8	Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%)	n/a	Belum rilis

Sumber : BPS Tabalong, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Tabalong merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik yang merupakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai program pembangunan atas dasar kondisi dan potensi daerah. Pendekatan lainnya adalah pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini.

2.2. Visi

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah:

**“MENUJU TABALONG SMaRT
(SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, DAN TERDEPAN)”**

Visi tersebut mengandung makna suatu keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius

yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama. Kabupaten Tabalong memiliki letak strategis yang sangat penting di Kalimantan Selatan, terutama dalam konteks perkembangan logistik regional dan dukungan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kabupaten Tabalong memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Letak geografis Tabalong yang berada di perbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadikannya sebagai simpul penting dalam jaringan distribusi regional. Melalui pengembangan infrastruktur jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan jalur logistik lintas Kalimantan, Tabalong menjadi pintu masuk utama arus barang dan jasa dari dan menuju Kalimantan Selatan. Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri, penguatan sektor transportasi darat, serta pengembangan fasilitas penunjang logistik seperti terminal barang dan pusat distribusi turut memperkuat fungsinya sebagai penopang utama sistem logistik regional. Dengan demikian, Tabalong tidak hanya berperan sebagai wilayah transit, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung posisi Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan secara menyeluruh.

Secara filosofis visi di atas dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. **Kabupaten Tabalong Sejahtera;** Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.
2. **Kabupaten Tabalong Maju;** Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
3. **Kabupaten Tabalong Religius;** Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.
4. **Kabupaten Tabalong Terdepan;** Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

2.3. Misi

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi

pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera; Misi ini merupakan

upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan

- d) Mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2. **Mendorong Kemajuan Daerah;** Misi ini melakukan berbagai

upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi **"Menuju Tabalong SMaRT"** (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

- a) Meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional;
- b) Membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari; dan
- d) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

3. **Mengembangkan Kehidupan yang Religius;** Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan

harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius, yaitu:

- a) Menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b) Meningkatkan kemajuan budaya khususnya budaya lokal; dan
- c) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan pembangunan pemuda.

4. **Menjadi Daerah yang Terdepan;** Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap

mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan, yaitu:

- a) Menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan b) Berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi juga menjawab permasalahan pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tabalong 2025-2029, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran:

- 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
- 1.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- 1.3 Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan
- 1.4: Menurunnya tingkat pengangguran
- 1.5: Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif

Tujuan 2 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah yang inklusif

Sasaran :

- 2.1. Berkembangnya sektor unggulan daerah
- 2.2. Meningkatkan investasi dan kewirausahaan

Tujuan 3: Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan

Sasaran :

- 3.1 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah
- 3.2 Meningkatnya kualitas pembangunan desa
- 3.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

Tujuan 4: Menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni

Sasaran :

- 4.1 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama
- 4.2 Meningkatnya kemajuan kebudayaan
- 4.3 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Tujuan 5: Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik :

5.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan bersih

5.2 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan

2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka strategi pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2025 sampai tahun 2029 adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

1. Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik.
2. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai.
3. Memperkaya kurikulum yang relevan dan berbasis kebutuhan.
4. Peningkatan akses dan inklusivitas pendidikan.
5. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
6. Penyediaan fasilitas Kesehatan yang memadai.
7. Program kesehatan preventif dan promotif.
8. Peningkatan akses layanan kesehatan.
9. Peningkatan kualitas obat dan alat kesehatan.
10. Penguatan kebijakan ekonomi yang pro masyarakat miskin
11. Peningkatan bantuan sosial yang melindungi.
12. Pemenuhan infrastruktur dasar terutama pada kantong-kantong kemiskinan.

13. Peningkatan efektivitas anggaran untuk program kemiskinan.
14. Penguatan monitoring dan evaluasi program kemiskinan.
15. Peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.
16. Peningkatan lapangan kerja dan investasi sektor produktif.
17. Peningkatan akses dan kesempatan kerja.
18. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inklusifitas kerja.
19. Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan
20. Penciptaan lapangan kerja dan upah yang layak.
21. Penguatan sektor pertanian dan pedesaan.
22. Penguatan UMKM dan kewirausahaan.
23. Perlindungan sosial dan jaminan Kesehatan.
24. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas di daerah terpencil.
25. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
26. Pengembangan sektor unggulan daerah.
27. Diversifikasi ekonomi.
28. Pengembangan pariwisata.
29. Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan sosial
30. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.
31. Peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan air minum.
32. Pemerataan akses air minum yang terjangkau
33. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
34. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal.
35. Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan

36. Perlindungan dan pemberdayaan petani serta pelaku usaha pangan
37. Penguatan cadangan dan keamanan pangan
38. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
39. Penguatan infrastruktur dan rantai pasok pertanian.
40. Pemberdayaan petani untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
41. Penguatan kemitraan dan investasi di sektor pertanian dan peternakan.
42. Penguatan kapasitas dan daya saing UKM dan Koperasi.
43. Kemudahan akses permodalan dan pembiayaan.
44. Peningkatan akses pasar dan digitalisasi.
45. Penguatan kelembagaan dan regulasi koperasi serta UKM.
46. Pengembangan kawasan industri dan sentra UKM.
47. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
48. Pelestarian dan penguatan budaya lokal.
49. Peningkatan daya saing ekonomi kreatif.
50. Penguatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
51. Penyusunan kebijakan berbasis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
52. Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.
53. Penguatan sektor riil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
54. Pengendalian inflasi dan stabilitas harga.

55. Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha.
56. Stabilitas fiskal dan keuangan daerah.
57. Peningkatan kesejahteraan dan daya beli Masyarakat.
58. Pengembangan sumber energi terbarukan.
59. Peningkatan sektor pertanian dan industri ramah lingkungan.
60. Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau.
61. Peningkatan daya saing produk lokal dan peningkatan akses pasar global.
62. Penguatan regulasi dan diplomasi ekonomi.

Misi 2 : Mendorong Kemajuan Daerah

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Optimalisasi anggaran dan pendanaan.
3. Penguatan tata kelola dan regulasi.
4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi.
5. Integrasi dengan pengembangan wilayah.
6. Peningkatan infrastruktur dan kualitas hunian.
7. Penguatan regulasi dan tata kelola perumahan.
8. Akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah.
9. Pengembangan kawasan hunian berbasis lingkungan
10. Penguatan kapasitas aparaturnya desa.
11. Peningkatan tata kelola keuangan desa.
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik desa.
13. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
14. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa.

15. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana desa.
16. Dukungan terhadap penguatan regulasi dan kebijakan lingkungan.
17. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

18. Peningkatan kesadaran dan partisipasi Masyarakat.

19. Pengelolaan sampah dan limbah yang berbasis ekonomi sirkular.

20. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

21. Penguatan ketahanan keluarga

22. Pemberdayaan ekonomi keluarga

23. Penguatan peran perempuan dalam pembangunan

24. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender

25. Pemberdayaan kelompok rentan

Misi 3 : Mengembangkan Kehidupan yang Religius

1. Memperkuat peranan forum kerukunan umat beragama (FKUB).
2. Integrasi nilai toleransi dalam pendidikan sebagai muatan local.
3. Peningkatan program dialog antar umat beragama.
4. Penguatan kerja sama lintas agama.
5. Pemanfaatan teknologi dan media dalam kampanye toleransi.
6. Peningkatan upaya preventif (pencegahan dini tindak kriminalitas).
7. Penegakan peraturan yang tegas dan adil.
8. Penerapan teknologi dalam pengawasan ketentraman dan ketertiban.

9. Peningkatan kerjasama program deradikalisasi dan pencegahan kejahatan berbasis ideologi.

10. Peningkatan kesadaran hukum

11. Transparansi dan akses informasi yang mudah

12. Penguatan peran tokoh masyarakat dan agama

13. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum

14. Pemberian insentif bagi masyarakat yang taat aturan

15. Promosi budaya kepatuhan sebagai identitas social

16. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Misi 4 : Menjadi Daerah yang Terdepan

1. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik

2. Penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan penegakan hukum

3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal

4. Peningkatan partisipasi publik dalam pemerintahan

5. Perluasan akses internet dan jaringan telekomunikasi yang merata dan berkualitas.

6. Digitalisasi layanan publik dan smart government.

7. Pengembangan pusat data dalam mendukung penguatan SDI.

8. Penguatan sumber daya manusia dan literasi digital.

9. Peningkatan ekosistem digital, inovasi dan riset teknologi.

10. Reformasi regulasi untuk mendukung transformasi digital.

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD, tetap tidak terlepas dan harus mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029.

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Arah Kebijakan

1. Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik serta sertifikasi profesi memenuhi untuk standar nasional.
2. Memberikan tunjangan dan insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.
3. Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan serta fasilitas sekolah terutama di daerah terpencil.
4. Menyediakan akses internet, komputer, dan perangkat teknologi lainnya untuk mendukung pembelajaran digital.
5. Menyediakan buku teks, alat peraga, dan bahan ajar yang berkualitas dan relevan.
6. Pengembangan Kurikulum yang berbasis kompetensi, pendidikan karakter dan keterampilan praktis.
7. Memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.

8. Menyediakan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
9. Mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau daerah terpencil.

10. Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi.

11. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif dan tunjangan yang lebih baik.

12. Memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

13. Meningkatkan semua fasilitas kesehatan memiliki peralatan medis yang lengkap dan memadai.

14. Membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk menjangkau seluruh masyarakat.

15. Menggunakan teknologi modern seperti telemedicine untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.

16. Meningkatkan penyuluhan, imunisasi, vaksinasi dan skrining kesehatan berkala untuk deteksi dini penyakit.

17. Meningkatkan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat

18. Meningkatkan cakupan BPJS Kesehatan, layanan kesehatan gratis dan klinik keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

19. Menjaga ketersediaan obat-obatan berkualitas di semua fasilitas Kesehatan.

20. Menyediakan alat kesehatan modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan.

21. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.

22. Memberikan insentif dan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan pasar.

23. Memperluas implementasi program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dari kalangan miskin.

24. Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis;

25. Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat;

26. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan;

27. Memperkuat sistem jaring pengaman sosial, bantuan pangan atau bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin, lansia dan disabilitas.

28. Memperluas cakupan asuransi kesehatan untuk

melindungi keluarga miskin dari beban biaya kesehatan yang tinggi.

29. Membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi, akses air bersih dan sanitasi layak serta akses listrik dan energi yang terjangkau.

30. Menyusun kebijakan anggaran yang berfokus pada program pengentasan kemiskinan

31. Meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

32. Melibatkan masyarakat miskin dalam proses penentuan kebijakan.

33. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan audit penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan secara berkala.

34. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan ketenagakerjaan.

35. Pelatihan digital bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing global.

36. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

37. Mengembangkan industri kreatif dan ekonomi digital berbasis daerah.

38. Optimalisasi bursa kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan.

39. Meningkatkan mobilitas dan akses tenaga kerja ke pasar kerja.

40. Pemberdayaan UMKM dan wirausaha mandiri

41. Dukungan bagi Pekerja Rentan dan Difabel.

42. Meningkatkan akses Pendidikan yang merata disemua wilayah.

43. Menyediakan pelatihan vokasional dan keterampilan teknis bagi kelompok berpenghasilan rendah.

44. Mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja, seperti pertanian, manufaktur, dan UMKM.

45. Menetapkan upah minimum yang layak untuk memastikan pekerja menerima penghasilan yang memadai.

46. Memberikan subsidi, akses teknologi pertanian, dan pasar yang adil untuk meningkatkan pendapatan petani.

47. Mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di pedesaan.

48. Mempermudah akses permodalan, pelatihan dan pendampingan serta penggunaan teknologi dan inovasi.

49. Memperluas cakupan program jaminan sosial, bantuan langsung tunai dan layanan kesehatan berkualitas dan

terjangkau.

50. Membangun infrastruktur dasar dan memperluas jangkauan akses internet dan teknologi digital ke daerah terpencil.

51. Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kemudahan berusaha.

52. Mengidentifikasi dan mengembangkan sektorsektor ekonomi yang memiliki potensi unggul di daerah.

53. Pengembangan sektor non-tradisional untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif.

54. Mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan serta mempromosikan budaya dan produk lokal.

55. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas serta kualitas tenaga layanan sosial.

56. Mengembangkan layanan sosial berbasis teknologi digital untuk mempercepat akses informasi dan pelayanan.

57. Optimalisasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

58. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak sosial dan layanan yang tersedia.

59. Mendorong keterlibatan sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam membantu sesama melalui program

gotong royong dan filantropi.

60. Peningkatan kapasitas produksi air bersih.

61. Membangun dan memperluas jaringan perpipaan.

62. Melakukan konservasi sumber air baku dan memanfaatkan teknologi pengolahan air yang efisien dan ramah lingkungan.

63. Pemasangan sambungan rumah gratis dan tarif khusus atau subsidi bagi keluarga miskin.

64. Mengembangkan program air minum yang dikelola oleh masyarakat (PAMSIMAS).

65. Meningkatkan Sarpras/infrastruktur pertanian dan perkebunan

66. Mengembangkan varietas unggul dan pemanfaatan teknologi pertanian.

67. Mengembangkan pangan lokal (Diversifikasi sumber pangan).

68. Memperkuat sistem logistik dan rantai pasok pangan.

69. Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan.

70. Memberi kemudahan akses pembiayaan poktan dan asuransi pertanian.

71. Penguatan kelembagaan petani dan UMKM pangan serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui skema inti-plasma.

72. Pembangunan lumbung pangan daerah.

73. Pemetaan daerah rawan pangan dan penyusunan strategi mitigasi potensi risiko krisis pangan.

74. Diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.

75. Menerapkan penggunaan teknologi pertanian modern, benih unggul dan pupuk berkualitas ramah lingkungan.

76. Pengelolaan air dan irigasi yang efektif.

77. Mengembangkan infrastruktur pertanian modern.

78. Meningkatkan digitalisasi pasar pertanian.

79. Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.

80. Peningkatan kapasitas petani dan mendorong regenerasi petani muda melalui program petani milenial.

81. Subsidi benih dan pupuk bagi petani kecil.

82. Mengembangkan pertanian terpadu dengan konsep zero waste agriculture dan agroforestry.

83. Mendorong kemitraan dengan swasta dan industri di sektor pertanian dan peternakan

84. Pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata).

85. Pengembangan kualitas produk dan inovasi.

86. Peningkatan keterampilan SDM.

87. Mempermudah akses permodalan dan memberikan insentif atau subsidi bunga bagi UKM dan koperasi.

88. Mendorong koperasi simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UKM.

89. Penguatan skema kemitraan dan investasi.

90. Mengembangkan jaringan pemasaran.

91. Digitalisasi dan transformasi bisnis

92. Mendorong koperasi untuk menerapkan tata kelola yang profesional dan transparan.

93. Penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UKM dan koperasi.

94. Membangun dan memperluas kawasan industri kecil berbasis potensi lokal.

95. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi rantai pasok bahan baku dan distribusi.

96. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata.

97. Penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan.

98. Meningkatkan pengembangan dan promosi kebudayaan local.

99. Menerapkan sistem digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya local.

100. Mengembangkan industri kreatif berbasis kearifan lokal.

101. Mengembangkan marketplace digital untuk produk ekonomi kreatif lokal.

102. Meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pariwisata.

103. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga terkait dan komunitas lokal dalam riset dan inovasi pengembangan pariwisata.

104. Penyusunan regulasi yang mendukung investasi di sektor pariwisata.

105. Pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat perkembangan pariwisata.

106. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri, dan jasa.

107. Mengembangkan kawasan ekonomi baru.

108. Mengembangkan kawasan peternakan, perikanan, dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

109. Penguatan ketersediaan dan distribusi pangan pokok.

110. Pengawasan harga dan operasi pasar.

111. Mengintensifkan kegiatan promosi investasi untuk menarik minat investor.

112. Memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi investor.

113. Mendorong skema kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM.

114. Meningkatkan penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli

Daerah) dengan kebijakan pajak yang efektif.

115. Mendorong peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam dalam mendukung akses permodalan.

116. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis industri dan digitalisasi.

117. Mendorong inovasi usaha berbasis ekonomi kreatif dan digital

118. Mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Tenaga Air, dan Bioenergy.

119. Memperluas pemanfaatan panel surya di fasilitas publik dan perkantoran pemerintah.

120. Memperkuat pertanian berkelanjutan.

121. Meningkatkan industri hijau dan ekonomi sirkular

122. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan.

123. Mengembangkan ekonomi hijau berbasis komunitas.

124. Mengembangkan produk unggulan daerah dan industri kreatif untuk ekspor.

125. Meningkatkan promosi produk dan jasa domestik di pasar global.

126. Menyelaraskan kebijakan daerah dengan perdagangan global.

127. Mengembangkan strategi branding daerah sebagai pusat investasi dan perdagangan global

Misi 2. Mendorong Kemajuan Daerah

Arah Kebijakan

1. Membangun jalan dan jembatan baru antar kecamatan/desa, dan kawasan ekonomi strategis untuk mengurangi keterisolasian.
2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk memperpanjang usia penggunaan.
3. Mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak agar tidak semakin parah.
4. Meningkatkan optimalisasi sumber dana untuk proyek jalan.
5. Menggandeng sektor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembiayaan infrastruktur jalan.
6. Menyusun prioritas pembangunan transportasi berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan geografis.
7. Meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengerjaan proyek jalan/jembatan untuk memastikan kualitas yang baik
8. Menggunakan teknologi Geographical Information System (GIS) untuk monitoring dan pemeliharaan jalan.
9. Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan

mobilitas.

10. Merencanakan akses jalan yang mendukung kawasan industri, pariwisata, pertanian, dan pusat perdagangan serta yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar seperti pasar, sekolah dan layanan kesehatan.

11. Memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

12. Mendorong pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR melalui program pemerintah seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

13. Penyediaan akses air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian.

14. Menetapkan regulasi penerapan standar perumahan layak.

15. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konstruksi rumah yang aman dan berstandar.

16. Meningkatkan pengendalian kawasan kumuh melalui regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur.

17. Menyediakan program pendampingan bagi warga di permukiman kumuh.

18. Mendorong legalitas kepemilikan tanah dan rumah melalui percepatan sertifikasi tanah.

19. Mempermudah akses masyarakat terhadap KPR bersubsidi dengan suku bunga rendah dan cicilan terjangkau.

20. Memberikan bantuan kepada masyarakat (BSPS) untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara mandiri.

21. Mendorong pembangunan kawasan hunian berkonsep smart dan green housing.

22. Menyiapkan konektivitas dan akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan perumahan.

23. Mendorong pembentukan kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hunian.

24. Pelatihan dan Pengembangan SDM (kepala desa, perangkat desa, Anggota BPD dan aparat lainnya).

25. Menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi (e-Government Desa).

26. Menetapkan standar kompetensi bagi perangkat desa.

27. Transparansi dan akuntabilitas dana desa yang dapat diakses masyarakat.

28. Mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih profesional.

29. Meningkatkan kompetensi pengelola anggaran keuangan desa.

30. Menyediakan tenaga pendamping profesional untuk

membantu desa dalam pengelolaan anggaran dan program Pembangunan.

31. Mengembangkan layanan administrasi pelayanan secara online dan terintegrasi dengan sistem nasional.

32. Menerapkan standar pelayanan minimal.

33. Memperkuat peran organisasi desa dan semua elemen masyarakat, dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

34. Mendorong desa untuk menerapkan konsep desa pintar (smart village).

35. Memanfaatkan platform digital sebagai sarana informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan Masyarakat.

36. Membangun dan memperbaiki infrastruktur desa, sarana dan prasarana desa lainnya.

37. Mengoptimalkan peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup.

38. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.

39. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah sehingga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan.

40. Mendorong perlindungan kawasan hutan dan ekosistem alami.

41. Mendorong penggunaan air secara bijak, pengembangan energi terbarukan.

42. Melaksanakan kordinasi dan dukungan program perbaikan lahan yang mengalami degradasi akibat deforestasi, pertambangan, atau pertanian yang tidak ramah lingkungan

43. Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup melalui kampanye pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

44. Menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan.

45. Membangun fasilitas pengolahan sampah modern, termasuk bank sampah.

46. Mendorong pelaku industri memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar lingkungan.

47. Mendorong industri dan transportasi untuk menggunakan teknologi rendah emisi dan energi bersih.

48. Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lingkungan.

49. Mendorong urban forestry, taman kota, serta penghijauan lahan pertanian untuk meningkatkan daya serap karbon.

50. Meningkatkan program pendidikan pranikah, pengasuhan anak, dan manajemen konflik dalam keluarga.

51. Memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak.

52. Mengembangkan program perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan dini, serta meningkatkan layanan kesejahteraan lansia.

53. Memberikan pelatihan dan akses permodalan bagi keluarga, khususnya Perempuan.

54. Mendorong kebijakan cuti melahirkan, ruang laktasi, dan fleksibilitas kerja bagi ibu bekerja.

55. Menyediakan bantuan bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.

56. Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi.

57. Meningkatkan akses kesetaraan dalam pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional bagi perempuan.

58. Mendorong kepemimpinan perempuan di sektor publik dan swasta.

59. Mengembangkan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender.

60. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.

61. Memperkuat regulasi dan sanksi terhadap pelaku

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

62. Menyediakan infrastruktur ramah disabilitas.

63. Mendorong sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan dukungan tenaga pengajar dan fasilitas yang memadai.

Misi 3 : Mengembangkan Kehidupan yang Religius

Arah Kebijakan

1. Mengaktifkan dan meningkatkan peran FKUB untuk menyelesaikan konflik antarumat beragama secara damai dan mendorong dialog.
2. Mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan lembaga pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan penyuluh agama dengan metode pengajaran yang inklusif dan mendorong harmoni.
4. Menggalang kerja sama antarumat beragama dalam isu-isu sosial seperti lingkungan, kemiskinan, dan pendidikan.
5. Mengadakan acara kebudayaan bersama, seperti festival seni atau bazar.
6. Mengadakan bakti sosial, donor darah, atau kegiatan kebersihan lingkungan yang melibatkan semua agama.
7. Membangun jaringan pemuda lintas agama untuk

mempromosikan toleransi dan mengurangi stereotip negatif.

8. Mengembangkan konten digital seperti video, artikel, dan infografis yang mempromosikan toleransi dan kerukunan.

9. Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dan kampanye antikriminalitas serta sosialisasi kebijakan keamanan.

10. Meningkatkan keamanan publik dengan menempatkan CCTV di titik rawan gangguan tramtibum dan optimalisasi peran Satpol PP dan Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan.

11. Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan memperkuat koordinasi dengan APH untuk penegakan peraturan yang cepat dan transparan.

12. Optimalisasi aplikasi layanan pengaduan masyarakat berbasis online untuk laporan cepat gangguan tramtibum.

13. Meningkatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menangkal paham yang dapat memicu kriminalitas.

14. Meningkatkan kampanye publik tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan di berbagai sektor (lalu lintas, pajak, lingkungan, dll).

15. Penyediaan layanan informasi online dan hotline untuk konsultasi terkait peraturan.

16. Meningkatkan pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan pentingnya kepatuhan hukum melalui ceramah dan kegiatan sosial.

17. Meningkatkan pemberdayaan komunitas untuk menjadi agen perubahan dalam menegakkan aturan di lingkungan sekitar.

18. Meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk bersikap tegas tetapi tetap humanis.

19. Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait dalam menindak pelanggaran.

20. Penghargaan bagi warga yang taat pajak, lalu lintas, dan peraturan lingkungan.

21. Mengasosiasikan kepatuhan sebagai bagian dari kebanggaan sosial dengan menetapkan identitas seperti “Kampung Tertib” atau “Zona Patuh” di tingkat RT/RW/Desa sebagai contoh kawasan yang taat hukum.

22. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi serta kesetaraan upah.

Misi 4: Menjadi Daerah yang Terdepan

Arah Kebijakan

1. Penguatan digitalisasi layanan publik.

2. Meningkatkan keterbukaan data dan akuntabilitas terkait kebijakan daerah anggaran.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan internal dan mendorong peran media dalam transparansi kebijakan.
4. Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk laporan penyimpangan.
5. Reformasi birokrasi yang berintegritas melalui penerapan sistem meritokrasi dan kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik secara berkala sesuai aturan yang berlaku.
6. Penyederhanaan birokrasi dan regulasi.
7. Meningkatkan profesionalisme ASN dan pengembangan kompetensi.
8. Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam audit keuangan dan kinerja instansi.
9. Meningkatkan sinergi antara BPK, KPK, dan aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan wewenang.
10. Meningkatkan efektifitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.
11. Kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan dunia usaha dalam monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
12. Mengoptimalkan sistem survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah secara berkala.

13. Penyediaan Wi-Fi gratis di fasilitas publik seperti sekolah, kantor desa, dan ruang terbuka hijau.

14. Memperkuat implementasi e-Government untuk mempercepat layanan publik dan administrasi pemerintahan.

15. Memperkuat penerapan Satu data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan.

16. Menyiapkan dan membangun pusat data terintegrasi untuk mengoptimalkan manajemen informasi antar instansi.

17. Memperkuat cybersecurity untuk mencegah serangan siber dan kebocoran data.

18. Mengintegrasikan kurikulum berbasis digital di sekolah.

19. Meningkatkan pelatihan bagi UMKM dan pekerja agar dapat memanfaatkan teknologi dalam operasional bisnis

20. Meningkatkan program sertifikasi dan pelatihan digital bagi ASN untuk meningkatkan layanan publik berbasis teknologi.

21. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang keamanan data pribadi, hoaks, dan etika penggunaan internet.

22. Mendorong budaya digital yang produktif dan inovatif di lingkungan Masyarakat.

23. Meningkatkan program pendampingan bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital (ecommerce, fintech, dll).

24. Memperkuat digitalisasi sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

25. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan dan implementasi teknologi digital.

26. Menyusun regulasi yang fleksibel untuk mendukung percepatan penerapan teknologi digital.

27. Menjadikan transformasi digital sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

2.6. Program Prioritas Daerah

Program prioritas ini merupakan program politik tahun 2025-2029 yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komitmen ini mencerminkan program utama yang diharapkan mampu mengkreasi lompatan kemajuan dengan mewujudkan dan mengawal lokomotif pembangunan ekonomi daerah untuk membangun Tabalong yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Menuju Tabalong SMaRT.

Harapannya, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar tinggi, melainkan juga berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan: 1). Pertumbuhan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan 2). Ketersediaan

akses hasil pembangunan.

Program politik ini akan terdistribusi dan berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi jangka menengah daerah sebagai berikut:

A. Upaya pencapaian Misi I Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- 4) Mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Tabalong yang sejahtera diperlukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Tabalong. Program ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan mutu pendidikan, penyediaan lapangan kerja

melalui pengembangan UMKM dan sektor agribisnis, serta perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sehari-hari. Selain itu, dukungan terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan komunitas lokal menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdayasaing.

Program ini bertujuan menciptakan Tabalong yang lebih sehat, terdidik, dan produktif demi masa depan yang lebih cerah, melalui pemenuhan;

a) Akses Kesehatan: Memperluas dan meningkatkan serta membenahi kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit dan Puskesmas, termasuk membangun dan mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik di seluruh kecamatan dan desa. Program kesehatan preventif, seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting. Upaya mewujudkan Tabalong Pasti Sehat, diantaranya dengan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta mencapai 100% dan bantuan biaya bagi pendamping pasien serta layanan kesehatan langsung ke rumah untuk lansia, disabilitas dan penderita stroke ringan. Prinsip utama dari UHC adalah memberikan layanan kesehatan yang adil, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang, terutama dari kalangan yang kurang mampu di semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (RSUD dan Puskesmas).

b) Pendidikan Berkualitas: Menyediakan akses yang merata ke

pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, termasuk meningkatkan fasilitas sekolah, kualitas guru, dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Program beasiswa dan pendidikan vokasi juga diperluas untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan lanjutan. Penyediaan 1.000 beasiswa bagi pemuda pemudi Tabalong bisa kuliah, memastikan tidak ada yang terhalang biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

- c) Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pengembangan SDM yang kompeten dan terampil adalah kunci untuk mendukung kemajuan daerah, melalui peningkatan grade Balai Latihan Kerja untuk mendukung terwujudnya 15.000 tenaga kerja terampil.
- d) Program Beasiswa dan Pendidikan Vokasi: Menyediakan beasiswa untuk pendidikan lanjutan serta program pendidikan vokasi yang fokus pada keterampilan teknis yang dibutuhkan di industri-industri yang berkembang di Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan memberikan beasiswa bagi 1.000 orang pemuda/pemudi agar bisa melanjutkan kuliah.
- e) Program Kesehatan dan Gizi: Meningkatkan program kesehatan dan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kondisi fisik dan mental yang optimal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

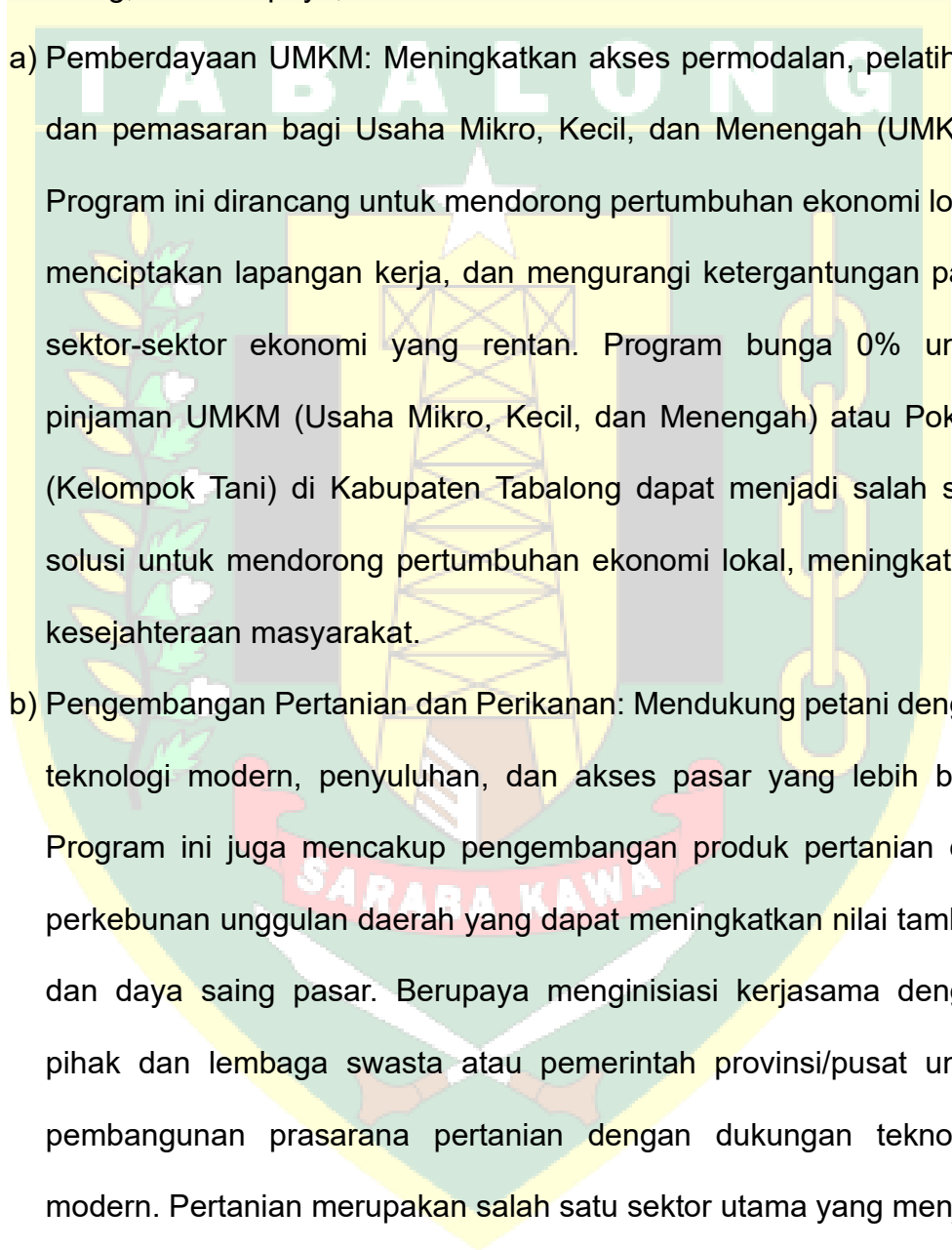
f) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Meningkatkan program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan bagi lansia, difabel, dan keluarga kurang mampu serta jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Program ini diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi. Meningkatkan pemberian jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja rentan/nonformal lainnya termasuk ketua RT/RW, pelaku UMKM, kader dan tokoh agama/masyarakat serta perangkat desa dan LKD.

2. Penguatan Ekonomi Lokal

Upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat daerah. Fokusnya terletak pada pemberdayaan potensi lokal, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengembangan sektor unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Langkah ini juga mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, akses pembiayaan, digitalisasi ekonomi, dan perluasan jaringan pasar, baik lokal maupun global. Dengan penguatan ekonomi lokal, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Tujuan Penguatan Ekonomi Lokal adalah menciptakan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi terutama di Kabupaten Tabalong melalui optimalisasi potensi lokal. Selain itu, penguatan ekonomi lokal juga

bertujuan membangun ekosistem ekonomi inklusif yang mampu mendorong inovasi, memanfaatkan teknologi, dan mendukung pembangunan yang adil serta merata di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong, melalui upaya;

- 
- a) Pemberdayaan UMKM: Meningkatkan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan. Program bunga 0% untuk pinjaman UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau Poktan (Kelompok Tani) di Kabupaten Tabalong dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Pengembangan Pertanian dan Perikanan: Mendukung petani dengan teknologi modern, penyuluhan, dan akses pasar yang lebih baik. Program ini juga mencakup pengembangan produk pertanian dan perkebunan unggulan daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing pasar. Berupaya menginisiasi kerjasama dengan pihak dan lembaga swasta atau pemerintah provinsi/pusat untuk pembangunan prasarana pertanian dengan dukungan teknologi modern. Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Tabalong. Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, dua hal yang tidak boleh diabaikan adalah jalan produksi dan sarana prasarana

(Sarpras), termasuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta sarana produksi pertanian (Saprodi). Kedua elemen ini memegang peran krusial dalam menciptakan sistem pertanian yang efisien, modern, dan berkelanjutan.

c) **Infrastruktur Ekonomi:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas penunjang lainnya. Ini penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pengembangan Jalan Produksi pada sentra pertanian dan perkebunan untuk memudahkan distribusi hasil panen. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata dan percepatan pengembangan kawasan industri (KI) Seradang.

3. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan.

Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari upaya menjadikannya daerah terdepan yang dikenal secara luas. Dengan kekayaan alam, sejarah, dan tradisi yang dimiliki, Tabalong berpotensi menjadi destinasi unggulan yang memadukan keindahan alam dan keunikan budaya lokal.

Pemerintah daerah berfokus pada pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan, pengembangan infrastruktur penunjang, serta promosi terpadu yang mengangkat keunikan daerah. Festival kebudayaan, pelestarian seni tradisional, dan pemberdayaan komunitas lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat

identitas Tabalong sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya.

Melalui kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, pengembangan sektor pariwisata ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat posisi Tabalong sebagai daerah yang maju, ramah, dan mampu bersaing di tingkat global.

- a) Pengembangan dan Promosi Pariwisata: Mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata unggulan di Tabalong, seperti wisata alam, budaya, dan religi, yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional.
- b) Penyelenggaraan Event Wisata: Mengadakan event wisata tahunan yang melibatkan budaya lokal dan daya tarik wisata untuk menarik pengunjung dan meningkatkan profil daerah.
- c) Promosi Digital dan Kampanye Pariwisata: Menggunakan media digital dan kampanye online untuk mempromosikan Tabalong sebagai destinasi wisata, serta menarik minat wisatawan global.
- d) Pengembangan Industri Kreatif: Mendorong industri kreatif lokal seperti seni, kerajinan tangan, kuliner, dan produk budaya lainnya untuk menjadi bagian integral dari ekonomi daerah. Dukungan terhadap industri kreatif dapat meningkatkan daya tarik daerah dan menciptakan peluang ekonomi baru.

4. Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Perlindungan dan pemberdayaan sosial adalah upaya terpadu untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan memberdayakan

mereka agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan sosial mencakup berbagai program seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial untuk membantu kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

Sementara itu, pemberdayaan sosial berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sinergi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan berdaya tahan terhadap berbagai kerentanan sosial dan tantangan kehidupan, dengan berbagai upaya antara lain;

- a) Perumahan Layak: Program pembangunan dan rehabilitasi perumahan untuk keluarga kurang mampu, termasuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
- b) Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Memperkuat program jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai, asuransi kesehatan, dan program keluarga harapan (PKH) untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
- c) Pemberdayaan Komunitas: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program

pemberdayaan komunitas. Ini termasuk pelatihan keterampilan, dukungan untuk inisiatif lokal, dan penguatan organisasi masyarakat sipil.

B. Upaya pencapaian Misi II Mendorong Kemajuan Daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional;
- 2) Membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari; dan
- 4) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Dalam upaya mendorong kemajuan daerah di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur adalah upaya strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan. Fokusnya mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, fasilitas transportasi, jaringan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur digital yang mendukung konektivitas wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Tabalong.

Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat mobilitas dan akses layanan, tetapi juga membuka peluang investasi dan meningkatkan daya saing wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, melalui;

- a) **Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan:** Membangun dan memperbaiki jalan-jalan utama serta jalan penghubung di seluruh wilayah Tabalong untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang baik juga mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui program prioritas Jalan dan Jembatan Mantap yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki seluruh jalan dan jembatan dengan dukungan PSU, rambu dan marka jalan di Kabupaten Tabalong sehingga tidak ada lagi akses yang terputus.
- b) **Pengembangan Fasilitas Publik:** Membangun fasilitas publik yang modern dan memadai seperti terminal, pasar, rumah sakit, dan sekolah. Fasilitas ini penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dan memberikan layanan yang lebih baik, termasuk dukungan pengembangan bandara, penyediaan angkutan gratis bagi pelajar dan masyarakat di daerah terpencil.
- c) **Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang baik dengan membangun sistem

distribusi air yang lebih efisien serta meningkatkan layanan pengelolaan limbah.

2. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi.

Pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global dan mendorong transformasi di berbagai sektor di Kabupaten Tabalong. Teknologi mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru, sementara inovasi menghadirkan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data, masyarakat dan organisasi dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas layanan. Inovasi juga mendorong terciptanya produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sinergi antara teknologi dan inovasi memungkinkan terciptanya ekosistem yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan dengan upaya;

- a) Digitalisasi Layanan Publik: Mengimplementasikan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Ini termasuk e-government, layanan online untuk perizinan, pembayaran, dan pengaduan masyarakat.
- b) Pengembangan Infrastruktur Digital: Membangun infrastruktur digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data, untuk mendukung layanan pemerintah, bisnis, dan pendidikan yang lebih modern dan efisien.

c) Pengembangan Smart City: Mengembangkan konsep kota pintar (Smart City) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan kota, dari transportasi hingga manajemen sumber daya alam.

d) Inovasi Pertanian dan Industri: Mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian dan industri untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing di pasar.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah adalah upaya untuk memperkuat kapasitas sebuah daerah atau negara dalam bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan pengembangan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan berusaha, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Fokus utama terletak pada inovasi, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, jasa dan sektor unggulan lain sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Tabalong. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung kewirausahaan, serta mengintegrasikan pasar lokal dengan rantai nilai global, daya saing ekonomi dapat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan cara;

a) Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Ini termasuk program pengembangan produk unggulan daerah yang dapat dipasarkan lebih luas.

- b) Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi: Program pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan kapasitas mereka dan mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri.
- c) Dukungan bagi UMKM: Memberikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan tanpa bunga dan biaya administrasi lainnya, pelatihan, serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang penting untuk diperkuat.
- d) Investasi dan Kerjasama: Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan iklim usaha yang kondusif, regulasi yang mendukung, serta fasilitas yang memadai. Selain itu, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan lembaga internasional, untuk mempercepat pembangunan.
- e) Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi: Membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur pendukung, seperti sarana dan prasarana transportasi, kawasan industri, dan fasilitas logistik untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, terutama memperkuat pengembangan KI Seradang.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi saat ini dan mendatang. Langkah ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah

yang bertanggung jawab, serta pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim. Partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung program-program pelestarian seperti reboisasi, konservasi kawasan lindung, dan penggunaan energi terbarukan. Dengan menjaga harmoni antara aktivitas manusia dan alam, pelestarian lingkungan hidup menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan dan berkualitas, melalui upaya;

- a) Program Lingkungan Bersih dan Hijau: Mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan jangka panjang.
- b) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi: Mengembangkan pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan untuk memastikan ketahanan pangan dan energi di masa depan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Tabalong berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam aspek ekonomi, Kabupaten Tabalong mendorong sektor unggulan seperti pertanian, energi terbarukan, dan industri kreatif untuk menciptakan

lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi sosial, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan melalui program yang inklusif dan berbasis masyarakat. Kabupaten Tabalong juga memprioritaskan pelestarian lingkungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan, serta pengurangan emisi karbon untuk mendukung agenda global melawan perubahan iklim. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan mitra pembangunan, Tabalong bertujuan menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing, sekaligus menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan demi generasi mendatang. Upaya yang dilakukan antara lain;

- a) Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pembangunan, termasuk konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan upaya mitigasi perubahan iklim
- b) Pengembangan Energi Terbarukan: Mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan air, untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

C. Upaya pencapaian Misi III Mengembangkan Kehidupan yang Religius.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan kehidupan religius;

- 1) Menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama.
- 2) Meningkatkan kemajuan budaya khususnya budaya lokal; dan
- 3) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan pembangunan pemuda. Dalam upaya mengembangkan kehidupan yang religius di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan.

Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk mendukung penguatan nilai-nilai religiusitas masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan. Pemerintah daerah terus berupaya membangun dan merehabilitasi rumah ibadah, pusat kegiatan keagamaan, serta fasilitas pendukung lainnya yang representatif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung kegiatan keagamaan yang mempererat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. Melalui kerja sama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan, Kabupaten Tabalong memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat secara inklusif.

Dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), penguatan sarana dan prasarana keagamaan

menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rohani dan sosial.

a) Pembangunan dan Renovasi Tempat Ibadah: Membantu pembangunan dan renovasi masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya agar dapat menampung lebih banyak jamaah serta memberikan lingkungan yang nyaman dan aman untuk beribadah. Bantuan lainnya untuk tempat ibadah adalah untuk biaya operasional listrik dan air, termasuk insentif bagi marbot musholla.

b) Fasilitas Pendidikan Agama: Membangun dan memperbaiki madrasah, pesantren, sekolah minggu, dan lembaga pendidikan agama lainnya. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan asrama untuk mendukung pendidikan keagamaan yang lebih baik.

2. Program Pendidikan dan Pembinaan Agama

Kabupaten Tabalong menempatkan pendidikan dan pembinaan agama sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, religius, dan berdaya saing. Pemerintah daerah terus memperkuat program pendidikan agama melalui dukungan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan, peningkatan kualitas guru agama, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai.

Selain itu, program pembinaan agama dijalankan untuk semua kelompok usia melalui kegiatan seperti pelatihan da'i, kajian

keagamaan, pelatihan hafalan Al-Qur'an, dan pemberdayaan lembaga keagamaan di tingkat desa. Pemerintah juga aktif mendorong toleransi dan harmoni antarumat beragama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif.

Melalui program ini, Tabalong berharap dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual, sejalan dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

- a) Penguatan Pendidikan Agama di Sekolah: Memperkuat kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan melibatkan tokoh agama dan meningkatkan kualitas pengajaran agama. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai religius sejak dini pada generasi muda.
- b) Pelatihan dan Pembinaan Tokoh Agama: Menyediakan program pelatihan dan pembinaan bagi para ulama, pendeta, dan pemuka agama lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat, termasuk dukungan untuk mencetak para Da'i atau sebutan lain untuk semua keyakinan agama yang ada di Kabupaten Tabalong.
- c) Kegiatan Keagamaan: Mengorganisir kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, kecamatan bershalawat, diskusi lintas agama, dan kegiatan lainnya yang memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat serta memfasilitasi program ziarah (wisata religi).

3. Program Kerukunan Antar umat Beragama.

Kabupaten Tabalong berkomitmen menciptakan harmoni sosial melalui program kerukunan antarumat beragama. Program ini bertujuan mempererat hubungan antar komunitas keagamaan, mendorong toleransi, dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat.

Berbagai kegiatan dilakukan, seperti dialog lintas agama, pelatihan fasilitator kerukunan, serta perayaan bersama harihari besar keagamaan. Pemerintah juga membentuk forum komunikasi antarumat beragama (FKUB) yang aktif memediasi dan menyelesaikan potensi konflik dengan cara damai dan inklusif. Selain itu, pendidikan tentang toleransi dan nilai-nilai kebersamaan diperkuat melalui kurikulum sekolah dan program komunitas. Hal ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

Dengan semangat "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), Kabupaten Tabalong terus mendorong terciptanya masyarakat yang rukun, saling menghormati, dan bersatu menuju masa depan yang harmonis, antara lain:

- a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Mendukung keberadaan dan aktivitas FKUB untuk memfasilitasi dialog antarumat beragama, menyelesaikan potensi konflik, dan mempromosikan kerukunan dalam masyarakat.

b) Kegiatan Sosial Lintas Agama: Mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama, seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi kemanusiaan, yang dapat memperkuat solidaritas dan persatuan antarumat beragama.

c) Hari Besar Keagamaan Bersama: Merayakan hari-hari besar keagamaan dengan melibatkan semua komunitas agama dalam bentuk kegiatan bersama, seperti festival budaya, untuk memperkuat rasa persaudaraan.

4. Integrasi Nilai Religius dalam Kebijakan Publik.

Integrasi nilai religius dalam kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Tabalong mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan sosial, tetapi juga kuat dalam spiritualitas. Nilai religius, yang menjadi bagian dari visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), diimplementasikan melalui berbagai program dan kebijakan yang memperhatikan aspek moral, etika, dan keimanan.

Hal ini diwujudkan, misalnya, dengan mendukung pengembangan pendidikan berbasis agama, penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, dan promosi budaya toleransi antarumat beragama. Pemerintah juga mendorong keterlibatan tokoh agama dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat Tabalong. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kemajuan pembangunan dan keseimbangan spiritual, menjadikan

Tabalong sebagai kabupaten yang tidak hanya unggul secara material, tetapi juga bermartabat secara moral melalui upaya antara lain :

- a) Kebijakan Pro-Rakyat Berbasis Agama: Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, seperti program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan perlindungan lingkungan yang didasari oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ajaran agama.
- b) Hari Tanpa Aktivitas untuk Ibadah: Menerapkan kebijakan yang memberikan waktu khusus bagi masyarakat untuk beribadah, seperti tidak ada kegiatan sekolah atau pekerjaan pada hari-hari tertentu yang dihormati dalam agama.
- c) Konseling dan Mediasi Berbasis Agama: Menyediakan layanan konseling dan mediasi berbasis agama untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga, konflik sosial, dan permasalahan lainnya dengan pendekatan spiritual.

5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Umat. Program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat di Kabupaten Tabalong merupakan upaya strategis pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai religius dan kebersamaan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memberdayakan kelompok masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Berbagai inisiatif dilaksanakan, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian akses permodalan, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan koperasi berbasis komunitas keagamaan dan mengintegrasikan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kegiatan produktif.

a) Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat solidaritas sosial, menjadikan Tabalong sebagai kabupaten yang sejahtera secara ekonomi dan bermartabat secara spiritual melalui kegiatan: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Agama: Mendukung kegiatan ekonomi berbasis masjid, gereja, dan lembaga agama lainnya, seperti koperasi syariah, usaha bersama, atau program wakaf produktif, untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

b) Zakat, Infaq, dan Sedekah: Mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah melalui badan amil zakat yang terpercaya dan transparan untuk mendukung program-program sosial keagamaan dan membantu mereka yang membutuhkan.

6. Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Publik.

Penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan publik di Kabupaten Tabalong menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Sebagai bagian dari visi "Menuju Tabalong SMaRT," pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi keberagaman keyakinan serta mendorong penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan secara inklusif, fasilitasi dialog antarumat beragama, serta penyediaan ruang ibadah yang memadai di tempat-tempat umum. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan yang diajarkan dalam agama ke dalam kebijakan publik.

Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan ajaran agama, Tabalong tidak hanya menjadi daerah yang maju secara fisik, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang bermoral dan toleran, menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman melalui upaya;

- a) **Sosialisasi Nilai-Nilai Agama:** Mengadakan kampanye publik dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, yang dapat diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan.

- b) Penghargaan bagi Tokoh Agama: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada tokoh-tokoh agama yang berjasa dalam memajukan kehidupan keagamaan di masyarakat, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.

7. Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan: Mendorong keterlibatan aktif pemuda dan perempuan dalam pembangunan melalui program pemberdayaan yang meningkatkan partisipasi mereka di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

D. Upaya pencapaian Misi IV Menjadi Daerah yang Terdepan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai Daerah Terdepan, yaitu:

- 1) Menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan
- 2) Berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Dalam upaya menjadi daerah yang terdepan di perlu dilakukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui tata kelola yang baik, pemerintah daerah memastikan setiap

proses pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi publik.

Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui platform digital maupun layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Selain itu, penerapan teknologi informasi menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja, guna mencegah korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif, Kabupaten Tabalong terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai visi "Menuju Tabalong SMaRT", dengan upaya-upaya;

- a) Peningkatan Akuntabilitas: Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
- b) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan yang ketat, memperkuat peran auditor internal dan evaluasi berkala terhadap program-program pembangunan untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

- c) Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Efektif: Menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan, termasuk perencanaan anggaran yang strategis dan pengelolaan aset yang optimal
- d) Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan: Menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk membangun kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang dapat mendukung pembangunan daerah
- e) Penguatan Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang jelas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat termasuk penataan dan penyederhanaan kelembagaan serta birokrasi.

2. Penerapan Konsep Smart City.

Penerapan konsep Smart City di Kabupaten Tabalong merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), konsep ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan nilai-nilai lokal dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Inisiatif ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, seperti aplikasi layanan publik berbasis daring, sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan wilayah, serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Selain itu, pemerintah

juga mengedepankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta, dan akademisi, untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran.

Dengan menerapkan Smart City, Kabupaten Tabalong berupaya menjadi wilayah yang adaptif terhadap perubahan zaman, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

- a) Implementasi Teknologi Smart City: Mengadopsi teknologi Smart City, seperti sistem transportasi cerdas, manajemen energi, dan pengelolaan sampah berbasis teknologi, untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Dukungan bagi implementasi Smart City ini diantaranya dengan menyediakan Wifi Gratis di seluruh Desa dan Sekolah termasuk Pesantren.
- b) Pengembangan Layanan E-Government: Mengembangkan layanan e-government yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara online, seperti perizinan, pembayaran pajak, dan pengaduan.
- c) Program Kota Bersih dan Hijau: Menerapkan program lingkungan yang berfokus pada penghijauan kota, pengelolaan sampah yang efektif, dan konservasi sumber daya alam, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

3. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis.

Kolaborasi dan kemitraan strategis di Kabupaten Tabalong menjadi pilar utama dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah pusat, guna mengoptimalkan potensi daerah dan mendukung visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Melalui kemitraan strategis, berbagai program unggulan telah berhasil dilaksanakan, seperti pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mengintegrasikan sumber daya, tetapi juga menciptakan sinergi antara inovasi dan kearifan lokal.

Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, Kabupaten Tabalong terus membangun jaringan kerja sama yang kuat untuk menciptakan peluang baru, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

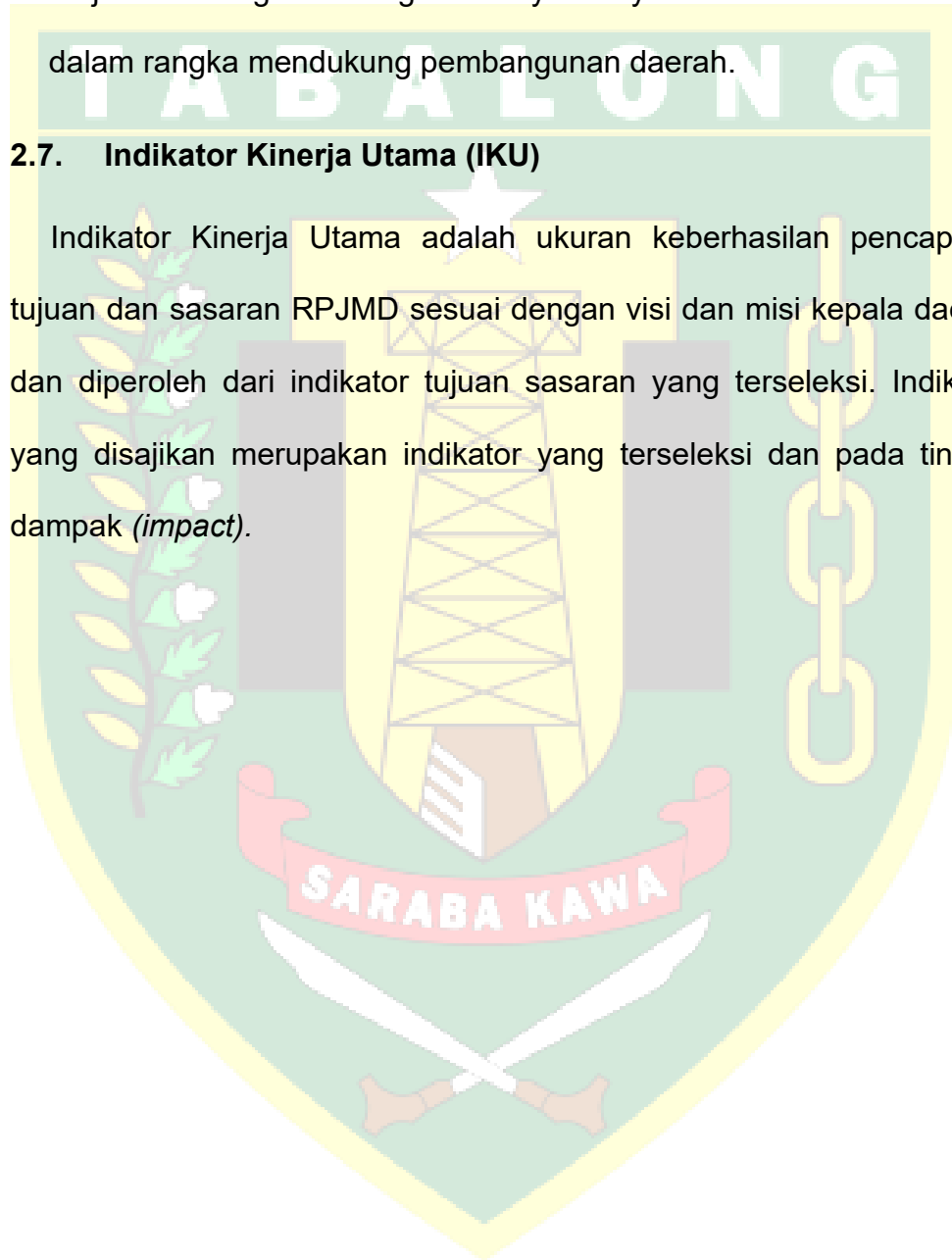
- a) Kerjasama dengan Sektor Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Kerjasama ini juga mencakup program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b) Partisipasi dalam Forum Regional dan Nasional: Aktif berpartisipasi dalam forum-forum regional dan nasional untuk mempromosikan

Tabalong, menarik investor, dan belajar dari praktik terbaik daerah lain.

- c) Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menjalinkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

2.7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan sasaran yang terseleksi. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi dan pada tingkat dampak (*impact*).



Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,97	76,08-76,40	76,4-76,92	76,93-77,39	77,40-77,86	77,89-78,06	78,07-78,77
2	Indeks ketahanan pangan	85,94	86	87	88	89	90	91
3	Persentase penduduk miskin (%)	5,64	5,44-4,48	5,24-4,74	4,73-4,20	4,19-3,87	3,87-3,48	3,47-2,97
4	Indeks Gini (Indeks)	0,300	0,273-0,263	0,269-0,259	0,258-0,256	0,255-0,253	0,253-0,250	0,250-0,240
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,44	3,20-2,64	3,16-2,57	3,00-2,45	2,95-2,40	2,90-2,30	2,89-2,20
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	5,4-5,5	5,7-6,6	5,8-7,2	6-7,8	6,2-8,1	6,4-8,4
7	PDRB perkapita (Rp. Juta)	122,31	142,65	162,99	183,33	200,00	237,50	275,00
8	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	5,96	6,02	6,08	6,14	6,20	6,26	6,33
9	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	7,76	7,78	7,79	7,81	7,82	7,84	7,85
10	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	1,42	1,47	1,53	1,6	1,66	1,72	1,78
11	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	606.520.463.800	636.846.486.990	668.688.811.340	702.123.251.907	772.335.577.097	849.569.134.806	934.526.048.287

12	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,76	2,03	2,16	2,28	2,40	2,53	2,65
13	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,41	3,44	3,48	3,51	3,55	3,58	3,62
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,98	74,72	75,47	76,22	76,98	77,75	78,53
15	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,729	0,736	0,743	0,751	0,758	0,766	0,774
16	Indeks Desa (Indeks)	N/A	81	84	86	88	91	93
17	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	2,36	2,31	2,16	2,02	1,87	1,68
18	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	157,77	151,37	144,96	138,56	132,16	125,75	114,10
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	N/A	71	73	75	77	79	81
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,417	0,413	0,408	0,404	0,400	0,396
21	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	80,76	80,91	81,06	81,22	81,37	81,52	81,68
22	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	N/A	N/A	2,5	2,7	3	3,5	4
23	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,49	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61
24	Indeks Integritas	72,87	76,40	77,38	78,35	79,33	80,30	81,27
25	Nilai SAKIP (kategori)	B	BB	BB	BB	A	A	AA
26	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	13,29	13,31	13,32	13,33	13,34	13,43
27	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	9,15	9,62	9,9	10,19	10,47	10,75	11,07

28	Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	22,07	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00
29	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,76	76,37	76,39	76,41	76,43	76,45	76,81
30	Angka konflik bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	N/A	58,89-58,91	59,67-59,75	60,46-60,58	61,24-61,42	62,02-62,25	62,80-63,09
32	Indeks SPBE (Indeks)	3,7	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
35	Prevalensi Stunting	23,10	22,00	21,00	20,00	19,00	17,00	15,00

2.8. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Sasaran Strategis 1		
Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,29
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,62
Umur Harapan Hidup	Tahun	76,37
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	22

Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya ketahanan pangan daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	86

Sasaran Strategis 3 Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase Penduduk Miskin	%	5,44-4,48
Indeks Gini	Indeks	0,273-0,263
Sasaran Strategis 4 Menurunnya tingkat pengangguran		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,20-2,64
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Persentase penduduk yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) usia 20–24 tahun	%	21
Sasaran Strategis 6 Berkembangnya sektor unggulan daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6,02
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	7,78
Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	%	1,47
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya investasi dan kewirausahaan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Nilai Realisasi Investasi non Tambang	Rupiah	636,85
Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,03
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Infrastruktur	Angka	0,736

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kualitas pembangunan desa		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Desa	Indeks	81

Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Penurunan intensitas emisi GRK	%	2,36
Indeks Risiko Bencana	Indeks	151,37

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Angka konflik bernuansa SARA	Kasus	0

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya kemajuan kebudayaan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58.89-58.91

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,417

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Indeks Integritas	%	76,4
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4
Nilai SAKIP	Kategori	BB

Indeks Pemerintah Digital	Indeks	0
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Predikat Inovasi Daerah	kategori	Sangat Inovatif

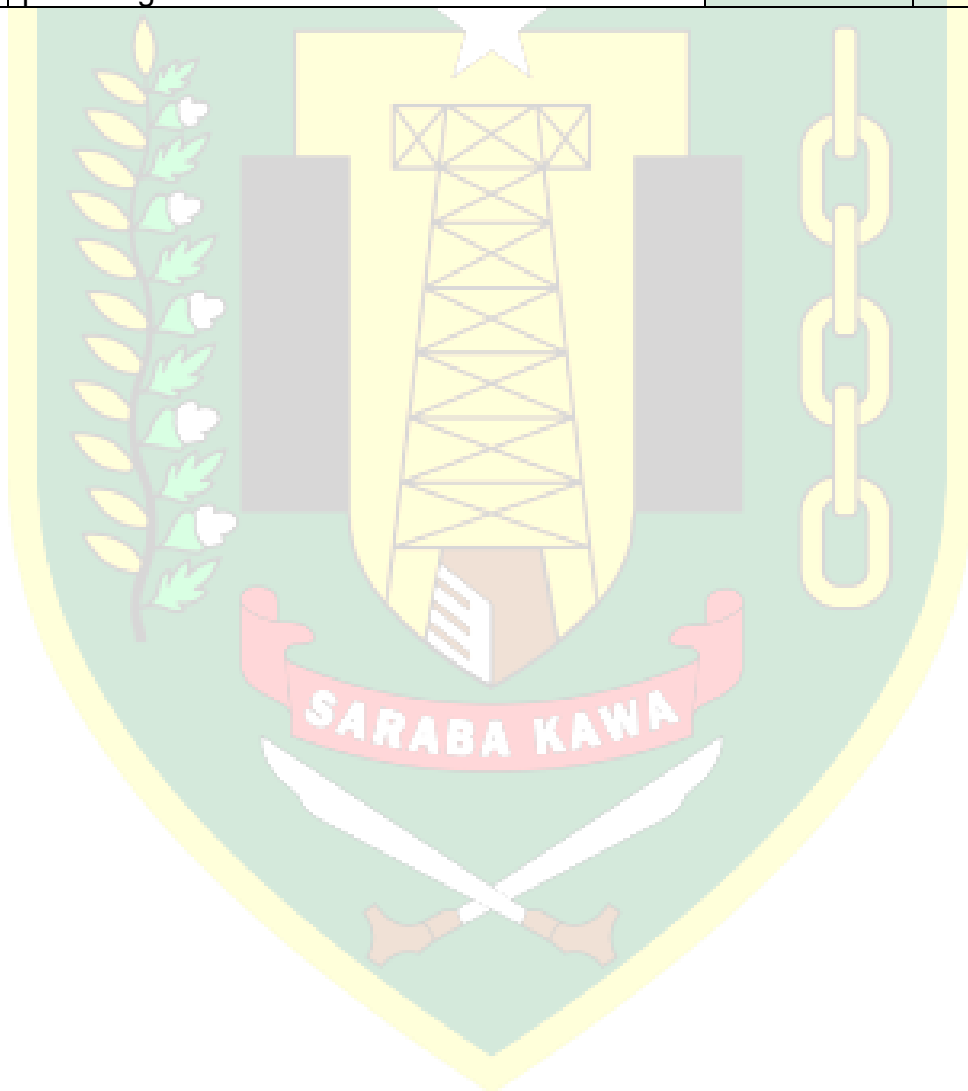
2.9. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	10	30
2.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	3	5
3.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	3	7
4.	Menurunnya tingkat pengangguran	4	9
5.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	1	5
6.	Berkembangnya sektor unggulan daerah	19	32
7.	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	12	13
8.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	13	30
9.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	5	6

10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	11	20
11.	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	8	13
12.	Meningkatnya kemajuan kebudayaan	3	6
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	8	18
14.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan bersih	20	59
15.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan	1	1



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Tabalong pada setiap sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator sasaran maka digunakan skala pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/464/2025 Tentang Penetapan Indikator sasaran Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029, telah ditetapkan **5 (lima) Tujuan, 7 (tujuh) Indikator tujuan, 15 (lima belas) sasaran** dan **28 (dua puluh delapan) indikator sasaran** yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, dijabarkan kedalam 2 tujuan, 3 Indikator tujuan dan 7 sasaran, dan 14 indikator sasaran;

Misi 2 Mendorong Kemajuan Daerah, dijabarkan kedalam 1 tujuan, 2 indikator tujuan, dan 3 sasaran, dan 4 indikator sasaran;

Misi 3 Mengembangkan Kehidupan yang Religius, dijabarkan kedalam 1 Tujuan, 1 indikator tujuan, dan 3 sasaran, dan 3 indikator sasaran;

Misi 4 Menjadi Daerah yang Terdepan, dijabarkan kedalam 1 Tujuan, 1 indikator tujuan, dan 2 sasaran, dan 7 indikator sasaran.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator sasaran Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Tujuan	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d tahun 2029 (%)	Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	75,97	76,08-76,40	76,94	101,13	77,89-78,06	98,78	Sangat Tinggi
2.		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,92	13,29	13,18	99,17	13,34	98,80	Sangat Tinggi
3.		Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	9,15	9,62	9,37	97,40	10,75	87,16	Sangat Tinggi
4.		Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	74,76	76,37	74,95	98,14	76,45	98,03	Sangat Tinggi

5.		Prevalensi Stunting	Persen	18,1	22,00	23,1	95,23	17,00	73,59	Sangat Tinggi
6.		Indeks ketahanan pangan	Indeks	85,94	86	85,22	99,09	90	94,68	Sangat Tinggi
7.		Persentase penduduk miskin (%)	Persen	5,64	5,44-4,48	4,67	116,48	3,48-3,87	82,86	Sangat Tinggi
8.		Indeks Gini (Indeks)	Indeks	0,300	0,273-0,263	0,310	88,04	0,253 0,250	81,61	Tinggi
9.		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,44	3,20-2,64	3,48	91,95	2,90-2,30	83,33	Sangat Tinggi
10.		Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	Persen	22,07	21	18,15	115,70	16	113,44	Sangat Tinggi
11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Persen	4,87	5,4-5,5	4,69	86,85	6,2-8,1	75,64	Tinggi
12.	PDRB perkapita (Rp. Juta) 122,31 142,65		Rp. Juta	122,31	142,65	126,9	88,95	237,50	53,43	Tinggi

13.		Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	5,96	6,02	6,45	107,14	6,26	103,03	Sangat Tinggi
14.		Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	7,76	7,78	8,47	108,86	7,84	108,03	Sangat Tinggi
15.		Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	Persen	1,42	1,47	1,54	104,76	1,72	89,53	Sangat Tinggi
16.		Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	Rupiah	606.520.463.800	636.846.486.990	1.638.782.517.906	257,32	849.569.134.806	192,89	Sangat Tinggi
17.		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	1,76	2,03	-	-	2,53	-	Data dari BPS belum dirilis
18.	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)		Indeks	3,41	3,44	3,42	99,41	3,58	95,53	Sangat Tinggi

19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)		Indeks	73,98	74,72	79,88	106,9	77,75	102,73	Sangat Tinggi
20.		Indeks Infrastruktur (Indeks)	Indeks	0,718	0,736	0,729	99,05	0,766	95,16	Sangat Tinggi
21.		Indeks Desa (Indeks)	Indeks	N/A	81	83,28	102,81	91	91,51	Sangat Tinggi
22.		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	2,34	2,36	2,56	108,47	1,87	136,89	Sangat Tinggi
23.		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	157,77	151,37	97,04	155,98	125,75	77,16	Sangat Tinggi
24.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)		Indeks	74,01	71	77,89	109,70	79	98,59	Sangat Tinggi
25.		Angka konflik bernuansa SARA	Jumlah	0	0	0	100	0	100	Sangat Tinggi
26.		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	Indeks	58,55	58,89-58,91	58,55	99,42	62,02 -62,25	94,40	Sangat Tinggi

27.		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks	0,421	0,417	0,421	97,38	0,400	105,25	Sangat Tinggi
28.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		Indeks	80,76	80,91	85,71	105,93	81,52	105,13	Sangat Tinggi
29.		Indeks Integritas	Indeks	72,87	76,40	76,17	99,69	80,30	94,85	Sangat Tinggi
30.		Indeks SPBE (Indeks)	Indeks	3,7	4	3,7	92,5	N/A	N/A	Sangat Tinggi
31.		Nilai SAKIP (kategori)	Kategori	B	BB	B	B	A	B	Sedang
32.		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	Tidak ada penilaian dari kemenpan RB
33.		Opini BPK (opini)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi
34.		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,49	4,51	4,46	98,89	4,59	97,16	Sangat Tinggi
35.		Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Tinggi

Tabel 3. 3 Pencapaian Indikator Tujuan Dan Sasaran

No	Interpretasi	Jumlah Sasaran
1.	Sangat Tinggi	29
2.	Tinggi	3
3.	Sedang	1
4.	Rendah	0
5.	Sangat Rendah	0
6.	Data Belum Rilis	2
Jumlah		35

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing misi dan indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap Misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	75,97	76,08-76,40	76,94	101,13	77,89 78,06	98,78
2.		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,92	13,29	13,18	99,17	13,34	98,800
3.		Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	9,15	9,62	9,37	97,40	10,75	87,16
4.		Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	74,76	76,37	74,95	98,14	76,45	98,03
5.		Prevalensi Stunting	Persen	18,1	22,00	23,1	95,23	17,00	73,59

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator tujuan dan sasaran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian kinerja tahun 2025 **sangat tinggi**, sedangkan pada sasaran kinerja harapan lama Sekolah, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup dan prevalensi Stunting mencapai target dengan capaian kinerja **sangat tinggi**.

Capaian ini mencerminkan kondisi yang relatif baik dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

1. Kesehatan, yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup
2. Pendidikan, melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
3. Standar hidup layak, yang diukur dari pengeluaran riil per kapita

Dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 76,08, capaian ini telah melampaui target dengan tingkat realisasi sebesar 101,13%, yang mengindikasikan kinerja pembangunan manusia yang sangat baik dan efektif.

Secara umum, peningkatan IPM ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam:

1. Meningkatkan akses layanan dasar masyarakat
2. Memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan
3. Menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli Masyarakat.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Tujuan

Indeks Pembangunan Manusia

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong adalah 76,08-76,40. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 76,94 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 75,97 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 101,13 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,94, sedangkan pada tahun

2024 sebesar 75,97. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terjadi peningkatan tiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,89 78,06. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 76,94, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tahun 2029 sebesar 98,78 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Kabupaten tetangga.

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Capaian Kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan capaian kinerja 76,94 pertahun sedangkan Capaian Kinerja Kabupaten Balangan dengan Capaian Kinerja 74,78 pertahun dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Capaian Kinerja 72,67 pertahun, dapat di artikan Capaian Kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian IPM Per Tahun Provinsi/Kabupaten

No	Provinsi / Kabupaten	Capaian IPM Per Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Kalimantan Selatan	74,66	75,19	76,1
2.	Kabupaten Tabalong	75,43	75,97	76,94
3.	Kabupaten Balangan	72,97	73,83	74,78
4.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	71,12	71,74	72,67

e. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Keberhasilan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah, serta pelaksanaan program pencegahan putus sekolah yang mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar, serta pelaksanaan program promotif dan preventif yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, yang didukung oleh berbagai program pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, serta pengembangan usaha masyarakat sehingga mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak.
4. Sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan manusia, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan akses layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan, dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan sumber daya manusia, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Keberhasilan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:

1. Program peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat.
2. Program wajib belajar dan pencegahan putus sekolah, melalui pemberian bantuan pendidikan, dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan.

3. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Program percepatan penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat, melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara terpadu guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.
5. Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong serta mendukung peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia secara berkelanjutan.

B. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Harapan Lama Sekolah
 - a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk harapan lama sekolah di Kabupaten Tabalong adalah 13,29 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, harapan lama sekolah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 13,18 pertahun dibandingkan

dengan target perjanjian kinerja sebesar 13,29 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,17 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 12,92, harapan lama sekolah dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 13,18 artinya hingga tahun 2025 harapan lama sekolah di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk harapan lama sekolah sebesar 13,34. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 13,18 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk harapan lama sekolah hingga tahun 2029 sebesar 98,80 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan dengan nilai 13,35 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 13,47 bahwasanya untuk harapan lama sekolah Kabupaten Tabalong lebih rendah dengan nilai 13,18.

e. Analisis penyebab keberhasilan Harapan Lama Sekolah

Keberhasilan peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Peningkatan akses dan pemerataan fasilitas pendidikan

2. Implementasi kebijakan wajib belajar dan program pendidikan
3. Bantuan pendidikan dan dukungan finansial bagi siswa
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
5. Dukungan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
6. Peran pendidikan nonformal dalam memperluas kesempatan belajar

Secara keseluruhan, peningkatan Harapan Lama menunjukkan bahwa peluang generasi muda di Kabupaten Tabalong untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi semakin besar, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan akses pendidikan, melalui pembiayaan program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung keberlangsungan pendidikan masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mendorong peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, serta fasilitas pendukung lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas layanan pendidikan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong keberlanjutan pendidikan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Harapan Lama Sekolah :

1. Program peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, serta penyediaan layanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Program wajib belajar dan pencegahan putus sekolah, melalui pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, serta intervensi bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan.

3. Program peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
4. Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas proses pembelajaran, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.
5. Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan, melalui sosialisasi, kampanye pendidikan, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong adalah 9,62 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025 , rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 9,37 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 9,62 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 97,40 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 9,15, rata-rata lama sekolah dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 9,37 artinya hingga tahun 2025 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,75 persen. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 9,37 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk rata-rata lama sekolah hingga tahun 2029 sebesar 87,16 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan dengan nilai 8,34 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 8,00 bahwasanya untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan nilai 9,37.

e. Analisis penyebab keberhasilan Rata-Rata Lama Sekolah

Keberhasilan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Peningkatan akses dan pemerataan fasilitas pendidikan
2. Kebijakan wajib belajar dan program pencegahan putus sekolah
3. Bantuan pendidikan dan program beasiswa
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

5. Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat
6. Dukungan program pendidikan nonformal

Secara keseluruhan, peningkatan RLS menunjukkan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan, melalui pelaksanaan program wajib belajar, bantuan pendidikan, penyediaan beasiswa, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna mendorong keberlanjutan pendidikan masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia pendidikan yang efektif, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi dan keberlanjutan sekolah.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, serta fasilitas penunjang lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
4. Pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi pada penurunan angka putus sekolah, melalui intervensi seperti pendidikan kesetaraan, program kejar paket,

serta dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan pendidikan, melalui sinergi antar perangkat daerah serta dukungan sektor lain seperti perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang turut mendorong peningkatan lama sekolah.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS):

1. Pelaksanaan program peningkatan akses dan mutu pendidikan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
2. Pelaksanaan program wajib belajar dan pencegahan putus sekolah, melalui pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, serta dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu guna meningkatkan partisipasi sekolah.

3. Pelaksanaan program pendidikan kesetaraan, melalui penyelenggaraan paket A, B, dan C bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah.
4. Pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi guru serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif.
5. Pelaksanaan program penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas belajar, serta sarana penunjang lainnya guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
6. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan dukungan lintas sektor, melalui sinergi dengan sektor sosial dan ekonomi dalam memberikan dukungan kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan pendidikan, melalui koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan peningkatan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

3. Umur Harapan Hidup

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk umur harapan hidup di Kabupaten Tabalong adalah 76,37 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, umur harapan hidup di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 74,95 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 76,37 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 98,14 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 74,76, umur harapan hidup dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 74,95 artinya hingga tahun 2025 umur harapan hidup di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk umur harapan hidup sebesar 76,45. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 74,95 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk umur harapan hidup hingga tahun 2029 sebesar 98,03 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan dengan nilai 68,59 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 65,26 bahwasanya untuk umur harapan hidup Kabupaten Tabalong lebih dengan nilai 74,95.

e. Analisis penyebab keberhasilan Umur Harapan Hidup

Keberhasilan peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
 2. Perbaikan status gizi masyarakat
 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
 4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 5. Dominasi penduduk usia produktif
- f. Perbaikan kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat

Secara keseluruhan, peningkatan UHH menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan dan sosial di Kabupaten Tabalong berjalan cukup baik dan berdampak positif terhadap kualitas hidup Masyarakat.

h. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui pelaksanaan program kesehatan yang berfokus pada

pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan gizi masyarakat, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

2. Pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang efektif, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menekan angka kesakitan dan kematian.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Pelaksanaan program kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif, melalui edukasi pola hidup sehat, imunisasi, serta deteksi dini penyakit yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pembangunan kesehatan, melalui sinergi antar perangkat daerah serta dukungan sektor lain seperti sanitasi, air bersih, dan perlindungan sosial yang turut mempengaruhi peningkatan umur harapan hidup.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan upaya peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

- i. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH):

1. Pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan dasar, melalui penyediaan layanan kesehatan di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, melalui kegiatan pemeriksaan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
3. Pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui kegiatan imunisasi, deteksi dini penyakit, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular guna menekan angka kesakitan dan kematian.
4. Pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat, melalui pemberian makanan tambahan, pemantauan status gizi, serta edukasi gizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Pelaksanaan program peningkatan akses air bersih dan sanitasi, melalui penyediaan sarana sanitasi dan air bersih yang layak untuk mendukung kesehatan lingkungan.
6. Pelaksanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pelibatan kader

kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Prevalensi Stunting

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong adalah 22,00 pertahun. Berdasarkan dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan laporan Bapperida Tabalong. tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 23,1 persen pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 22,00 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 95,23 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 18,1 persen, prevalensi stunting dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 23,1 persen artinya hingga tahun 2025 prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong setiap tahun

semakin meningkat, dapat di katakan kinerja prevalensi stunting untuk penurunan semakin tidak baik, karena bertambahnya anak yang stunting di Kabupaten tabalong meningkat 5 Persen .

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk prevalensi stunting sebesar 17,00 persen. Dengan realisasi pada tahun 2025 23,1 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk prevalensi stunting hingga tahun 2029 sebesar 73,59 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Berdasarkan data yang tersedia, perbandingan prevalensi stunting untuk Kabupaten tetanga seperti Kabupaten balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Tabalong memiliki prevalensi stunting paling tinggi 23,1%.
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi kedua dengan prevalensi sekitar 18,6%.
3. Kabupaten Balangan memiliki prevalensi terendah di antara ketiganya 14,58%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tabalong masih menghadapi tantangan lebih besar dalam penanganan stunting dibandingkan dua kabupaten tetangganya, sehingga diperlukan penguatan intervensi gizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan edukasi kesehatan masyarakat.

e. Analisis penyebab meningkatnya prevalensi stunting

Meningkatnya prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Asupan gizi ibu hamil dan balita yang belum optimal
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan pola asuh anak
3. Tingginya penyakit infeksi pada balita
4. Kondisi sanitasi dan lingkungan yang belum optimal
5. Faktor sosial ekonomi keluarga
6. Pemanfaatan layanan kesehatan yang belum maksimal
7. Koordinasi program penanganan stunting yang masih perlu diperkuat

Oleh karena itu, upaya penurunan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan terintegrasi dan multisektor yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif Masyarakat.

f. Analisis alternative solusi untuk menurunkan prevalensi stunting

Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui berbagai alternatif solusi, yaitu:

1. Peningkatan intervensi gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita
2. Penguatan program posyandu dan pemantauan tumbuh kembang anak
3. Peningkatan edukasi gizi dan pola asuh anak
4. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih
5. Penguatan program lintas sektor dalam penanganan stunting

6. Peningkatan koordinasi dan monitoring program penurunan stunting

Melalui pelaksanaan strategi tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong dapat menurun dan kualitas sumber daya manusia di masa depan semakin meningkat.

g. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung percepatan penurunan stunting, melalui pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan balita, serta penyediaan sanitasi dan air bersih.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik tenaga kesehatan, kader posyandu, maupun tenaga pendamping keluarga, dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan dan layanan dasar, seperti puskesmas, posyandu, serta fasilitas sanitasi yang dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan akses layanan dan intervensi kepada kelompok sasaran.

4. Pelaksanaan program yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, melalui edukasi pola asuh, perbaikan pola konsumsi gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta deteksi dini risiko stunting pada balita.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam percepatan penurunan stunting, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, serta dukungan pemerintah desa dalam intervensi berbasis keluarga.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus dipercepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

h. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan penurunan prevalensi stunting:

1. Pelaksanaan program intervensi gizi spesifik, melalui kegiatan pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui guna mencegah dan menurunkan stunting.

2. Pelaksanaan program intervensi gizi sensitif, melalui penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan gizi masyarakat.
3. Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, melalui pemeriksaan kehamilan, pemantauan kesehatan balita, serta edukasi pola asuh yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4. Pelaksanaan program edukasi dan perubahan perilaku masyarakat, melalui sosialisasi pola hidup sehat, perbaikan pola konsumsi gizi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting.
5. Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat, melalui pelibatan kader posyandu, pendamping keluarga, serta program berbasis masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
6. Pelaksanaan program peningkatan kualitas data dan pemantauan, melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan status gizi serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan intervensi berjalan efektif.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, serta dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penurunan stunting.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus dipercepat serta memberikan

dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Indikator Sasaran Startegis

Capaian terhadap misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera “ dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat “ dan sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah “ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks ketahanan pangan	Indeks	85,94	86	85,22	99,09	90	94,68

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran dari sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yaitu Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 belum mencapai target. Namun, capaian realisasi indikator sasaran tersebut sebesar 85,22 persen dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **sangat tinggi**.

Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan melalui penguatan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, peningkatan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan pangan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Tingkat Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ditetapkan dengan target kinerja sebesar 86 persen. Hingga akhir periode pelaporan, capaian kinerja

terrealisasi sebesar 85,22 persen, atau mencapai 99,09 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah berada dalam kategori baik, meskipun masih terdapat selisih sebesar 0,78% dari target. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan guna mencapai target optimal yang telah ditetapkan.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator sasaran

1. Indeks Ketahanan Pangan

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong adalah 86 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 85,22 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 86 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,09 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 85,94, indeks ketahanan pangan dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 85,22 artinya terdapat penurunan indeks ketahanan pangan tahun 2025 di Kabupaten Tabalong sebesar 0,72.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk indeks ketahanan pangan sebesar 90. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 85,22 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk indeks ketahanan pangan hingga tahun 2029 sebesar 94,68 persen.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan dengan nilai 86,42 bahwasanya untuk Indeks ketahanan pangan Kabupaten Tabalong lebih rendah dengan nilai 85,22, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten

No	Wilayah	2025
1	Kabupaten Tabalong	85,22
2	Kabupaten Balangan	86,42

- e. Analisis penyebab menurunnya nilai indeks ketahanan pangan

Penurunan nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun daya beli masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain:

1. Penurunan produksi pangan lokal
Terjadinya penurunan hasil produksi pertanian akibat faktor cuaca, perubahan iklim, serta keterbatasan sarana produksi berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan di tingkat daerah.
2. Keterbatasan akses dan distribusi pangan
Gangguan pada rantai distribusi, keterbatasan infrastruktur, serta meningkatnya biaya logistik menyebabkan distribusi pangan kurang optimal, terutama ke wilayah tertentu.
3. Fluktuasi harga pangan
Kenaikan harga bahan pangan pokok berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, sehingga mempengaruhi akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.
4. Menurunnya daya beli masyarakat
Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara memadai.
5. Permasalahan gizi dan pola konsumsi masyarakat
Pola konsumsi yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta

masih adanya kasus kekurangan gizi turut mempengaruhi dimensi pemanfaatan pangan.

6. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal Ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu menyebabkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan harga.

7. Keterbatasan koordinasi dan integrasi program ketahanan pangan Program dan kegiatan lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan intervensi yang dilakukan belum optimal dalam meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh.

f. Analisis alternative solusi menurunnya indeks ketahanan pangan

Dalam rangka mengatasi penurunan Indeks Ketahanan Pangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal Melalui penyediaan sarana produksi pertanian (benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian), penerapan teknologi pertanian, serta penguatan kapasitas petani untuk meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan.

2. Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan Melalui perbaikan infrastruktur distribusi, pengembangan sistem logistik pangan

daerah, serta pengendalian rantai pasok guna memastikan ketersediaan pangan merata hingga ke seluruh wilayah.

3. Stabilitas harga dan pengendalian inflasi pangan
Melalui operasi pasar, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok.
4. Peningkatan daya beli masyarakat
Melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan.
5. Penguatan diversifikasi pangan lokal
Melalui pengembangan komoditas pangan alternatif berbasis potensi lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta pengurangan ketergantungan pada komoditas tertentu.
6. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
Melalui intervensi gizi, edukasi pola konsumsi sehat, serta peningkatan akses terhadap pangan bergizi terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
7. Penguatan koordinasi dan integrasi program ketahanan pangan
Melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

8. Penguatan sistem data dan monitoring ketahanan pangan
Melalui pemutakhiran data pangan, sistem peringatan dini (early warning system), serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.

g. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan cukup efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja berupa nilai Indeks Ketahanan Pangan yang berada pada kategori baik.

Efisiensi tersebut tercermin dari:

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
2. Pemanfaatan sumber daya manusia seperti penyuluh pertanian dan kelompok tani secara efektif
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pertanian serta distribusi pangan
4. Pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

- h. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah daerah. Program-program tersebut meliputi:

1. Program peningkatan produksi tanaman pangan
2. Program pemberdayaan petani dan kelompok tani
3. Program diversifikasi dan konsumsi pangan lokal
4. Program penguatan distribusi dan stabilitas pasokan pangan
5. Program pengembangan sektor perikanan dan sumber protein lokal.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di masyarakat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah.

3. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dan sasaran strategis “Menurunnya Tingkat Kemiskinan Dan Terkendalnya Ketimpangan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Menurunnya Tingkat Kemiskinan Dan Terkendalnya Ketimpangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase penduduk miskin (%)	Persen	5,64	5,44-4,48	4,67	116,48	3,48-3,87	82,86

2.	Indeks Gini (Indeks)	Indeks	0,300	0,273-0,263	0,310	88,04	0,253 0,250	81,61
----	----------------------	--------	-------	-------------	-------	-------	----------------	-------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran dari sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan yaitu persentase penduduk miskin dan indeks gini mencapai target, persentase penduduk miskin dengan capaian kinerja **sangat tinggi** dan indeks gini dengan capaian kinerja **tinggi**.

Secara umum target kinerja pada indikator kinerja di atas cukup baik dan apabila di bandingkan dengan kabupaten tetangga secara umum, persentase kemiskinan di Balangan dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran $\pm 5-6\%$ sedangkan Kabupaten Tabalong menunjukkan kinerja yang lebih unggul dalam penurunan kemiskinan dibandingkan Kabupaten Balangan. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Tabalong relatif lebih efektif, baik dari sisi perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

Pada indikator kinerja Indeks Gini tingkat ketimpangan pendapatan masih lebih tinggi. Hal ini berpotensi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Tabalong belum sepenuhnya merata. Sementara itu, Kabupaten Balangan Indeks Gini umumnya berada pada kisaran $\pm 0,28-0,30$ kemungkinan memiliki distribusi pendapatan yang relatif lebih merata, meskipun tingkat kemiskinannya sedikit lebih tinggi.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Persentase Penduduk Miskin

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong adalah 5,44-4,48 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 4,67 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 5,44-4,48 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 116,48 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 5,64, persentase penduduk miskin dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 4,67 artinya terdapat penurunan persentase penduduk miskin tahun 2025 di Kabupaten Tabalong sebesar 0,97. Dapat di artikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabalong semakin menurun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk persentase penduduk miskin sebesar 3,48-3,87. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 4,67 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk persentase penduduk miskin hingga tahun 2029 sebesar 82,86 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Kabupaten tetangga.

Dibandingkan dengan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berdekatan dengan Kabupaten Tabalong untuk persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong lebih rendah dengan nilai 4,67 Persen sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 4,81 Persen.

e. Analisis penyebab keberhasilan persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong berhasil mencapai 4,67 persen, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 5,44-4,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan berjalan dengan baik dan efektif.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat
2. efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
3. peningkatan akses dan kualitas pendidikan
4. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
5. pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sinergi antar sektor serta meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan agar tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabalong dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Pada indikator persentase penduduk miskin, penggunaan sumber daya dapat dikatakan cukup efisien karena capaian kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung penanggulangan kemiskinan secara tepat sasaran, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah, tenaga pendamping sosial, maupun fasilitator pemberdayaan masyarakat, dalam mendampingi kelompok miskin dan rentan agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung ekonomi dan layanan dasar, seperti fasilitas pelatihan kerja, akses permodalan, serta infrastruktur dasar yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi, melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat dan desa, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, upaya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang semakin signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan penurunan persentase penduduk miskin:

1. Pelaksanaan program perlindungan sosial, melalui pemberian bantuan sosial, subsidi, serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan guna menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan

keterampilan kerja, serta akses permodalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Pelaksanaan program peningkatan akses terhadap layanan dasar, melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hidup.
4. Pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja, melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, investasi daerah, serta kegiatan padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
5. Pelaksanaan program pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
6. Pelaksanaan program pendataan dan validasi data kemiskinan, melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memastikan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat

2. Indeks Gini

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk indeks gini di Kabupaten Tabalong adalah 0,273-0,263 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, indeks gini di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 0,310 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 0,273-0,263 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 88,04 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 0,30, indeks gini dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 0,31 hingga tahun 2025 artinya indeks gini di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk indeks gini sebesar 0,253 0,250. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,31 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk indeks ketahanan pangan hingga tahun 2029 sebesar 81,61 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan Indeks Gini umumnya berada pada kisaran $\pm 0,28-0,30$ sehingga Indeks Gini lebih baik dari pada Kabupaten Tabalong.

e. Analisis penyebab tidak berhasilnya capaian kinerja indeks gini Kabupaten Tabalong

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan target Indeks Gini sebesar 0,273. Namun berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai adalah 0,30, sehingga capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diharapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. masih adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat
2. struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor tertentu
3. keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang berkualitas
4. belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. adanya perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah.

f. Analisis Solusi untuk Menurunkan Indeks Gini Kabupaten Tabalong

Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM
2. memperluas penciptaan lapangan kerja
3. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
4. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
5. mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tabalong dapat semakin menurun sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata.

g. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Pada indikator Indeks Gini, capaian kinerja yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perluasan kesempatan kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah, tenaga pendamping sosial, maupun fasilitator ekonomi, dalam mengimplementasikan program yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan inklusivitas pembangunan.

3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, seperti infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap layanan keuangan yang dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan kesempatan ekonomi.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan inklusi ekonomi, melalui pengembangan UMKM, peningkatan akses terhadap lapangan kerja, serta pemberdayaan kelompok rentan agar memiliki kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pendapatan.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengurangan ketimpangan, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat dan desa, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dalam menekan kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, pengendalian Indeks Gini di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus membaik serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terciptanya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

- h. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Tabalong telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

terlihat dari keberhasilan dalam menurunkan persentase penduduk miskin hingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, capaian Indeks Gini yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan masyarakat masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

4. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Indikator Sasaran Strategis

Capaian terhadap Misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat “ dan sasaran “Menurunnya Tingkat Pengangguran” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Menurunnya tingkat pengangguran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,44	3,20-2,64	3,48	91,95	2,90-2,30	83,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran dari sasaran Menurunnya tingkat pengangguran terbuka yaitu tingkat pengangguran terbuka mencapai target tingkat pengangguran terbuka dengan capaian kinerja **sangat tinggi** .

Program Prioritas Bupati Tabalong untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka untuk “Mencetak 15.000 Tenaga Terampil” memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tabalong. Melalui peningkatan kualitas SDM, program ini tidak hanya mengurangi jumlah pengangguran, tetapi juga memperkuat struktur ketenagakerjaan yang lebih produktif dan berdaya saing.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator sasaran

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tabalong adalah 3,20-2,64 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 3,48 persen dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 3,20-2,64 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 91,95 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,48 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 3,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 0,04 persen poin pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,90-2,30. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 3,48 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga tahun 2029 sebesar 83,33 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Kabupaten tetangga.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong sebesar 3,48 persen lebih rendah dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebesar 3,79 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Tabalong dalam menyerap tenaga kerja relatif lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di karenakan jumlah penduduk yang berbeda.

e. Analisis penyebab belum tercapainya Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong sebesar 3,48 persen masih lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 3,20 persen, sehingga indikator ini belum mencapai target yang diharapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahun

2. ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja
3. terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal
4. dinamika kondisi ekonomi dan dunia usaha
5. belum optimalnya program penciptaan lapangan kerja.

Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat program peningkatan keterampilan tenaga kerja, mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, serta memperluas pengembangan sektor usaha produktif agar tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Berdasarkan analisis, penggunaan sumber daya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 telah memberikan dampak positif, namun efisiensi penggunaannya masih dapat ditingkatkan, beberapa temuan utama terkait efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

1. Alokasi anggaran untuk pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja sudah ada, tetapi belum maksimal dalam menurunkan TPT.
2. Tenaga SDM untuk pelatihan dan pemberdayaan belum mencakup seluruh wilayah secara merata.
3. Program pemberdayaan UMKM dan sektor informal berdampak positif, tetapi akses modal dan pasar masih menjadi kendala.

4. Koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat agar program ketenagakerjaan lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pemerintah daerah perlu memperkuat program pelatihan dan pemberdayaan yang berbasis kebutuhan pasar kerja, memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar dinas terkait sehingga penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan TPT Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung, yaitu:

1. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
2. Program pemberdayaan UMKM dan sektor informal.
3. Penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan investasi.
4. Program pendidikan dan kesetaraan kesempatan kerja.
5. Koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan program berjalan efektif.

Sinergi program-program tersebut membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Tabalong relatif stabil meski masih sedikit di atas target.

5. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” dan sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Produktif” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Produktif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	Persen	22,07	21	18,15	115,70	16	113,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran dari sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Produktif yaitu Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun pada tahun 2025 belum mencapai target. Namun, capaian realisasi indikator sasaran tersebut sebesar 115,70 persen dikategorikan dengan skala nilai perangkat kinerja **sangat tinggi**.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator sasaran

1. Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun
 - a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun di Kabupaten Tabalong adalah 21 persen. Realisasi Persentase penduduk Not

in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 18,15 persen dengan realisasi menurun dengan selisih sebesar 2,85 persen sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 115,70 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 sebesar 22,07 persen sedangkan realisasi Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun pada Tahun 2025 sebesar 18,15 persen menurun sebanyak 3,92 atau 121,59 persen. Ini membuktikan bahwa Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun menurun setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun sebesar 16 persen. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 18,15 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun hingga tahun 2029 sebesar 113,44 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Indikator Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun menggambarkan proporsi penduduk muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas transisi generasi muda dari pendidikan menuju dunia kerja serta menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Data NEET biasanya dihitung berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan realisasi Kabupaten Tabalong lebih tinggi, sedangkan dibandingkan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi Kabupaten Tabalong lebih rendah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Persentase Penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun Per Tahun

Provinsi/Kabupaten

No	Wilayah	2023	2024	2025*
1	Pemerintahan Pusat (Indonesia)	21,67%	21,32%	20,95%
2	Provinsi Kalimantan Selatan	20,85%	20,12%	19,70%
3	Kabupaten Tabalong	19,35%	18,70%	18,15%
4	Kabupaten Balangan	20,40%	19,75%	19,10%
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	21,10%	20,45%	19,85%

- e. Analisis penyebab keberhasilan Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun

Keberhasilan dalam menurunkan persentase NEET dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pembangunan sumber daya manusia, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi daerah serta berkembangnya beberapa sektor ekonomi seperti sektor jasa, perdagangan, pertambangan, dan UMKM telah menciptakan peluang kerja bagi generasi muda. Kondisi ini membantu menyerap tenaga kerja usia muda sehingga mengurangi jumlah penduduk yang tidak bekerja maupun tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan.

2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan vokasi telah membantu meningkatkan keterampilan generasi muda sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja.

3. Penguatan Program Pengembangan Pemuda

Berbagai program pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah turut mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif, seperti program kewirausahaan pemuda, pelatihan keterampilan, serta kegiatan pemberdayaan pemuda di tingkat desa dan kecamatan.

4. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, serta program pengembangan kewirausahaan, turut berkontribusi dalam menurunkan persentase NEET.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pemerintah daerah juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal, baik melalui peran perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, maupun organisasi kepemudaan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan pemuda turut meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran strategis ini.

Pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang sudah tersedia, seperti sekolah menengah kejuruan, lembaga pelatihan kerja, serta balai latihan kerja, juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru dalam skala besar.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan persentase NEET antara lain:

1. Program Pelatihan Kerja dan Pengembangan Kompetensi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi generasi muda sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- pelatihan keterampilan kerja
- pelatihan berbasis kompetensi
- pelatihan kewirausahaan.

Program ini membantu meningkatkan peluang kerja bagi pemuda serta mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Program ini bertujuan untuk mendorong generasi muda agar mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri melalui kegiatan kewirausahaan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- pelatihan kewirausahaan
- pendampingan usaha pemuda
- fasilitasi akses permodalan bagi usaha pemuda.

Program ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pemuda terhadap lapangan kerja formal.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui sekolah menengah kejuruan maupun lembaga pelatihan kerja membantu meningkatkan keterampilan generasi muda yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

4. Program Pemberdayaan Pemuda

Program pemberdayaan pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan ekonomi, antara lain melalui:

- kegiatan kepemudaan
- pelatihan kepemimpinan pemuda
- pengembangan organisasi kepemudaan.

6. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengan tujuan “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Inklusif” dan sasaran “Berkembangnya Sektor Unggulan Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Berkembangnya Sektor Unggulan Daerah

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	4,87	5,4-5,5	4,69	86,85	6,2-8,1	75,64
2.	PDRB perkapita		Rp. Juta	122,31	142,65	126,9	88,95	237,50	53,43
3.		Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	5,96	6,02	6,45	107,14	6,26	103,03
4.		Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	7,76	7,78	8,47	108,86	7,84	108,03
5.		Kontribusi Penyediaan Akomodasi	Persen	1,42		1,54	104,76	1,72	89,53

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
		Makan dan Minum terhadap PDRB			1,47				

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator tujuan dan sasaran yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB perkapita dengan capaian kinerja tahun 2025 **tinggi**, sedangkan pada sasaran kinerja kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%), Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) dan Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%) mencapai target 100 persen dengan capaian kinerja **sangat tinggi**.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Tujuan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) di Kabupaten Tabalong adalah 5,4-5,5 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 4,69 persen dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 5,4 persen sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 86,85 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,69 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 4,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 0,18 persen poin pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 6,2-8,1. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 4,69 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) hingga tahun 2029 sebesar 75,64 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Kabupaten tetangga.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, Tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Tabalong sebesar 4,69 persen lebih rendah dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebesar 5,07 persen dan Kabupaten Balangan tahun 2025 sebesar 4,22 persen, Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Balangan, sedangkan untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) lebih baik dari Kabupaten Tabalong.

e. Analisis penyebab belum tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Belum tercapainya target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Fluktuasi kinerja sektor unggulan daerah seperti pertambangan dan pertanian.
2. Realisasi investasi yang belum optimal.
3. Daya beli masyarakat yang belum meningkat secara signifikan.
4. Kontribusi sektor ekonomi baru yang masih terbatas.
5. Pengaruh kondisi ekonomi nasional dan global.

Meskipun target belum tercapai, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen masih menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap mengalami pertumbuhan positif.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah, melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, penguatan sektor unggulan, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan investasi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah maupun pelaku ekonomi, dalam menggerakkan sektor produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah ekonomi daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi, seperti infrastruktur jalan, jaringan, pasar, serta fasilitas pendukung lainnya yang dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada pengembangan sektor produktif, melalui peningkatan kapasitas usaha, kemudahan perizinan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan ekonomi daerah, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat dan dunia usaha, sehingga mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi:

1. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ekonomi, melalui pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta jaringan transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
2. Pelaksanaan program pengembangan sektor unggulan daerah, melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
3. Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, serta peningkatan akses pasar guna meningkatkan daya saing usaha lokal.
4. Pelaksanaan program peningkatan investasi daerah, melalui penyederhanaan perizinan, promosi investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha.
5. Pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga kerja, melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung kebutuhan dunia usaha.
6. Pelaksanaan program penguatan konektivitas dan akses pasar, melalui pengembangan pasar, fasilitas distribusi, serta dukungan terhadap sistem logistik daerah.

7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

PDRB perkapita (Rp. Juta)

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk PDRB perkapita (Rp. Juta) di Kabupaten Tabalong adalah 142,65 juta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, PDRB perkapita (Rp. Juta) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 126,9 Juta dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 126,9 juta sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 88,95 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, PDRB perkapita (Rp. Juta) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 126,9 juta, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 122,31 Juta. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan PDRB perkapita

(Rp. Juta) sebesar 4,59 juta pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk PDRB perkapita (Rp. Juta) sebesar 237,50 juta. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 126,9 juta, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk PDRB perkapita (Rp. Juta) hingga tahun 2029 sebesar 53,43 persen.

d. Analisis penyebab belum tercapainya PDRB perkapita (Rp. Juta) Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan PDRB per kapita sebesar Rp142,65 juta, namun realisasi yang dicapai sebesar Rp126,9 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nilai produksi ekonomi daerah, namun peningkatan tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target PDRB per kapita Kabupaten Tabalong tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer.
3. Realisasi investasi yang belum optimal.
4. Produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan.

5. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mempengaruhi perhitungan PDRB per kapita.

Meskipun target belum tercapai, nilai PDRB per kapita sebesar Rp126,9 juta tetap menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Penggunaan sumber daya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 dapat dikatakan cukup efisien, karena berbagai program pembangunan tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,69 persen serta peningkatan nilai PDRB per kapita menjadi Rp126,9 juta.

Namun demikian, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui:

1. Optimalisasi penggunaan anggaran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
3. Diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
4. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi.

Dengan upaya tersebut diharapkan capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh sinergi program dan kegiatan berikut:

1. Pengembangan UMKM – meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.
2. Peningkatan infrastruktur – mempermudah akses ekonomi dan distribusi.
3. Pengembangan pertanian dan perkebunan – meningkatkan kontribusi sektor primer.
4. Peningkatan investasi daerah – mendorong masuknya modal baru dan lapangan kerja.
5. Peningkatan kualitas tenaga kerja – menambah produktivitas dan nilai tambah ekonomi.
6. Diversifikasi ekonomi – membuka sektor baru yang bernilai tambah tinggi.

Meskipun target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita belum sepenuhnya tercapai, program dan kegiatan ini telah menempatkan ekonomi Kabupaten Tabalong pada tren pertumbuhan positif dan menjadi dasar untuk pencapaian target ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang.

B. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) di Kabupaten Tabalong adalah 6,02 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 6,45 persen dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 6,02 persen sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 107,14 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,45 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 5,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) sebesar 0,49 Persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) sebesar 6,26 persen. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 6,45 persen, capaian kinerja

terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) hingga tahun 2029 sebesar 103,03 persen.

d. Analisis penyebab tercapainya Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) Kabupaten Tabalong tahun 2025

Tercapainya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong sebesar 6,45 persen pada tahun 2025, melebihi target 6,02 persen, disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan investasi dan kapasitas industri pengolahan.
2. Infrastruktur pendukung industri yang memadai.
3. Peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.
4. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah industri.
5. Dukungan kebijakan pemerintah daerah bagi sektor industri.

Secara keseluruhan, sinergi antara investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah berhasil mendorong kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendorong pengembangan industri pengolahan, melalui pelaksanaan program peningkatan nilai tambah komoditas, pengembangan kawasan industri, serta dukungan terhadap hilirisasi produk unggulan daerah.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik tenaga kerja industri maupun pelaku usaha, dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta daya saing industri pengolahan di tingkat regional maupun nasional.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung industri, seperti kawasan industri, infrastruktur transportasi, energi, serta fasilitas logistik yang dimanfaatkan untuk memperlancar proses produksi dan distribusi hasil industri.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, melalui inovasi produk, penerapan teknologi, serta peningkatan akses pasar bagi hasil industri pengolahan.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan sektor industri, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem industri yang kondusif.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB:

1. Pelaksanaan program pengembangan industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi hilirisasi komoditas, serta penguatan industri berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah produk.
2. Pelaksanaan program pengembangan kawasan industri, melalui penyediaan lahan, infrastruktur pendukung, serta kemudahan akses bagi pelaku industri untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan.
3. Pelaksanaan program pemberdayaan pelaku industri dan UMKM, melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan guna meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.
4. Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan standar produk industri, melalui sertifikasi, standarisasi, serta pengembangan inovasi produk untuk memperluas akses pasar.
5. Pelaksanaan program peningkatan investasi sektor industri, melalui penyederhanaan perizinan, promosi investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

6. Pelaksanaan program penguatan rantai pasok dan distribusi, melalui pengembangan sistem logistik, kemitraan usaha, serta akses pasar untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.

7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) di Kabupaten Tabalong adalah 7,78 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 8,47 persen dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 7,78 persen sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 108,86 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 7,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) sebesar 0,71 Persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) sebesar 7,84 persen. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 8,47 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) hingga tahun 2029 sebesar 108,03 persen.

d. Analisis penyebab tercapainya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Kabupaten Tabalong tahun 2025

Tercapainya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong sebesar 8,47 persen pada tahun 2025, melebihi target 7,78 persen, disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan sarana dan pendampingan.

2. Pengembangan sektor perikanan dan kehutanan yang lebih produktif.
3. Adopsi teknologi dan praktik inovatif untuk meningkatkan nilai tambah.
4. Dukungan kebijakan pemerintah daerah berupa subsidi, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran.
5. Perbaikan infrastruktur pendukung sektor primer.

Secara keseluruhan, sinergi antara produktivitas, inovasi, kebijakan, dan infrastruktur berhasil mendorong sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap PDRB Kabupaten Tabalong dibanding target yang telah ditetapkan, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melalui pelaksanaan program peningkatan produksi, penyediaan sarana produksi, pengembangan kawasan pertanian, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik petani, nelayan, maupun penyuluh pertanian dan perikanan, dalam meningkatkan kapasitas produksi, penerapan teknologi, serta pengelolaan usaha yang lebih efisien dan produktif.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sektor primer, seperti irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta fasilitas perikanan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan, melalui diversifikasi produk, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta penerapan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem sektor primer.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB:

1. Pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melalui penyediaan sarana produksi, benih unggul, serta dukungan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi.
2. Pelaksanaan program pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui penataan kawasan berbasis komoditas unggulan serta penguatan sentra produksi guna meningkatkan efisiensi dan skala usaha.
3. Pelaksanaan program pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor primer, melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha.
4. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas perikanan untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan program peningkatan nilai tambah produk, melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan, diversifikasi produk, serta penguatan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan.
6. Pelaksanaan program penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, melalui penerapan praktik ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong adalah 1,47 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 1,54 persen dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 1,47 persen sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 104,76 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,54 persen, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 1,42 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa terjadi kenaikan Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB sebesar 0,12 Persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB sebesar 1,72 persen. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 1,54 persen, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB hingga tahun 2029 sebesar 89,53 persen.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui pelaksanaan program promosi daerah, pengembangan destinasi wisata, serta dukungan terhadap usaha kuliner dan perhotelan yang berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi sektor jasa.

2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik pelaku usaha perhotelan, restoran, maupun tenaga kerja di sektor jasa, dalam meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi produk, serta daya saing usaha di bidang akomodasi dan kuliner.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas akomodasi, restoran, kawasan wisata, serta infrastruktur pendukung lainnya yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan dan masyarakat.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan daya tarik usaha, melalui peningkatan standar pelayanan, sertifikasi usaha, inovasi produk kuliner, serta penguatan branding dan promosi daerah.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan sektor akomodasi dan kuliner, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- e. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB:

1. Pelaksanaan program pengembangan pariwisata daerah, melalui promosi destinasi wisata, pengembangan objek wisata, serta peningkatan daya tarik daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Pelaksanaan program pengembangan usaha akomodasi dan kuliner, melalui pembinaan pelaku usaha perhotelan, restoran, dan usaha kuliner guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing usaha.
3. Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM sektor jasa dan ekonomi kreatif, melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses permodalan untuk mendorong pertumbuhan usaha di sektor akomodasi dan kuliner.
4. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti infrastruktur akses menuju destinasi wisata, fasilitas umum, serta kawasan wisata yang nyaman dan representatif.
5. Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan standar pelayanan, melalui sertifikasi usaha, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penerapan standar pelayanan yang profesional.

6. Pelaksanaan program promosi dan pemasaran produk lokal, melalui kegiatan event, festival, serta promosi digital guna meningkatkan daya tarik sektor akomodasi dan kuliner.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan jasa secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Capaian Terhadap Misi 1 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera” dengan tujuan “Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Inklusif” dan sasaran “Meningkatnya Investasi Dan Kewirausahaan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Meningkatnya Investasi Dan Kewirausahaan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	Rupiah	606.520.463.800	636.846.486.990	1.638.782.517.906	257,32	849.569.134.806	192,89

2.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	1,76	2,03	-	-	2,53	Data belum rilis
----	--------------------------------	--------	------	------	---	---	------	------------------

Capaian kinerja pada Realisasi investasi non tambang Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 mencapai Rp1.638.782.517.906, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp636.846.489.990. Tingkat capaian investasi mencapai sekitar 257,3%, dengan selisih realisasi sekitar Rp1,00 triliun di atas target. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja investasi di Kabupaten Tabalong tergolong sangat baik dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah, dengan capaian kinerja **sangat tinggi**. Sedangkan untuk capaian kinerja Rasio Kewirausahaan Daerah data dari Badan Pusat Statistik belum mengeluarkan realisasi tersebut.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Nilai Realisasi Investasi Non Tambang
 - a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Nilai Realisasi Investasi Non Tambang di Kabupaten Tabalong Adalah Rp. 636.846.486.990. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong tahun 2025, untuk Nilai realisasi investasi non tambang di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar Rp. 1.638.782.517.906 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 257,32 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong meningkat dari Rp 606.520.463.800 pada tahun 2024 menjadi Rp1.638.782.517.906 pada tahun 2025. Terjadi kenaikan investasi sebesar Rp1,03 triliun atau sekitar 170% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam iklim investasi daerah serta meningkatnya daya tarik Kabupaten Tabalong bagi investor pada sektor non-pertambangan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Realisasi investasi Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.638.782.517.906 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2029 sebesar Rp. 849.569.134.806. Dengan capaian sekitar 192,89%, realisasi investasi tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik serta menggambarkan meningkatnya daya tarik Kabupaten Tabalong sebagai tujuan investasi.

d. Analisa perbandingan Realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan

Realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong sebesar Rp1.638.782.517.906 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Balangan yang mencapai sekitar Rp652,6 miliar. Selisih investasi antara kedua daerah tersebut mencapai sekitar Rp986,18 miliar, atau sekitar 2,5 kali lebih besar di Kabupaten Tabalong. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi non-tambang di Kabupaten Tabalong relatif lebih kuat dibandingkan Kabupaten Balangan.

e. Analisis keberhasilan Realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong tahun 2025

Kabupaten Tabalong berhasil menarik investor karena memiliki iklim investasi yang kondusif, didukung oleh stabilitas ekonomi, keberadaan lahan strategis, dan potensi sektor non-tambang yang menarik, seperti:

1. Perdagangan dan jasa
2. Industri pengolahan
3. Konstruksi
4. Transportasi dan pergudangan

Tabalong memiliki lokasi strategis di koridor Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur, memudahkan distribusi logistik dan mendukung aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan minat investor. Investasi non-tambang Tabalong juga menunjukkan perluasan sektor ekonomi selain pertambangan, sehingga risiko ekonomi lebih tersebar dan keberlanjutan pembangunan lebih terjamin.

Keberhasilan investasi non-tambang ini memberikan beberapa dampak positif bagi pembangunan daerah, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena masuknya modal ke sektor produktif.
2. Penciptaan lapangan kerja baru, mendukung penyerapan tenaga kerja lokal.
3. Penguatan struktur ekonomi daerah, dengan diversifikasi sektor non-tambang.
4. Peningkatan kapasitas UMKM dan industri lokal, karena banyak proyek investasi memerlukan suplai lokal dan jasa.

f. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya pada realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong tahun 2025

Keberhasilan pencapaian investasi non-tambang menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan investasi, seperti pelayanan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi usaha, telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari capaian realisasi investasi yang jauh melampaui target yang ditetapkan.

g. Analisis program dan kegiatan keberhasilan pada realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong tahun 2025

Keberhasilan realisasi investasi non-tambang Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar Rp1,64 triliun tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan investasi. Program pengembangan iklim penanaman modal, promosi investasi, pelayanan perizinan berusaha, serta pengendalian pelaksanaan investasi terbukti mampu meningkatkan minat investor dan mempercepat realisasi investasi. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dinilai efektif dalam mendorong pertumbuhan investasi non-tambang di Kabupaten Tabalong.

8. Capaian Terhadap Misi 2 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap Misi “Mendorong Kemajuan Daerah” dengan tujuan “Mewujudkan Wilayah yang Berkembang Seimbang dan Berkelanjutan” dan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Daya Saing Daerah		Indeks	3,41	3,44	3,42	99,41	3,58	95,53
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	73,98	74,72	79,88	106,9	77,75	102,73
3.		Indeks Infrastruktur	Indeks	0,718	0,736	0,729	99,05	0,766	95,16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator tujuan dan sasaran yaitu Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja tahun 2025 **sangat tinggi**, sedangkan pada sasaran kinerja Indeks Infrastruktur mencapai target dengan capaian kinerja **sangat tinggi**.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Tujuan

Indeks Daya Saing Daerah

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong adalah 0,736. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 0,729 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 0,736 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,05 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,729, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Daya Saing Daerah terjadi peningkatan tiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Daya Saing Daerah sebesar 0,766. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,729, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Daya Saing Daerah hingga tahun 2029 sebesar 95,16 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Kabupaten tetangga.

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan realisasi kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan Realisasi Kinerja selisih sebesar 0,22 sedangkan realisasi Kinerja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 3,59 dan realisasi kinerja Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,66 dengan selisih dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar - 0,17 dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,24, dapat di artikan realisasi kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dari Kabupaten Balangan tapi lebih rendah dari realisasi kinerja Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi/Kabupaten

No	Wilayah	2023	2024	2025
1	Provinsi Kalimantan Selatan	3,51	3,56	3,66
2	Kabupaten Tabalong	3,12	3,34	3,42
3	Kabupaten Balangan	2,75	3,20	3,20
4	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,41	3,59	3,59

e. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Keberhasilan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Tabalong.
2. Membaiknya iklim investasi dan kemudahan berusaha, melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang didukung oleh berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, serta

pemberdayaan tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan, melalui penerapan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, peningkatan Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah mampu memperkuat kapasitas daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan relatif efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan tren peningkatan pada berbagai aspek yang mendukung pembangunan ekonomi dan kualitas pembangunan daerah.

Efisiensi tersebut tercermin dari:

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan daya saing daerah, melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat dan pelaku usaha.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, melalui peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga kerja dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan kemampuan daerah dalam menghadapi persaingan pembangunan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, seperti infrastruktur transportasi, sarana perdagangan, serta fasilitas pendukung investasi yang dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan daya saing daerah, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam mendorong peningkatan investasi, pengembangan usaha masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:

1. Program pengembangan dan peningkatan infrastruktur daerah, melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa.
2. Program peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta penguatan sistem pelayanan terpadu untuk mendorong masuknya investasi di daerah.
3. Program pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas masyarakat.
4. Program pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri kecil dan menengah, serta sektor ekonomi lainnya yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Program penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, melalui penerapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Tabalong serta mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong adalah 74,72 pertahun. Berdasarkan dari data publikasi KLHK, BPS dan Dokumen Pemerintah Daerah realisasi Tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 79,88 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 74,72 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 106,9 persen.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 73,98, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,88 artinya hingga tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 77,75. Dengan realisasi pada tahun 2025 79,88, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga tahun 2029 sebesar 102,73 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan realisasi kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 79,88 sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 Kabupaten Balangan sebesar 67,35, realisasi kinerja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 65,04 dan realisasi kinerja Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 56,00, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Per Tahun Provinsi/Kabupaten

No	Wilayah	2023	2024	2025*
1	Provinsi Kalimantan Selatan	73,50	55,42	56,00
2	Kabupaten Tabalong	72,90	73,98	79,88
3	Kabupaten Balangan	61,35	66,81	67,35
4	Kabupaten Hulu Sungai Utara	56,06	66,71	65,04

*Nilai 2025 pada masih berupa estimasi atau data sementara dari laporan daerah.

e. Analisis penyebab meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Keberhasilan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan serta meningkatnya kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui pelaksanaan program pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah serta pengelolaan limbah yang lebih baik sehingga mampu menjaga kualitas lingkungan tetap optimal.
2. Penguatan kebijakan dan regulasi di bidang lingkungan hidup, yang mendorong kepatuhan terhadap standar pengelolaan lingkungan baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, serta gerakan peduli lingkungan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih ramah lingkungan.
4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, melalui upaya konservasi, rehabilitasi lahan, serta perlindungan kawasan lingkungan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
5. Sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa upaya pengelolaan

lingkungan yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan relatif efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Efisiensi tersebut tercermin dari:

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pelaksanaan program pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada hasil.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur maupun masyarakat, dalam pelaksanaan berbagai program lingkungan seperti pengawasan, pembinaan, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi lingkungan hidup.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, seperti fasilitas pengelolaan sampah, sarana pengendalian pencemaran, serta infrastruktur pendukung lainnya yang dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga kualitas lingkungan.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui sinergi antar perangkat daerah serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut serta memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta pengendalian sumber pencemar untuk menjaga kualitas lingkungan tetap baik.
2. Program pengelolaan persampahan dan limbah, melalui peningkatan layanan pengelolaan sampah, pengurangan sampah dari sumbernya, serta pengembangan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, melalui kegiatan rehabilitasi lahan, penghijauan, serta perlindungan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

4. Program peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui edukasi, sosialisasi, serta gerakan peduli lingkungan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat.
5. Program penguatan kelembagaan dan penegakan hukum lingkungan, melalui pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Indeks Infrastruktur

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Infrastruktur di Kabupaten Tabalong adalah 0,736. Berdasarkan data dari LPPD Kabupaten Tabalong tahun 2025, realisasi Indeks Infrastruktur di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 0,729 dengan realisasi menurun tipis dengan selisih sebesar 0,007 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,05 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,718, Indeks Infrastruktur dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 0,729 artinya

hingga tahun 2025 Indeks Infrastruktur di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Infrastruktur sebesar 0,766. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,729, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Infrastruktur hingga tahun 2029 sebesar 95,16 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 0,728, Kabupaten Balangan dengan nilai 0,712 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 0,703 bahwasanya untuk Indeks Infrastruktur Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan nilai 0,729, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Per Tahun Provinsi/Kabupaten

No	Wilayah	2023	2024	2025*
1	Provinsi Kalimantan Selatan	0,701	0,715	0,728
2	Kabupaten Tabalong	0,706	0,718	0,729
3	Kabupaten Balangan	0,683	0,701	0,712
4	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,675	0,694	0,703

e. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Infrastruktur

Keberhasilan peningkatan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Peningkatan jalan kabupaten kondisi mantap
2. Pembangunan infrastruktur kawasan pemukiman
3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi, industri dan pertambangan

Secara keseluruhan, hampir tercapainya Indeks Infrastruktur menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur Kabupaten Tabalong berada pada kategori baik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat dari optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Infrastruktur jalan dan transportasi yang lebih baik meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan akses air minum dan sanitasi turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan Indeks Infrastruktur tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, tetapi merupakan hasil sinergi berbagai perangkat daerah, seperti:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan dan infrastruktur dasar
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan sanitasi

3. Perangkat daerah terkait lainnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.

Koordinasi antar perangkat daerah tersebut turut meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan.

9. Capaian Terhadap Misi 2 Pada Indikator Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mendorong Kemajuan Daerah” dengan tujuan “Mewujudkan Wilayah Yang Berkembang Seimbang Dan Berkelanjutan” dan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Desa	Indeks	N/A	81	83,28	102,81	91	91,51

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks desa mencapai target dengan capaian kinerja **sangat tinggi**. Capaian Indeks Desa 83,28 pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa secara umum kondisi desa di Kabupaten Tabalong berada pada kategori maju dan mendekati mandiri. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain adanya kesenjangan tingkat perkembangan antar desa, belum optimalnya kemandirian ekonomi di sebagian desa, serta terbatasnya inovasi dalam pengelolaan potensi desa.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

Indeks Desa

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Desa di Kabupaten Tabalong adalah 81. Realisasi Indeks Desa di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 83,28 dengan realisasi meningkat dengan selisih sebesar 2,28 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 102,81 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak ada realisasi pada tahun 2024 sehingga capaian Indeks Desa dengan dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak bisa dihitung.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Desa sebesar 91. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 83,28, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Desa hingga tahun 2029 sebesar 91,51 persen.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Indikator Indeks Desa pada umumnya merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks ini mengukur tingkat perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Ketahanan Sosial
2. Ketahanan Ekonomi
3. Ketahanan Lingkungan

Indikator ini hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Tabalong. Sedangkan untuk di daerah lain seperti Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, capaian Indeks Desa Kabupaten Tabalong berada pada posisi relatif lebih baik atau sebanding, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur desa dan penguatan ekonomi desa.

- e. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Desa

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Indeks Desa tahun 2025 antara lain:

- 1) Faktor Keberhasilan
 - 1) Peningkatan alokasi dana desa dan dana pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pembangunan desa.

3) Pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4) Program pemberdayaan masyarakat desa yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2) Faktor Kendala

Beberapa faktor yang masih menjadi tantangan antara lain:

- 1) keterbatasan kapasitas pengelolaan BUMDes di beberapa desa
- 2) ketimpangan perkembangan antar desa
- 3) keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan Indeks Desa dapat dilihat dari hubungan antara alokasi anggaran pembangunan desa dengan peningkatan status perkembangan desa.

Penggunaan sumber daya dinilai cukup efisien, karena dengan dukungan anggaran pembangunan desa, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa serta memperbaiki akses masyarakat desa terhadap layanan dasar.

Selain itu, pemanfaatan Dana Desa dari pemerintah pusat dan dukungan APBD daerah juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan desa. Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui:

1. penguatan perencanaan pembangunan desa
2. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa

3. optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi desa.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Desa antara lain:

1. Program pembangunan infrastruktur desa
2. Program pemberdayaan masyarakat desa
3. Program pengembangan ekonomi desa
4. Program peningkatan pelayanan dasar di desa
5. Program yang Perlu Ditingkatkan

10. Capaian Terhadap Misi 2 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mendorong Kemajuan Daerah” dengan tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Dan Perubahan Iklim” dan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 19 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	2,34	2,36	2,56	108,47	1,87	136,89
2	Indeks Risiko	Indeks	157,77	151,37	97,04	155,98	125,75	77,16

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
	Bencana (IRB)							

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran yaitu penurunan intensitas emisi GRK dan indeks risiko bencana (IRB) dengan capaian kinerja tahun 2025 **sangat tinggi**

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator sasaran

1. Penurunan Intensitas Emisi GRK

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Penurunan Intensitas Emisi GRK di Kabupaten Tabalong adalah 2,36. Realisasi Penurunan Intensitas Emisi GRK di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 2,56 dengan realisasi meningkat dengan selisih sebesar 0,2 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 108,47 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 sebesar 2,34 sedangkan realisasi Penurunan Intensitas Emisi GRK pada Tahun 2025 sebesar 2,56 meningkat sebanyak 0,22 atau 109,40 persen. Ini membuktikan bahwa Penurunan Intensitas Emisi GRK meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 1,87. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 83,28, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Penurunan Intensitas Emisi GRK hingga tahun 2029 sebesar 136,89 persen.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator nasional yang digunakan untuk mengukur upaya mitigasi perubahan iklim. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam persentase penurunan emisi GRK dibandingkan dengan skenario Business As Usual (BAU) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan rencana aksi daerah (RAD-GRK).

Berikut gambaran realisasi indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahun 2023–2025 pada tingkat nasional, provinsi, dan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan berdasarkan dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), RAD-GRK, serta laporan pembangunan daerah.

Dibandingkan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara realisasi Kabupaten Tabalong lebih tinggi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Penurunan Intensitas Emisi GRK
Per Tahun Provinsi/Kabupaten**

No	Wilayah	2024	2025*
1	Pemerintahan Pusat (Indonesia)	0,65	1,31
2	Provinsi Kalimantan Selatan	0,66	1,37
3	Kabupaten Tabalong	0,75	1,65
4	Kabupaten Balangan	0,7	1,5
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,85	1,6

e. Analisis penyebab keberhasilan Penurunan Intensitas Emisi GRK

Kabupaten Tabalong menunjukkan capaian penurunan emisi yang cukup baik dibanding kabupaten lain di wilayah sekitarnya. Beberapa faktor pendukung antara lain:

1. program rehabilitasi lahan dan penghijauan
2. pengelolaan limbah dan persampahan
3. efisiensi energi di sektor industri dan pemerintahan.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung program mitigasi perubahan iklim, melalui pelaksanaan kegiatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan energi terbarukan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur pemerintah, tenaga teknis, maupun masyarakat, dalam mengimplementasikan program ramah

lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengurangan emisi GRK.

3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan, seperti fasilitas pengelolaan sampah, transportasi ramah lingkungan, serta teknologi pengendalian emisi yang dimanfaatkan untuk menekan tingkat emisi secara efisien.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya berkelanjutan, melalui penerapan teknologi hemat energi, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan praktik ekonomi hijau di berbagai sektor.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengendalian perubahan iklim, melalui sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung target penurunan emisi GRK secara berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, upaya penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus ditingkatkan serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK):

1. Pelaksanaan program efisiensi energi dan pengurangan emisi, melalui penerapan teknologi hemat energi pada fasilitas pemerintah, industri, dan rumah tangga guna menekan konsumsi energi berbasis fosil.
2. Pelaksanaan program pengelolaan sampah dan limbah ramah lingkungan, melalui pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah serta pengembangan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi lingkungan, melalui kegiatan penanaman pohon, perlindungan kawasan hutan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan serapan karbon.
4. Pelaksanaan program pengembangan energi terbarukan, melalui pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya dan sumber energi ramah lingkungan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
5. Pelaksanaan program peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, melalui edukasi dan kampanye lingkungan hidup untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dan pengurangan emisi dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pelaksanaan program transportasi ramah lingkungan, melalui pengembangan transportasi yang efisien serta pengurangan emisi dari sektor transportasi.

7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus ditingkatkan serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan, ketahanan perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

2. Indeks Risiko Bencana (IRB)

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Tabalong adalah 151,37. Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 97,04 dengan realisasi menurun dengan selisih sebesar 54,33 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 155,98 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 sebesar 157,77 sedangkan realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) pada Tahun 2025 sebesar 97,04 menurun sebanyak 60,73 atau 162,58 persen. Ini membuktikan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) menurun setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 125,75. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 97,04, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Risiko Bencana (IRB) hingga tahun 2029 sebesar 77,16 persen.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indeks yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggambarkan tingkat risiko bencana suatu wilayah berdasarkan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity).

Nilai IRB berada pada skala 0–300, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Nilai IRB	Kategori Risiko
< 100	Risiko Rendah
100 – 150	Risiko Sedang
> 150	Risiko Tinggi

Semakin rendah nilai IRB, maka tingkat risiko bencana semakin kecil.

Dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan realisasi Kabupaten Tabalong lebih tinggi, sedangkan dibandingkan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi Kabupaten Tabalong lebih rendah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB)
Per Tahun Provinsi/Kabupaten**

No	Wilayah	2023	2024	2025*
1	Pemerintahan Pusat (Indonesia)	129,58	128,40	127,20
2	Provinsi Kalimantan Selatan	140,1	138,65	137,30
3	Kabupaten Tabalong	160,35	157,77	151,37
4	Kabupaten Balangan	162,40	159,85	155,60
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	165,10	161,70	158,25

e. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Risiko Bencana (IRB)

Keberhasilan pencapaian penurunan IRB pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui BPBD telah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui:

- 1) penyusunan dokumen kajian risiko bencana
- 2) pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat
- 3) penguatan sistem peringatan dini.

2. Penguatan Infrastruktur Pengendalian Bencana

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendalian bencana seperti:

- 1) normalisasi sungai dan drainase
- 2) pembangunan tanggul dan pengendali banjir
- 3) peningkatan sistem drainase perkotaan.

3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana melalui:

- 1) program desa tangguh bencana
- 2) sosialisasi mitigasi bencana
- 3) peningkatan kesadaran lingkungan.
4. Integrasi Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

Mitigasi bencana telah diintegrasikan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti:

- 1) RPJMD
- 2) RKPD
- 3) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana juga didukung oleh optimalisasi sumber daya manusia yang ada di perangkat daerah terkait. Aparatur pemerintah daerah bersama masyarakat dan relawan kebencanaan telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, serta kegiatan edukasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana juga turut meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, karena berbagai program dapat dilaksanakan secara kolaboratif tanpa sepenuhnya bergantung pada sumber daya pemerintah daerah.

Pemanfaatan infrastruktur dan teknologi dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh pemanfaatan tersebut antara lain:

1. penggunaan sistem informasi kebencanaan untuk pemantauan risiko bencana
2. pengembangan sistem peringatan dini bencana
3. penggunaan teknologi pengelolaan sampah dan limbah.

Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti:

- 1) pengendalian pencemaran lingkungan
- 2) pengelolaan sampah dan limbah
- 3) peningkatan ruang terbuka hijau
- 4) rehabilitasi lahan kritis.

Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penurunan emisi gas rumah kaca.

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan rehabilitasi hutan dan penghijauan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) penanaman pohon
- 2) rehabilitasi lahan kritis
- 3) konservasi sumber daya alam.

Program ini juga membantu mengurangi potensi bencana seperti banjir dan longsor.

3. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Program ini dilaksanakan oleh BPBD melalui berbagai kegiatan seperti:

- 1) penyusunan dokumen kajian risiko bencana
- 2) peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 3) pengembangan sistem peringatan dini bencana
- 4) penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Program ini berperan penting dalam menurunkan tingkat risiko bencana di Kabupaten Tabalong.

4. Program Desa Tangguh Bencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana melalui kegiatan seperti:

- 1) pelatihan kebencanaan
- 2) simulasi evakuasi bencana
- 3) pembentukan kelompok relawan kebencanaan.

Melalui program ini, masyarakat desa diharapkan mampu melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara mandiri.

11. Capaian Terhadap Misi 3 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mengembangkan Kehidupan yang Religius” dengan tujuan “Menciptakan Masyarakat yang Berkarakter Kuat, Berakhlak Mulia, dan Hidup dalam Harmoni” dan Sasaran Strategis “Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22 Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Indeks	74,01	71	77,89	109,70	79	98,59
2.		Angka konflik bernuansa SARA	Angka	0	0	0	100	0	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator tujuan dan sasaran yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian kinerja tahun 2025 **sangat tinggi**, sedangkan pada sasaran kinerja Angka konflik bernuansa SARA mencapai target dengan

capaian kinerja **sangat tinggi**. Tujuan peningkatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Tabalong tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari tingginya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) serta tidak terjadinya konflik SARA sepanjang tahun berjalan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan sosial masyarakat berlangsung harmonis, dengan tingkat toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antarumat beragama yang kuat. Keberhasilan ini didukung oleh peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat moderasi beragama. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, kondusif, dan berkelanjutan bagi pelaksanaan Pembangunan.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Tujuan

Indeks Kerukunan Umat Beragama

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong adalah 71. Berdasarkan dari data hasil survey Kementerian Agama Republik Indonesia Selatan untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 77,89 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 74,01 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 109,70 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 74,01, Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 77,89 artinya hingga tahun 2025 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 79. Dengan realisasi pada tahun 2025 77,89, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama hingga tahun 2029 sebesar 98,59 persen.

d. Analisis penyebab meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama

Keberhasilan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghormati antar pemeluk agama. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Terjalinnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, yang ditandai dengan adanya sikap saling menghormati, toleransi, serta kerjasama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
2. Peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi kerukunan umat beragama, melalui pelaksanaan dialog antar umat beragama, pembinaan kerukunan, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang inklusif dan kondusif.

3. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh agama, dalam menjaga stabilitas sosial melalui mediasi, sosialisasi nilai-nilai toleransi, serta penyelesaian potensi konflik secara musyawarah.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan keberagaman, yang didukung oleh berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan.
5. Kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, yang memungkinkan terciptanya lingkungan sosial yang aman dan damai bagi seluruh pemeluk agama dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan toleran telah terjaga dengan baik serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan relatif efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan kondisi kehidupan masyarakat yang semakin harmonis dan kondusif.

Efisiensi tersebut tercermin dari:

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pembinaan kerukunan umat beragama, melalui fasilitasi dialog lintas agama, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, serta program pembinaan yang mendorong terciptanya toleransi dan kebersamaan di masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, khususnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi antar umat beragama.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan dan sosial, yang digunakan untuk mempererat hubungan antar umat beragama serta mendukung kegiatan pembinaan kerukunan secara berkelanjutan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam menjaga kerukunan umat beragama, melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tabalong dapat terus terjaga dan ditingkatkan, sehingga mampu mendukung stabilitas sosial serta kelancaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:

1. Program pembinaan dan penguatan kerukunan umat beragama, melalui fasilitasi dialog lintas agama, kegiatan silaturahmi antar umat beragama, serta pembinaan kehidupan keagamaan yang harmonis dan toleran.
2. Program pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), melalui dukungan terhadap peran FKUB dalam mediasi, sosialisasi nilai toleransi, serta penyelesaian potensi konflik secara musyawarah.
3. Program dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan yang inklusif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan.
4. Program peningkatan wawasan kebangsaan dan toleransi, melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Program penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Tabalong serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

B. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Angka konflik bernuansa SARA

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Angka konflik bernuansa SARA di Kabupaten Tabalong adalah 0. Realisasi Angka konflik bernuansa SARA di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 0 persen dengan realisasi sama dengan target sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 sebesar 0 sedangkan realisasi Angka konflik bernuansa SARA pada Tahun 2025 sebesar 0 sama dengan tahun ini. Ini membuktikan bahwa tidak ada konflik di Kabupaten Tabalong karena Angka konflik bernuansa SARA bernilai 0.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Angka konflik bernuansa SARA sebesar 0. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Angka konflik bernuansa SARA hingga tahun 2029 sebesar 100 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Dibandingkan dengan Pemerintah Pusat dengan nilai 55 realisasi Kabupaten Tabalong lebih rendah atau dengan kata lain tidak ada konflik, sedangkan dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, realisasi Kabupaten Tabalong sama yaitu 0, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Angka konflik bernuansa SARA Per Tahun Provinsi/Kabupaten

No	Wilayah	2023	2024	2025
1	Pemerintahan Pusat (Indonesia)	65	60	55
2	Provinsi Kalimantan Selatan	1	0	0
3	Kabupaten Tabalong	0	0	0
4	Kabupaten Balangan	0	0	0
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0	0	0

e. Analisis penyebab keberhasilan Angka konflik bernuansa SARA

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Tingginya Toleransi Masyarakat. Masyarakat Kabupaten Tabalong memiliki budaya sosial yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat.
2. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial melalui kegiatan dialog dan pembinaan umat.

3. Penguatan Sistem Deteksi Dini Konflik. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak awal.

4. Stabilitas Politik dan Sosial. Stabilitas sosial yang baik serta rendahnya ketimpangan sosial membantu meminimalisir potensi konflik berbasis identitas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam menjaga stabilitas sosial dinilai cukup efisien, karena dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas pemerintah daerah mampu mempertahankan kondisi zero konflik SARA. Efisiensi ini tercermin dari:

1. optimalisasi koordinasi antar lembaga
2. pemanfaatan peran masyarakat
3. pendekatan pencegahan konflik yang lebih murah dibanding penanganan konflik.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. Program ini dilakukan melalui:

- 1) dialog antar umat beragama
- 2) kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB)
- 3) sosialisasi moderasi beragama.

2. Program Pencegahan Konflik Sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) deteksi dini potensi konflik sosial
- 2) koordinasi dengan aparat keamanan
- 3) pemantauan dinamika sosial masyarakat.
3. Program Pendidikan Toleransi dan Kebhinekaan. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai toleransi dan keberagaman.
4. Program Penguatan Kelembagaan Sosial. Penguatan peran lembaga masyarakat seperti:
 - 1) FKUB
 - 2) lembaga adat
 - 3) organisasi kemasyarakatan.

12. Capaian Terhadap Misi 3 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mengembangkan Kehidupan yang Religius” dengan tujuan “Menciptakan Masyarakat Yang Berkarakter Kuat, Berakhlak Mulia, Dan Hidup Dalam Harmoni” dan sasaran strategis “Meningkatnya Kemajuan Kebudayaan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Meningkatnya Kemajuan Kebudayaan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,55	58.89-58,91	58,55	99,42	62,02 - 62,25	94,40

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran yaitu indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan capaian kinerja tahun 2025 **sangat tinggi**.

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebesar 58,55%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 58,89%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 99,42% dari target. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target, capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam pelestarian nilai budaya, pengembangan objek pemajuan kebudayaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Ke depan, diperlukan penguatan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan agar capaian indikator dapat lebih optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Tabalong adalah 58,89 – 58,91. Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 menggunakan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar 58,55 dengan realisasi lebih rendah dari target sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,42 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 menggunakan realisasi Tahun 2023 sebesar 58,55 sedangkan realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Tahun 2025 sebesar 58,55 sama dengan tahun ini. Ini membuktikan bahwa tidak ada peningkatan nilai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 62,02 -62,25. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 58,55, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hingga tahun 2029 sebesar 94,40 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian IPK Kabupaten Tabalong antara lain:

1. Faktor keberhasilan

- 1) Pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah aktif melaksanakan kegiatan pelestarian budaya seperti festival budaya, kegiatan seni tradisional, serta penguatan identitas budaya lokal.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Masyarakat memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam kegiatan seni dan tradisi lokal.
- 3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Produk kerajinan dan seni budaya daerah mulai berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

- 4) Dukungan kebijakan pemerintah daerah. Program pengembangan kebudayaan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Faktor kendala

- 1) keterbatasan sarana dan prasarana budaya
- 2) terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan
- 3) belum optimalnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pembangunan kebudayaan dinilai cukup efisien, karena dengan anggaran yang relatif terbatas pemerintah daerah mampu meningkatkan nilai IPK. Efisiensi ini tercermin dari:

1. optimalisasi peran komunitas seni dan budaya
2. pemanfaatan fasilitas publik untuk kegiatan budaya
3. kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga budaya.

Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan pembangunan kebudayaan dilakukan dengan biaya yang relatif rendah namun tetap menghasilkan dampak positif.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang mendukung peningkatan IPK antara lain:

1. Program Pelestarian Warisan Budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - 1) inventarisasi dan perlindungan warisan budaya
 - 2) pelestarian tradisi dan adat istiadat

3) pengembangan museum dan situs budaya.

2. Program Pengembangan Seni dan Budaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat melalui:

- 1) festival seni budaya
- 2) pembinaan kelompok seni
- 3) pelatihan seni tradisional.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif. Program ini mendorong pemanfaatan budaya sebagai sumber ekonomi melalui:

- 1) pengembangan produk kerajinan budaya
- 2) promosi budaya lokal.

4. Program Pendidikan dan Literasi Budaya. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi budaya.

13. Capaian Terhadap Misi 3 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian terhadap misi “Mengembangkan Kehidupan yang Religius” dengan tujuan “Menciptakan Masyarakat Yang Berkarakter Kuat, Berakhlak Mulia, Dan Hidup Dalam Harmoni” dan sasaran strategis “Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2029)	Capaian s/d 2029
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,421	0,417	0,421	97,38	0,400	105,25

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator yaitu indeks ketimpangan gender (IKG) dengan capaian kinerja tahun 2025 sangat tinggi. Capaian kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebesar 0,421, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,417. Dengan demikian, capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan (semakin rendah nilai IKG menunjukkan kondisi yang semakin baik). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan gender masih perlu mendapat perhatian, khususnya dalam aspek partisipasi ekonomi, keterwakilan perempuan, serta akses terhadap sumber daya pembangunan. Meskipun selisih capaian relatif kecil, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, serta penguatan kebijakan responsif gender agar ketimpangan dapat ditekan dan target kinerja dapat tercapai pada periode berikutnya.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Tabalong adalah 0,417. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 0,421 dengan realisasi lebih tinggi dari target sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 97,38 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tabalong masih berada sedikit di atas target yang direncanakan, sehingga upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 sebesar 0,421 sedangkan realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada Tahun 2025 sebesar 0,421 sama dengan tahun ini. Ini membuktikan bahwa tidak ada peningkatan nilai.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,400. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,421, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hingga tahun 2029 sebesar 105,25 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional / provinsi / daerah tetangga

Dibandingkan dengan Kabupaten Balangan realisasi kinerja indeks ketimpangan gender tahun 2025 Kabupaten Tabalong lebih rendah dengan nilai 0,421 sedangkan nilai

indeks ketimpangan gender tahun 2025 Kabupaten Balangan sebesar 0,424, ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Per Tahun Provinsi/Kabupaten**

No	Wilayah	2024	2025
1	Kabupaten Tabalong	0,432	0,421
2	Kabupaten Balangan	0,523	0,424

e. Analisis penyebab keberhasilan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

1. Faktor yang mendukung keberhasilan

- 1) Peningkatan partisipasi pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang mengakses pendidikan menengah dan tinggi.
- 2) Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Perempuan mulai lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk sektor UMKM.
- 3) Kebijakan pengarusutamaan gender. Pemerintah daerah telah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan.

2. Faktor kendala

- 1) Keterwakilan perempuan dalam jabatan publik masih terbatas
- 2) Partisipasi perempuan dalam sektor formal masih lebih rendah dibanding laki-laki
- 3) Masih adanya norma sosial yang membatasi peran perempuan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam program pengarusutamaan gender dapat dikatakan cukup efisien, karena dengan anggaran yang relatif terbatas pemerintah daerah mampu menurunkan nilai IKG. Efisiensi ini terlihat dari:

1. integrasi program gender dalam berbagai sektor pembangunan
2. pemanfaatan program nasional seperti Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. kolaborasi dengan organisasi perempuan dan masyarakat.

Pendekatan integratif tersebut memungkinkan peningkatan kesetaraan gender tanpa memerlukan anggaran yang sangat besar.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan gender antara lain:

1. Program Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - 1) penyusunan perencanaan responsif gender
 - 2) pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
2. Program Pemberdayaan Perempuan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan melalui:
 - 1) pelatihan kewirausahaan
 - 2) pengembangan usaha perempuan.
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak. Program ini mencakup:
 - 1) layanan perlindungan korban kekerasan
 - 2) edukasi kesetaraan gender.
4. Program peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meliputi:
 - 1) peningkatan keterwakilan perempuan dalam organisasi dan pemerintahan

- 2) peningkatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi.

14. Capaian Terhadap Misi 4 Pada Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis

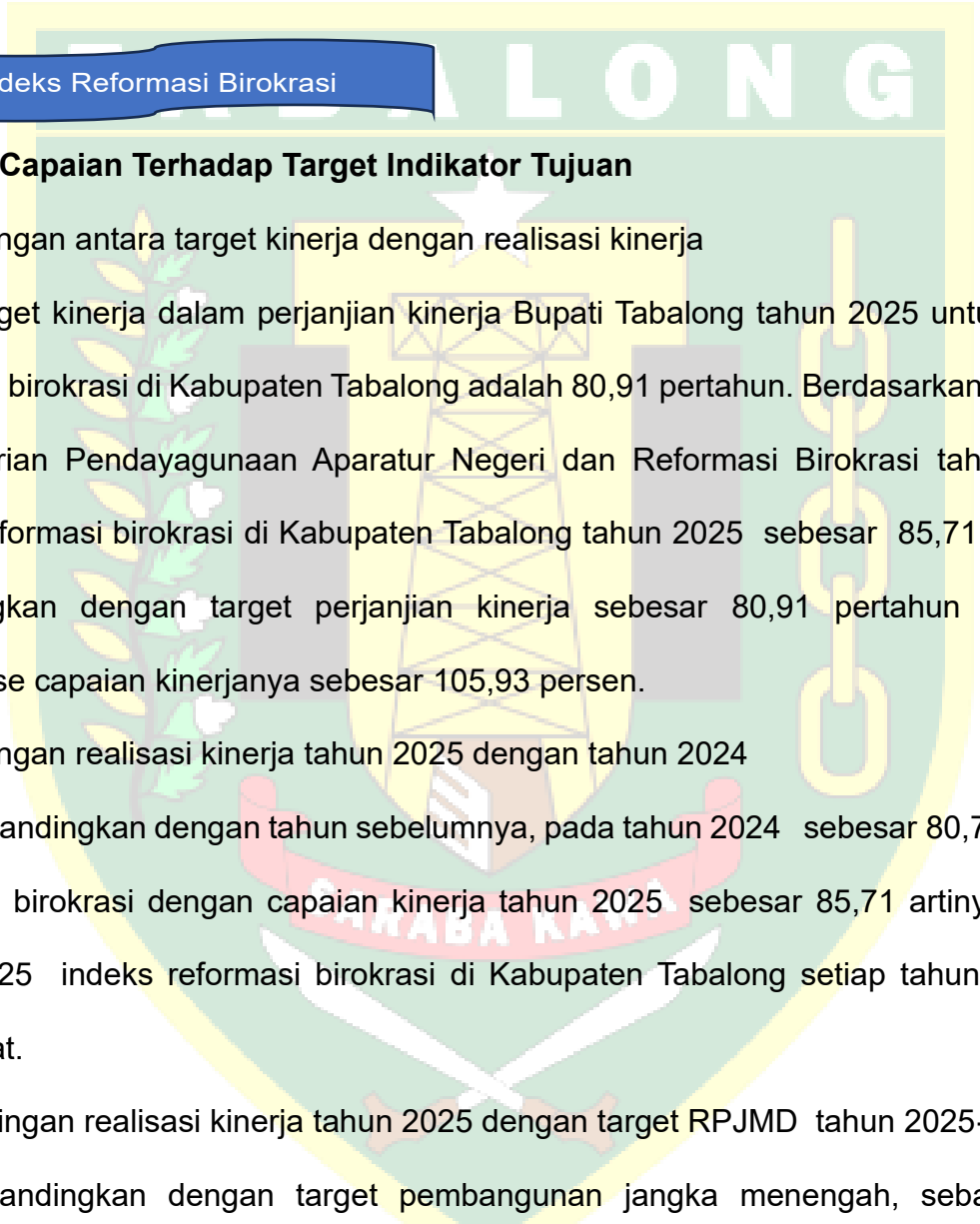
Capaian terhadap misi “Menjadi Daerah yang Terdepan” dengan tujuan “Menjadi Daerah Yang Terdepan Dalam Inovasi, Pembangunan, Dan Pelayanan Publik” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Bersih” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 27 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2025)	Capaian s/d 2029
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		Indeks	80,76	80,91	85,71	105,93	81,52	105,13
2.		Indeks Integritas	Indeks	72,87	76,40	76,17	99,69	80,30	94,85
3.		Indeks SPBE (Indeks)	Indeks	3,7	4	3,7	92,5	N/A	N/A
4.		Nilai SAKIP (kategori)	Kategori	B	BB	B	B	A	B
5.		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A
6.		Opini BPK (opini)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,49	4,51	4,46	98,89	4,59	97,16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator tujuan dan sasaran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja tahun 2025 **sangat tinggi**, sedangkan pada sasaran kinerja Indeks Integritas dan Indeks SPBE dengan capaian kinerja **sangat tinggi**, Nilai SAKIP dengan capaian kinerja sedang, Indeks Pemerintahan Digital tidak

ada penilaian dari kemenpan RB, Opini BPK dan Indeks Pelayanan Publik mencapai target dengan capaian kinerja **sangat tinggi**.



Indeks Reformasi Birokrasi

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Tujuan

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Tabalong adalah 80,91 pertahun. Berdasarkan dari data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi tahun 2025, indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 85,71 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 80,91 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 105,93 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 80,76, indeks reformasi birokrasi dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 85,71 artinya hingga tahun 2025 indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk indeks reformasi birokrasi sebesar 81,52. Dengan realisasi pada tahun 2025 85,71,

capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk indeks reformasi birokrasi hingga tahun 2029 sebesar 105,13 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Hulu Sungai Utara capaian kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan capaian kinerja 83,92 sedangkan capaian kinerja Kabupaten Tanah Bumbu dengan Capaian Kinerja 73,25 dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Capaian Kinerja 77,21 dapat di artikan capaian kinerja Kabupaten Tabalong lebih tinggi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Per Tahun Kabupaten

No	Kabupaten	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Per Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Kabupaten Tanah Bumbu	68,75	72,04	73,25
2.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	53,86	70,29	77,21
3.	Kabupaten Tabalong	77,53	80,26	85,71

e. Analisis penyebab meningkatnya indeks reformasi birokrasi

Keberhasilan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang ditunjukkan melalui kebijakan, arahan strategis, serta dukungan terhadap implementasi program reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah.

2. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perbaikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang lebih berorientasi pada hasil.
3. Penyederhanaan birokrasi dan penataan organisasi, melalui penyesuaian struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyempurnaan standar pelayanan, inovasi pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
5. Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, melalui peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengendalian gratifikasi, serta penguatan implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendukung transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah berjalan dengan baik serta mampu mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan relatif efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Efisiensi tersebut tercermin dari:

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui pembiayaan program perbaikan tata kelola, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan sistem pelayanan publik yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai indeks.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia aparatur yang efektif, melalui peningkatan kapasitas, perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set), serta penguatan profesionalisme aparatur dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang mendukung efisiensi proses administrasi, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam reformasi birokrasi, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam implementasi SAKIP, pembangunan Zona Integritas, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tabalong dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:

1. Program penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan dan evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
2. Program penataan organisasi dan tata laksana, melalui penyederhanaan birokrasi, perbaikan proses bisnis, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi perangkat daerah.
3. Program penguatan sistem pengawasan internal dan integritas aparatur, melalui pembangunan Zona Integritas, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik

kepentingan, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyempurnaan standar pelayanan, pengembangan inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Program pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui pengembangan dan integrasi aplikasi pemerintahan serta digitalisasi proses administrasi dan pelayanan publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Tabalong serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator Sasaran

1. Indeks Integritas
 - a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk indeks integritas di Kabupaten Tabalong adalah 76,40 pertahun. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025, indeks integritas di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 76,17 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 76,40 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 99,69 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 72,87, indeks integritas dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 76,17 artinya hingga tahun 2025 indeks integritas di Kabupaten Tabalong setiap tahun semakin meningkat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk indeks integritas sebesar 80,30. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 76,17 pertahun, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk indeks integritas hingga tahun 2029 sebesar 94,85 persen.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 76,60 bahwasanya untuk indeks integritas Kabupaten Tabalong lebih rendah dengan nilai 76,17.

e. Analisis penyebab keberhasilan indeks integritas

Keberhasilan peningkatan indeks integritas di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Penguatan Komitmen Pimpinan Daerah
2. Implementasi Program Penguatan Integritas di Perangkat Daerah
3. Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Internal
4. Digitalisasi dan Transparansi Layanan Publik

5. Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat
6. Perbaikan Berkelanjutan Berdasarkan Evaluasi Survei

Secara keseluruhan, upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian integritas telah mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk terus mempertahankan dan meningkatkan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui pelaksanaan program pencegahan korupsi, penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta pembangunan zona integritas pada perangkat daerah.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur sipil negara maupun pengawas internal, dalam menerapkan nilai-nilai integritas, etika pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pelayanan publik, seperti sistem informasi manajemen, aplikasi pengaduan

masyarakat, serta digitalisasi layanan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada pencegahan dan pengendalian praktik korupsi, melalui sosialisasi budaya integritas, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam penguatan integritas kelembagaan, melalui sinergi antar perangkat daerah, aparat pengawasan internal, serta dukungan instansi eksternal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan Indeks Integritas di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Integritas:

1. Pelaksanaan program penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui pembangunan Zona Integritas, penguatan reformasi birokrasi,

serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pelaksanaan program penguatan pengawasan internal, melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelaksanaan audit, reviu, serta pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui perbaikan standar pelayanan, penyederhanaan proses layanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas aparatur.
4. Pelaksanaan program digitalisasi dan transparansi layanan, melalui pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan publik untuk meminimalkan interaksi langsung serta mengurangi potensi praktik korupsi.
5. Pelaksanaan program penguatan budaya integritas dan etika aparatur, melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, penegakan disiplin, serta peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi.
6. Pelaksanaan program pengelolaan pengaduan masyarakat, melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses serta tindak lanjut yang responsif terhadap laporan masyarakat.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antara perangkat daerah, aparat pengawas, serta dukungan instansi eksternal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks Integritas di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.

2. Indeks SPBE

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk indeks SPBE di Kabupaten Tabalong adalah 4 pertahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, indeks SPBE di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 3,7 pertahun dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 4 pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 92,5 persen.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 3,7, indeks SPBE dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 3,7 artinya hingga tahun 2025 indeks integritas di Kabupaten Tabalong bernilai sama.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Target akhir pada tahun 2029 untuk nilai indeks SPBE tidak diketahui, sehingga untuk capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk indeks SPBE hingga tahun 2029 masih belum diketahui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 2,9 bahwasanya untuk indeks SPBE Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan nilai 3,7.

e. Analisis penyebab keberhasilan indeks integritas

Keberhasilan peningkatan indeks integritas di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Penguatan Komitmen Pimpinan Daerah
2. Penguatan Tata Kelola SPBE
3. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Pemerintahan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi
5. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan

Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah dalam mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, didukung dengan penguatan kebijakan dan regulasi yang jelas, pengembangan serta integrasi berbagai aplikasi pemerintahan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut memastikan implementasi SPBE berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pengembangan digitalisasi pemerintahan, melalui pelaksanaan program penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan aplikasi layanan publik, serta integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur sipil negara maupun tenaga teknis IT, dalam mengelola dan mengembangkan sistem SPBE sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan internet, pusat data, serta aplikasi pelayanan yang dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada integrasi dan interoperabilitas sistem, melalui pengembangan aplikasi yang terhubung antar perangkat daerah sehingga mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis pemerintahan dan mengurangi duplikasi sistem.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam pengembangan SPBE, melalui sinergi antar perangkat daerah serta dukungan kebijakan nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan Indeks SPBE di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

1. Pelaksanaan program pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, melalui penyediaan jaringan internet, pusat data, serta perangkat pendukung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
2. Pelaksanaan program pengembangan aplikasi dan sistem pemerintahan digital, melalui pembangunan dan integrasi aplikasi pelayanan publik serta sistem administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
3. Pelaksanaan program penguatan tata kelola SPBE, melalui penyusunan arsitektur SPBE, kebijakan, serta standar operasional prosedur guna memastikan implementasi SPBE berjalan terarah dan terintegrasi.

4. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem digital.
5. Pelaksanaan program peningkatan keamanan informasi dan perlindungan data, melalui penerapan sistem keamanan siber serta pengelolaan data yang terstandar untuk menjaga keandalan sistem SPBE.
6. Pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan aksesibilitas, serta pengembangan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung interoperabilitas sistem serta implementasi SPBE secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks SPBE di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

3. Nilai SAKIP

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong adalah BB. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong tahun 2025

sebesar B dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar BB pertahun sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar B.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 67,10 dengan predikat B, nilai SAKIP dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 67,66 dengan predikat B artinya hingga tahun 2025 nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk nilai SAKIP sebesar A. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar B, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk nilai SAKIP hingga tahun 2029 sebesar B.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 65,75 bahwasanya untuk nilai SAKIP Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan nilai 67,66.

e. Analisis penyebab keberhasilan indeks integritas

Keberhasilan peningkatan nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Komitmen Pimpinan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja

2. Penguatan Perencanaan Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Daerah
3. Peningkatan Kualitas Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
4. Pemanfaatan Aplikasi Pendukung Pengelolaan Kinerja
5. Pembinaan, Pendampingan, dan Koordinasi kepada Perangkat Daerah
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Secara Berkala
7. Sinergi Antar Perangkat Daerah dalam Penerapan Manajemen Kinerja

Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, didukung oleh penyelarasan perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan aplikasi pendukung pengelolaan kinerja. Selain itu, pelaksanaan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala kepada perangkat daerah juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi manajemen kinerja. Sinergi dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah turut mendukung pelaksanaan SAKIP secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung penguatan akuntabilitas kinerja, melalui pelaksanaan program perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, baik aparatur sipil negara maupun tim pengelola kinerja, dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan cascading kinerja, serta memastikan keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung sistem kinerja, seperti aplikasi e-SAKIP, sistem informasi perencanaan dan pelaporan, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas data kinerja serta mempermudah monitoring dan evaluasi.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen kinerja, melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran, penguatan budaya kinerja, serta penerapan prinsip value for money dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam penguatan SAKIP, melalui sinergi antar perangkat daerah serta pembinaan dan evaluasi dari pemerintah pusat guna memastikan implementasi akuntabilitas kinerja berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

1. Pelaksanaan program penguatan perencanaan kinerja, melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, penyelarasan indikator kinerja, serta cascading kinerja dari level pimpinan hingga unit kerja.
2. Pelaksanaan program penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja, melalui penyusunan indikator yang terukur, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta penyusunan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu.
3. Pelaksanaan program integrasi perencanaan dan penganggaran, melalui penyelarasan antara program, kegiatan, dan alokasi anggaran agar berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).
4. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntabilitas kinerja, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.

5. Pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kinerja, seperti aplikasi e-SAKIP untuk mendukung proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi.
6. Pelaksanaan program evaluasi dan pengendalian kinerja, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas perangkat daerah, melalui koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam memastikan konsistensi penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan nilai SAKIP di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

4. Indeks Pemerintahan Digital

Indikator sasaran berupa Indeks Pemerintahan Digital pada Kabupaten Tabalong Tahun 2025 belum dapat disajikan nilai capaiannya secara definitif. Hal ini dikarenakan hingga saat ini hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pemerintah daerah belum diterbitkan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital

sepanjang Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE, pengembangan serta optimalisasi berbagai aplikasi layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah guna mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi proses evaluasi SPBE, antara lain melalui pemenuhan dokumen dan eviden yang menjadi komponen penilaian, yang meliputi aspek kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Upaya ini juga didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi pemerintahan digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Diharapkan hasil evaluasi yang akan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat mencerminkan berbagai upaya perbaikan dan penguatan implementasi SPBE yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

5. Opini BPK

Indikator sasaran berupa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 hingga saat ini belum dapat disajikan nilai capaiannya secara definitif. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih dalam proses audit dan belum diterbitkan secara resmi.

Meskipun opini atas laporan keuangan tersebut belum diumumkan, Pemerintah Kabupaten Tabalong terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga secara aktif melakukan koordinasi dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Dengan berbagai upaya perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan daerah yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Tabalong optimis bahwa hasil pemeriksaan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 akan menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setelah laporan hasil pemeriksaan resmi diterbitkan.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk indeks pelayanan publik di Kabupaten Tabalong Adalah 4,51. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, indeks pelayanan publik di Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebesar 4,46 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebesar 4,51 sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 98,89.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 4,49, indeks pelayanan publik dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 4,46 artinya indeks pelayanan publik pada tahun 2025 terdapat penurunan sebesar 0,03.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk indeks pelayanan publik sebesar 4,59. Dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 4,46, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk indeks pelayanan publik hingga tahun 2029 sebesar 97,16.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 3,45 bahwasanya untuk indeks pelayanan publik Kabupaten Tabalong lebih tinggi dengan nilai 4,46.

e. Analisis penyebab keberhasilan indeks pelayanan publik

Keberhasilan peningkatan indeks pelayanan publik di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Komitmen Pimpinan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Penguatan Standar Pelayanan Publik
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan
4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pelayanan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan
6. Pengelolaan Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, didukung dengan penguatan standar pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut berperan penting dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sinergi antar perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya melalui :

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan sarana dan prasarana pelayanan, digitalisasi layanan, serta inovasi pelayanan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif, khususnya aparatur pelayanan sebagai frontliner, dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti mall pelayanan publik, sistem layanan berbasis elektronik, serta fasilitas pelayanan yang ramah pengguna untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat.
4. Pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, melalui penyederhanaan prosedur, penerapan standar pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, kepercayaan publik, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Berdasarkan hasil analisis, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan Indeks Pelayanan Publik:

1. Pelaksanaan program peningkatan kualitas standar pelayanan publik, melalui penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta SOP yang jelas dan terukur pada setiap unit layanan.
2. Pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, melalui penyediaan fasilitas pelayanan yang representatif, ramah disabilitas, serta berbasis kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.
3. Pelaksanaan program digitalisasi pelayanan publik, melalui pengembangan layanan berbasis elektronik (e-government) untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan transparansi pelayanan.

4. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan kompetensi dan etika pelayanan bagi ASN sebagai frontliner pelayanan publik.
5. Pelaksanaan program pengelolaan pengaduan masyarakat, melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, responsif, serta tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap setiap aduan masyarakat.
6. Pelaksanaan program inovasi pelayanan publik, melalui pengembangan berbagai inovasi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
7. Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi pelayanan publik, melalui survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja layanan, serta tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.
8. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi lintas sektor, melalui sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat terus berlanjut serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

15. Capaian Terhadap Sasaran Strategis Pada Misi 4

Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan

Capaian terhadap sasaran kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29 Meningkatnya penerapan inovasi dalam Pembangunan

No	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2025)	Capaian s/d 2025
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran kinerja Predikat Inovasi Daerah dengan capaian kinerja **sangat tinggi**. Predikat Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 dan 2025 berhasil mempertahankan kategori Sangat Inovatif. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong budaya inovasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Konsistensi dalam meraih predikat tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan berbagai terobosan dan solusi kreatif yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah dan kualitas layanan kepada masyarakat. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas inovasi, memperluas replikasi praktik baik, serta memastikan keberlanjutan dan dampak nyata inovasi bagi kesejahteraan masyarakat.

A. Analisis Capaian Terhadap Target Indikator sasaran

Predikat Inovasi Daerah

- a. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja Bupati Tabalong tahun 2025 untuk predikat inovasi daerah di Kabupaten Tabalong Adalah sangat inovatif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong tahun 2025, predikat inovasi daerah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 yaitu sangat inovatif dibandingkan dengan target perjanjian kinerja yaitu sangat inovatif sehingga persentase capaian kinerjanya yaitu sangat inovatif.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 sebesar 91,21 dengan predikat sangat inovatif, predikat inovasi daerah dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 92,09 dengan predikat sangat inovatif artinya hingga tahun 2025 predikat inovasi daerah di Kabupaten Tabalong semakin meningkat setiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2025-2029

Dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah, sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, target akhir pada tahun 2029 untuk predikat inovasi daerah yaitu sangat inovatif. Dengan realisasi pada tahun 2025 yaitu sangat inovatif, capaian kinerja terhadap target pembangunan jangka menengah untuk predikat inovasi daerah hingga tahun 2029 yaitu sangat inovatif.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 73,58 bahwasanya untuk predikat inovasi daerah Kabupaten Tabalong lebih dengan nilai 92,09.

e. Analisis penyebab keberhasilan indeks integritas

Keberhasilan peningkatan predikat inovasi daerah di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Komitmen Pimpinan Daerah dalam Mendorong Budaya Inovasi
2. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pendukung Inovasi
3. Peran Aktif Perangkat Daerah dalam Mengembangkan Inovasi
4. Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Inovasi Daerah
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Inovasi
6. Kolaborasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah
7. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Inovasi

Secara keseluruhan, keberhasilan peningkatan Predikat Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah dalam mendorong terciptanya budaya inovasi di lingkungan pemerintahan, yang didukung oleh penguatan kebijakan serta regulasi pendukung inovasi. Selain itu, peran aktif perangkat daerah dalam mengembangkan berbagai inovasi, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan inovasi daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung terciptanya inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga berperan penting dalam memastikan inovasi daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.

- f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan sumber daya dalam upaya meningkatkan penerapan inovasi dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan relatif efisien, karena mampu menghasilkan capaian kinerja yang menunjukkan perkembangan positif terhadap peningkatan predikat inovasi daerah.

Efisiensi tersebut tercermin dari:

1. Penggunaan anggaran yang mampu mendukung pengembangan inovasi daerah, baik melalui fasilitasi penciptaan inovasi pada perangkat daerah maupun penguatan sistem pembinaan dan pengelolaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemanfaatan sumber daya manusia aparatur yang efektif, melalui peningkatan kapasitas aparatur serta dorongan kepada perangkat daerah untuk terus menciptakan dan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital, yang mendukung pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta percepatan penyebaran praktik baik inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam mendorong budaya inovasi, termasuk pembinaan, monitoring, evaluasi, serta dokumentasi inovasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan inovasi.

Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, diharapkan penerapan inovasi dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan di Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program-program tersebut meliputi:

1. Program pengembangan dan pembinaan inovasi daerah, melalui fasilitasi penciptaan inovasi pada perangkat daerah serta pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan inovasi daerah.
2. Program penguatan kapasitas aparatur dalam pengembangan inovasi, melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Program pengelolaan dan dokumentasi inovasi daerah, melalui inventarisasi, pelaporan, serta pengembangan sistem pengelolaan inovasi daerah untuk mendukung penilaian inovasi daerah secara berkelanjutan.

4. Program pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung inovasi pelayanan publik, melalui pengembangan berbagai aplikasi dan sistem digital yang mendukung efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
5. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah, untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, serta pengembangan inovasi yang telah diterapkan pada perangkat daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerapan inovasi dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan serta mencerminkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.34, dari target pendapatan sebesar Rp2.966.241.185.578,85 berhasil direalisasikan sebesar Rp3.460.327.150.427,10 atau mencapai 116,65 persen. Capaian ini menegaskan efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada penguatan fundamental pembangunan.

**Tabel 3. 30 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.966.241.185.578,85	3.460.327.150.427,10	116,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	290.230.809.786,85	325.790.441.551,10	112,25
4.1.01	Pajak Daerah	135.211.500.000,00	141.544.529.056,00	104,68
4.1.02	Retribusi Daerah	24.797.637.145,00	52.332.280.865,00	211,03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.564.005.726,00	14.541.441.024,00	99,84
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.657.666.915,85	117.372.190.606,10	101,48
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	290.230.809.786,85	325.790.441.551,10	112,25
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.462.131.090.792,00	2.883.146.934.641,00	117,09
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.304.519.129.065,00	2.727.542.758.899,00	118,35
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.611.961.727,00	155.604.175.742,00	98,72
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	157.611.961.727,00	155.604.175.742,00	98,72
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.462.131.090.792,00	2.883.146.934.641,00	117,09
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.879.285.000,00	251.389.774.235,00	117,53
4.3.01	Pendapatan Hibah	213.879.285.000,00	251.389.774.235,00	117,53

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.879.285.000,00	251.389.774.235,00	117,53
	JUMLAH PENDAPATAN	2.966.241.185.578,85	3.460.327.150.427,10	116,65

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong Tahun 2025

(unaudited)

Berdasarkan Tabel 3.34, struktur pendapatan daerah menunjukkan tren yang semakin berkualitas. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 112,25 persen dari target, yang mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendorong optimalisasi potensi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.

Pendapatan transfer tetap berperan sebagai penopang utama dengan realisasi mencapai 117,09 persen. Kondisi ini mencerminkan terpeliharanya harmonisasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga memberikan stabilitas dalam pembiayaan program pembangunan prioritas.

Sementara itu, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 117,53 persen semakin memperluas ruang fiskal daerah, memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan serta menjaga kesinambungan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, capaian pendapatan yang melampaui target menjadi indikator positif bagi ketahanan fiskal daerah dan memberikan fondasi yang kuat dalam menjaga

momentum pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong secara berkelanjutan.

b. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang prudent, efektif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.35, dari total anggaran belanja sebesar Rp3.598.148.471.731,19 telah direalisasikan sebesar Rp3.034.189.656.706,97 atau 84,32 persen. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara akselerasi pelaksanaan program pembangunan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah.

Tabel 3. 31 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	3.598.148.471.731,19	3.034.189.656.706,97	84,32
5.1	BELANJA OPERASI	2.009.412.619.642,09	1.650.571.271.749,00	82,14
5.1.01	Belanja Pegawai	945.467.653.665,00	780.352.852.808,00	82,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.858.638.487,09	802.616.487.355,00	81,16
5.1.03	Belanja Bunga	6.346.580.000,00	2.857.617.938,00	45,02
5.1.04	Belanja Subsidi	1.092.282.978,00	21.225.000,00	1,94
5.1.05	Belanja Hibah	54.815.133.647,00	53.510.979.648,00	97,62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.832.330.865,00	11.212.109.000,00	87,37
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.009.412.619.642,09	1.650.571.271.749,00	82,14

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
5.2	BELANJA MODAL	1.205.681.877.071,91	1.021.540.022.658,97	84,72
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33.746.020.725,00	25.339.498.591,00	75,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.233.090.337,11	156.235.924.190,00	87,16
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.680.289.767,80	196.588.948.341,53	79,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	737.669.805.759,00	637.430.921.255,44	86,41
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.863.344.983,00	3.751.644.214,00	97,10
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.489.325.500,00	2.193.086.067,00	88,09
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.205.681.877.071,91	1.021.540.022.658,97	84,72
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.800.494.017,19	1.480.000.000,00	11,56
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.800.494.017,19	1.480.000.000,00	11,56
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	12.800.494.017,19	1.480.000.000,00	11,56
5.4	BELANJA TRANSFER	370.253.481.000,00	360.598.362.299,00	97,39
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.446.400.000,00	20.446.400.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	349.807.081.000,00	340.151.962.299,00	97,23
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	370.253.481.000,00	360.598.362.299,00	97,39
	JUMLAH BELANJA	3.598.148.471.731,19	3.034.189.656.706,97	84,32

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong Tahun 2025
(unaudited)

Berdasarkan Tabel 3.35, komposisi belanja daerah diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja operasi terealisasi sebesar 82,14 persen, yang terutama dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan, penyediaan layanan dasar, serta dukungan terhadap aktivitas perekonomian daerah.

Belanja modal terealisasi sebesar 84,72 persen dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur serta penyediaan aset produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Fokus belanja pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi menjadi indikator nyata percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah dan mobilitas masyarakat.

Realisasi belanja transfer sebesar 97,39 persen mencerminkan kuatnya dukungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat pembangunan berbasis kewilayahan serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Sementara itu, rendahnya realisasi belanja tidak terduga merupakan indikator positif yang menunjukkan kondisi daerah relatif kondusif serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi risiko fiskal secara antisipatif.

Secara keseluruhan, pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan kualitas belanja yang semakin terarah, efisien, dan produktif, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas keuangan daerah tetapi juga memberikan daya ungkit yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong.

c. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Kinerja pembiayaan daerah merupakan instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal serta memastikan keseimbangan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.36, realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp631.907.286.152,66 atau 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan perencanaan anggaran yang kredibel serta pengelolaan kas daerah yang semakin akurat dan terukur.

**Tabel 3. 32 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	631.907.286.152,34	631.907.286.152,66	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	676.200.601.468,34	676.200.601.468,66	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	676.200.601.468,34	676.200.601.468,66	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	676.200.601.468,34	676.200.601.468,66	100,00

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000,00	18.138.800.000,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.293.315.316,00	44.293.315.316,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	631.907.286.152,34	631.907.286.152,66	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong Tahun 2025

(unaudited)

Berdasarkan Tabel 3.36, penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya terealisasi 100 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya kapasitas fiskal yang memadai sekaligus menjadi buffer keuangan daerah dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan pendanaan pembangunan.

Pengeluaran pembiayaan juga terealisasi sesuai rencana, terutama dialokasikan untuk penyertaan modal daerah serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban utang tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kredibilitas fiskal serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Realisasi pembiayaan netto yang tepat sasaran semakin menegaskan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Tabalong telah dilaksanakan secara hati-hati, berimbang, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga ruang fiskal tetap sehat sekaligus memberikan fleksibilitas dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pembiayaan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan fondasi keuangan daerah yang solid, ditopang oleh manajemen fiskal yang disiplin serta strategi penganggaran yang adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

d. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan

Realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 33 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	2.665.576.702.436,00	2.876.285.635.126,64
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	247.404.526.277,00	264.607.523.905,64
4.1.01	Pajak Daerah	85.313.474.000,00	89.780.105.185,00
4.1.02	Retribusi Daerah	111.795.793.776,00	100.474.184.730,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644,00	14.735.829.206,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.494.374.857,00	59.617.404.784,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.278.172.176.159,00	2.611.678.111.221,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.046.413.738.000,00	2.401.653.905.992,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.914.611.170.000,00	2.272.736.886.992,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	102.226.677.000,00	102.226.677.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	29.575.891.000,00	26.690.342.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.758.438.159,00	210.024.205.229,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	231.758.438.159,00	210.024.205.229,00

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 2024 (Unaudited)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 2.876.285.635.126,64 dari estimasi pendapatan yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 2.665.576.702.436,00. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 264.607.523.905,64 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 247.404.526.277. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.
- 2) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp. 2.611.678.111.221,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 2.278.172.176.159,00. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
- 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan hibah dan pendapatan lainnya, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp. 140.000.000.000,00

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 34 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	3.183.167.179.768,00	2.718.184.089.048,70

5.1	BELANJA OPERASI	1.784.448.643.144,00	1.550.436.515.684,78
5.1.01	Belanja Pegawai	825.804.659.096,00	729.838.937.687,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.359.844.543,00	709.644.966.804,52
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	4.359.106.254,00
5.1.04	Belanja Subsidi	723.370.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	74.485.739.505,00	73.543.774.939,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.725.450.000,00	33.049.730.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.068.567.900.118,00	846.763.080.563,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.871.893.222,00	42.619.692.957,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.281.067.573,00	108.059.565.476,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.678.336.134,00	152.095.305.224,92
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	666.521.821.413,00	537.443.825.200,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.499.381.776,00	4.355.098.455,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.715.400.000,00	2.189.593.251,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	318.999.492.800,00	318.999.492.800,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.968.300.000,00	20.968.300.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	298.031.192.800,00	298.031.192.800,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 2024 (Unaudited)

Belanja merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.718.184.089.048,70 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp.3.183.167.179.768,00. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer, dengan realisasi sebagai berikut :

- 1) Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.550.436.515.684,78 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.784.448.643.144,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, bantuan bantuan sosial.
- 2) Realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 846.763.080.563,92 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.068.567.900.118,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,

belanja modal bangunan dan Gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.

- 3) Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 sebesar Rp. 1.985.000.000,00 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp. 11.151.143.706,00.
- 4) Realisasi transfer tahun 2024 sebesar Rp. 318.999.492.800,00 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp. 318.999.492.800,00. Belanja transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.
 - a. Realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 20.968.300.000,00 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp. 20.968.300.000,00 Transfer bagi hasil pendapatan terdiri dari transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil retribusi daerah.
 - b. Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp. 298.031.192.800,00 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp. 298.031.192.800,00 Transfer bantuan keuangan terdiri dari transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya.

3.4 Perbandingan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 dan 2025

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 sama-sama menunjukkan kinerja yang baik, namun dengan karakteristik yang berbeda.

Pada Tahun 2024, efisiensi tercermin secara langsung dari tingkat efisiensi belanja sebesar 14,61%, yang menunjukkan adanya penghematan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, realisasi belanja modal yang hanya

mencapai 79,24% serta adanya SiLPA sebesar Rp221,80 miliar mengindikasikan bahwa efisiensi lebih banyak dipengaruhi oleh:

- Pengendalian belanja,
- Adanya sisa anggaran yang tidak terserap,
- Kemungkinan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.

Dengan demikian, efisiensi pada tahun 2024 cenderung bersifat administratif (cost saving), yang meskipun positif, tetap memerlukan evaluasi agar tidak berdampak pada capaian output.

Sementara itu, pada Tahun 2025, efisiensi menunjukkan kualitas yang lebih baik dan lebih seimbang antara kinerja dan pemanfaatan anggaran. Hal ini terlihat dari:

- Realisasi pendapatan yang melampaui target (116,65%),
- Penyerapan belanja sebesar 84,32%,
- Realisasi pembiayaan yang mencapai 100%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi tidak hanya berasal dari penghematan anggaran, tetapi juga dari:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan,
- Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan,
- Perencanaan dan pengendalian fiskal yang lebih akurat.

Efisiensi pada tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai efisiensi produktif (value for money), di mana output dan outcome tetap tercapai bahkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih terkendali.

Dibandingkan Tahun 2024, efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Jika pada tahun 2024 efisiensi lebih dipengaruhi oleh adanya penghematan anggaran dan sisa belanja, maka pada tahun 2025 efisiensi telah berkembang menjadi lebih produktif, terarah, dan berbasis kinerja.



BAB IV**PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis, 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/464/2025 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan

target, bahkan ada yang melebihi target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 35 indikator kinerja utama Bupati tahun 2025 yang terdiri dari 7 indikator tujuan dan 28 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 29 (Dua Puluh Sembilan) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Tinggi**, 3 (Tiga) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Tinggi**, 1 (Satu) indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **sedang**, 0 indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Rendah**, 0 indikator kinerja yang berkriteria pengukuran nilai perangkat kinerja **Sangat Rendah** dan 2 (Dua) indikator belum rilis, dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja dalam Surat Keputusan Bupati Tabalong khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk indikator sasaran yang belum tercapai Pemerintah Kabupaten Tabalong tetap optimis dengan sisa waktu sampai akhir tahun dapat tercapai secara keseluruhan. Upaya perbaikan kedepan dalam menjawab tantangan pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan tetap fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pendukung sasaran daerah.

LAMPIRAN



**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13,29 Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,62 Tahun
		Umur Harapan Hidup	76,37 Tahun
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	22 %
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	86 Indeks
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	Persentase Penduduk Miskin	5,44-4,48
		Indeks Gini	0,273-0,263
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,20-2,64
5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	Persentase penduduk yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) usia 20–24 tahun	21 %
6	Berkembangnya sektor unggulan daerah	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,02 %
		Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	7,78 %
		Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	1,47 %
7	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	Nilai Realisasi Investasi non Tambang	636,85 Milyar Rupiah
		Rasio Kewirausahaan Daerah	2,03 %

8	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	0,736 Angka
9	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa	81 Indeks
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Penurunan intensitas emisi GRK	2,36 %
		Indeks Risiko Bencana	151,37 Indeks
11	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Angka konflik bernuansa SARA	0 Kasus
12	Meningkatnya kemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58.89-58.91
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,417 Indeks
14	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Indeks Integritas	76,4 Indeks
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Indeks
		Nilai SAKIP	BB
		Indeks Pemerintah Digital	0 Indeks
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		Indeks Pelayanan Publik	4,51 Indeks
15	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan	Predikat Inovasi Daerah	Sangat Inovatif

NO	Program	Anggaran (Rp)
	Semua Urusan	

	Semua Bidang	1.252.934.165.795
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.252.934.165.795
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	125.777.981.010
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	118.207.468.232
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.570.512.778
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	155.543.394.417
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	152.024.834.155
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.584.288.400
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	385.296.780
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	548.975.082
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	549.024.951.942
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.450.891.220
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.810.584.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.311.377.400
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.000.000.000
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	59.621.886.973
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	434.798.731.082
15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	946.135.367
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.085.345.900
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	146.089.040.081
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.110.365.000

18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	15.255.151.285
19	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.412.900.000
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	123.310.623.796
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.269.847.784
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.594.076.250
22	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.172.115.199
23	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.503.656.335
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	39.235.373.836
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.170.092.920
25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.235.957.867
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	28.562.198.439
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	461.578.854
28	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	805.545.756
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.375.295.295
29	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	135.480.617
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.959.604.130
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.765.565.648
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.514.644.900
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.441.531.243
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	758.538.075
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	423.641.793
35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	294.266.461
36	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.435.371
37	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	401.192.284

38	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	422.457.259
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.225.243.075
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.897.963.595
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	802.988.065
41	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	356.642.107
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	167.649.308
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	15.598.221.500
43	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40.860.500
44	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15.411.119.000
45	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	146.242.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	35.887.882.681
46	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.272.688.000
47	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	5.173.331.973
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.011.995.624
49	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	495.729.400
50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	312.554.260
51	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	150.987.400
52	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	298.407.059
53	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	103.326.500
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.068.862.465
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.700.967.786
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.346.205.930

56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	269.771.884
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.024.272.622
58	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	60.717.350
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.923.655.299
59	PROGRAM PENATAAN DESA	5.916.206.727
60	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	101.002.695
61	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.556.695.652
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.349.750.225
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.668.236.669
63	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	459.071.817
64	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.581.899.852
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.627.265.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.393.071.424
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	29.393.071.424
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.162.421.668
67	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.013.467.098
68	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.148.954.570
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	934.442.275
69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	43.551.000
70	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	77.250.263
71	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	134.294.380
72	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0
73	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	162.159.000
74	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	517.187.632
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.119.728.453

75	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	208.105.000
76	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	556.971.528
77	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	659.569.080
78	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	279.793.898
79	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	415.288.947
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	24.347.001.156
80	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	467.705.370
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	22.674.295.786
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.205.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	525.247.920
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	525.247.920
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	366.643.400
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	366.643.400
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.092.019.802
85	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.312.885.400
86	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	779.134.402
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.493.527.855
87	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.493.527.855
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.162.109.618
88	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	775.461.817
89	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	386.647.801
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.159.231.893
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	374.691.747
91	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.401.115.708
92	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	203.428.517
93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	179.995.921
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.354.499.385

94	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.054.743.864
95	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.244.127.514
96	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	55.628.007
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	55.240.865.717
97	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24.489.304.388
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.292.615.159
99	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.865.803.226
100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.075.329.065
101	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.517.813.879
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.536.498.782
102	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	15.475.080
103	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.035.005.158
104	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	301.040.388
105	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	84.522.728
106	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100.455.428
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.288.762.426
107	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.243.376.326
108	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	16.217.400
109	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	29.168.700
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	SEKRETARIAT DAERAH	41.400.449.892
110	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.594.020.625
111	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.806.429.267
	SEKRETARIAT DPRD	41.096.726.869
112	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	41.096.726.869
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	PERENCANAAN	4.059.970.962

113	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.867.287.875
114	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.192.683.087
	KEUANGAN	409.025.307.170
115	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	403.830.939.547
116	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.031.854.400
117	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.162.513.223
	KEPEGAWAIAN	4.431.685.587
118	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.431.685.587
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.323.567.307
119	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.323.567.307
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.764.688.557
120	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.764.688.557
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	INSPEKTORAT DAERAH	4.042.854.097
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.081.047.180
122	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	961.806.917
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	19.228.485.380
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.754.394.587
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.770.068.937
125	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	558.744.152
126	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.448.889.773
127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	696.387.931
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.223.863.906
128	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.272.506.918

129	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.907.904.568
130	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	750.258.000
131	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	459.487.420
132	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	833.707.000

TABALONG, 16 Oktober 2025

Bupati TABALONG,



Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT



TABALONG

BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/464/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

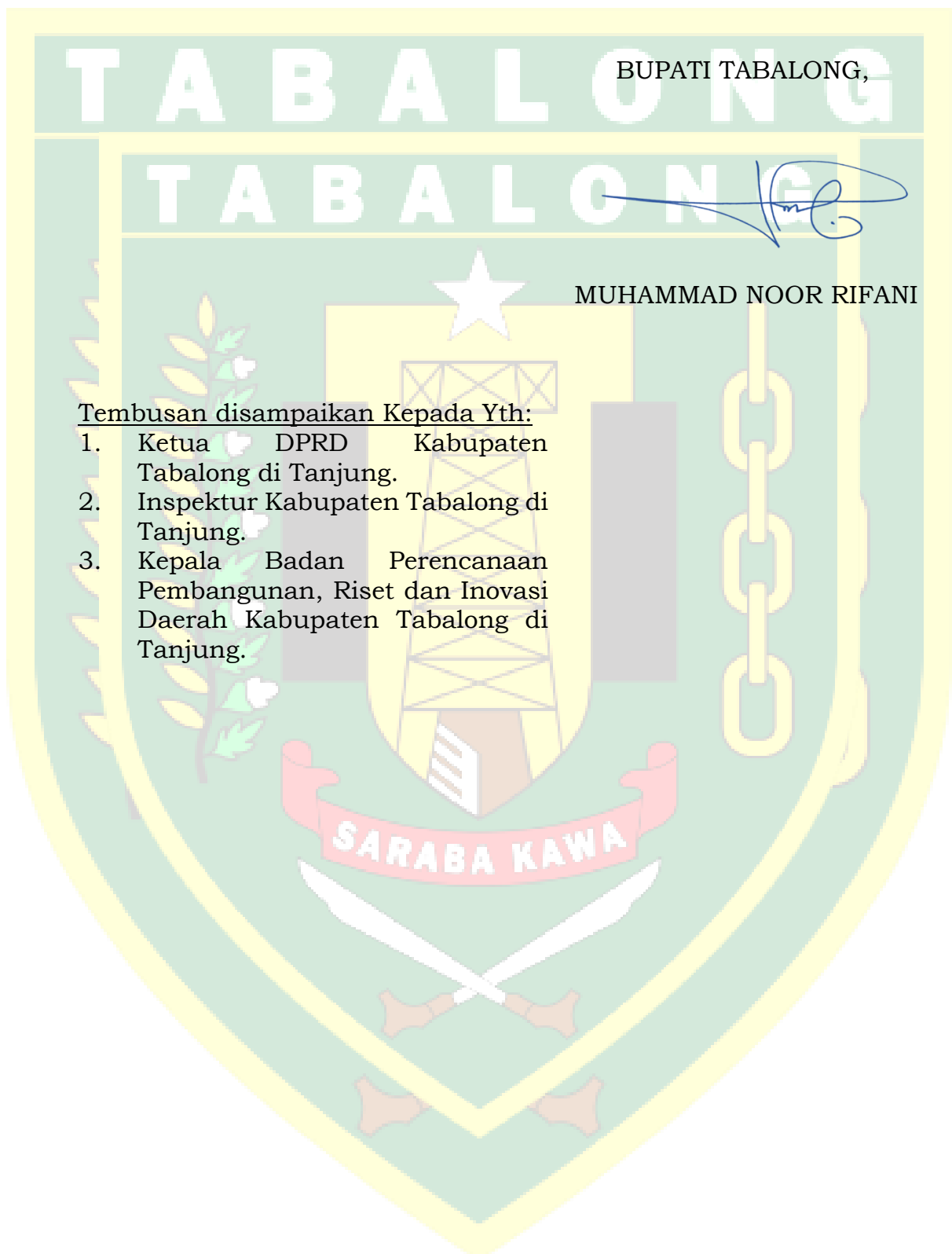
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam mencapai Kinerja Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/464/2025
TANGGAL 18 NOVEMBER 2025

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1. Harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan lamanya waktu pendidikan formal yang diharapkan akan dijalani oleh anak dimasa depan, yang juga mencerminkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Secara umum angka ini mengasumsikan kesempatan yang sama bagi pelajar untuk mengikuti pendidikan formal.	Badan Pusat Statistik RI

		2. Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Ini merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menunjukkan tingkat kualitas pendidikan suatu daerah.	Badan Pusat Statistik RI
		3. Umur Harapan Hidup (tahun)	UHH adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun ke-x. Ukuran umum yang digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika menyebut UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh sesorang tersebut sejak lahir.	Badan Pusat Statistik RI
		4. Prevalensi Stunting (%)	Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	Survey Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan 2024

2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai capaian ketahanan pangan suatu daerah, berdasarkan tiga aspek utama : ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2024, BPS RI Tahun 2025
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	1. Persentase penduduk miskin (%)	Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan suatu daerah. Garis Kemiskinan adalah batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak disuatu negara atau wilayah. Batas ini dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan pengeluaran makanan dan non-makanan perkapita perbulan.	BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Tabalong Tahun 2025

		2. Indeks Gini (indeks)	Indeks Gini adalah ukuran statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara atau wilayah. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Semakin tinggi indeks Gini, semakin besar kesenjangan ekonominya.	BPS Tabalong, BPS Kalimantan Selatan, BPS RI Tahun 2024 dan LPPD Tabalong Tahun 2024
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka (PT) terdiri dari (a). Mereka yang mencari pekerjaan; (b). Mereka yang mempersiapkan usaha; (c). Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	Persentase penduduk Kategori <i>Not in Education, Employment or Training (NEET)</i> usia 20–24 tahun	NEET adalah singkatan dari <i>Not in Education, Employment, or Training</i> , yang merujuk pada kelompok orang (biasanya berusia muda) yang tidak sedang bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan keterampilan. Istilah ini berbeda dari pengangguran, karena orang yang termasuk dalam kategori <i>NEET</i> tidak secara aktif mencari pekerjaan atau pelatihan, meskipun tidak sedang bekerja atau sekolah.	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Tenaga Kerja

6	Berkembangnya sektor unggulan daerah	1. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100%.	PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
		2. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Sektor Pertanian didukung oleh 3 (tiga) sub kategori lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan (3) Perikanan	Badan Pusat Statistik RI

		3. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%) adalah persentase nilai tambah bruto dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (seperti hotel, restoran, kafe, dan jasa boga) terhadap total PDRB suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan seberapa besar peran sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dan biasanya dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat periode tersebut atau harga konstan tahun dasar.	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Tenaga Kerja 6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 7. Sekretariat Daerah 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
--	--	---	--	---

7	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	1. Nilai Realisasi Investasi non Tambang (rupiah)	Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Untuk Kabupaten Tabalong dilakukan penghitungan Nilai Realisasi Investasi Non Tambang karena diharapkan sektor non tambang dapat menjadi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih didominasi sektor pertambangan.	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Tenaga Kerja 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Komunikasi dan Informatika
---	--	--	---	---

		2. Rasio Kewirausahaan Daerah (angka)	Perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Badan Pusat Statistik RI
8	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (indeks)	Indeks infrastruktur adalah alat ukur untuk menilai kinerja atau kualitas infrastruktur suatu wilayah, yang bisa meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, drainase, dan air bersih, serta aspek lain seperti aksesibilitas dan layanan.	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura 3. Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Sosial

9	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa (indeks)	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko	Dinas Lingkungan Hidup

11	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Angka konflik bernuansa SARA	Angka konflik bernuansa SARA mengacu pada data statistik mengenai insiden kekerasan atau perselisihan yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik ini dapat terjadi karena kesenjangan sosial-ekonomi, diskriminasi, atau kurangnya pemahaman antar kelompok, yang sering kali dipicu oleh sentimen negatif atau prasangka buruk.	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Sekretariat Daerah 3. Kecamatan
12	Meningkatnya kemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah, yang bertujuan memberikan gambaran holistik dan menjadi dasar formulasi kebijakan. IPK menghitung capaian dari tujuh dimensi utama, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, dan gender budaya. Nilai IPK berkisar antara \0\ sampai \100\ dengan klasifikasi tertentu untuk tingkat kepentingannya.	1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Kecamatan

13	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks yang mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi ekonomi. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan. IKG dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pengarusutamaan gender.	Badan Pusat Statistik RI
14	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	1. Indeks SPBE (indeks)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, 2025
		2. Indeks Pemerintah Digital (indeks)	Pemerintah Digital (Pemdi)dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3)Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publikprioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Indeks Pemdi merupakan penguatan kebijakan Indeks SPBE.	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2. Inspektorat Daerah 3. Sekretariat Daerah

		3. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi
		4. Indeks Integritas	Indeks Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli; dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Indeks Integritas merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD)	Inspektorat Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI

		5. Nilai SAKIP (kategori)	Hasil Evaluasi atas Sakip Pemda dari Kementrian Pendayagunaan Negara dan RB	Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi
		6. Opini BPK	Salah satu indikator yang memberikan gambaran pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
15	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan	Predikat Inovasi Daerah	Predikat inovasi daerah adalah skor dan kategori indeks inovasi daerah yang didapat berdasarkan penghitungan Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BUPATI TABALONG,

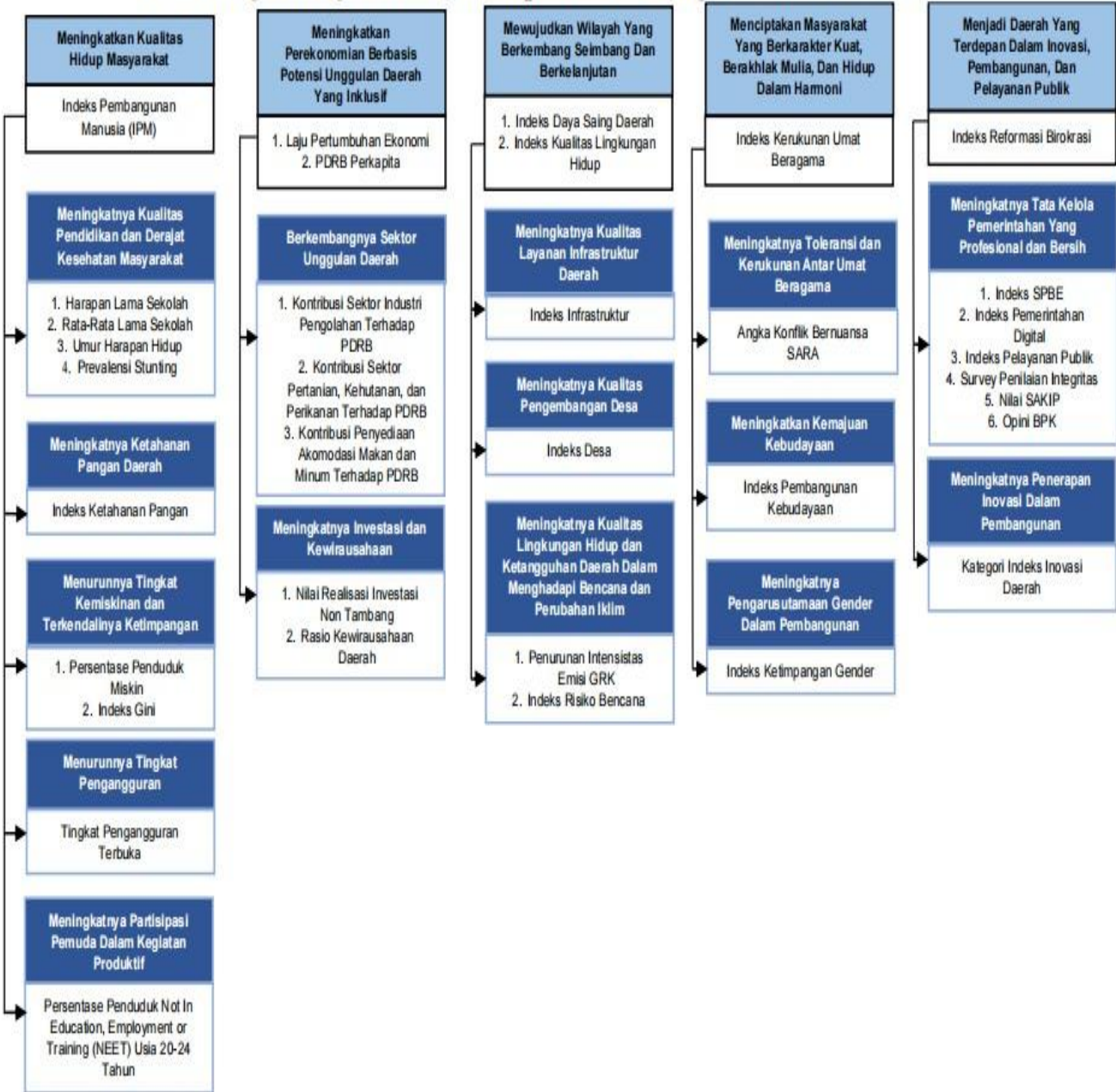


MUHAMMAD NOOR RIFANI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2029

Gambar 3.1.

Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029



Sumber: hasil analisis, 2025



KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2025



**SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI**